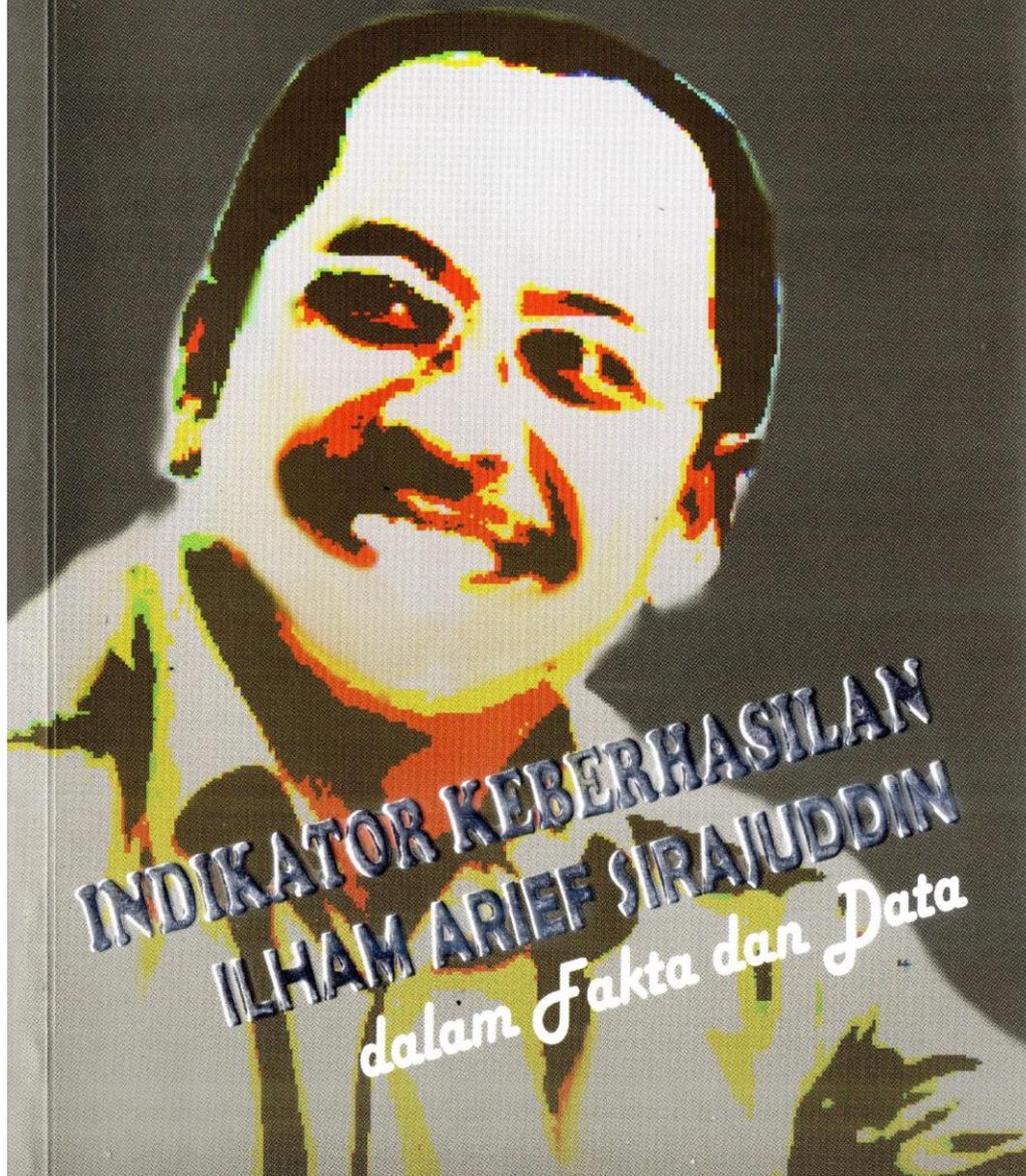


Pengantar,
Gamawam Fauzi

Editor,
Muh. Idris Patarai



**INDIKATOR KEBERHASILAN
ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN**
dalam Fakta dan Data



Perlu diketahui, sejak tahun 2007 kami telah bekerjasama dengan pemerintah kota Makassar yang dipimpin oleh bapak Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, MM dalam upaya penerapan pakta integritas di bidang pengadaan barang dan jasa.

Kerjasama tersebut berlangsung dengan baik dan mendapat dukungan serius dari walikota Makassar. Program kerjasama ini akan terus dilanjutkan, karena sangat penting untuk menciptakan pemerintah yang bersih dan dalam waktu mendatang akan menjadi komitmen jangka panjang pemerintah kota Makassar .

Teten Masduki
*Sekjen Transparency
International Indonesia*

**Indikator Keberhasilan
Ilham Arief Sirajuddin
dalam Fakta dan Data**

Muhammad Idris Patarai



Penerbit: GADIL MEDIA PRIMA

Anggota Perpustakaan Nasional, Jakarta

No.978-602-99673-1-9

**Indikator Keberhasilan
Ilham Arief Sirajuddin
dalam Fakta dan Data**

ISBN : 978-602-99673-1-9

Perpustakaan Nasional, Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Anggota Perpustakaan Nasional No. 979-25-9700-X , Jakarta.

Dr. Muh. Idris Patara i, M.Si

**Indikator Keberhasilan
Ilham Arief Sirajuddin
dalam Fakta dan Data**

Cet. 0-987654321-(angka terakhir)

hlm :
ukuran buku :

Hak Penebitan pada Gadil Media Prima.
Perwakilan: Jl. Baji minasa II Dalam No. 6C, Kec. Mariso 90126
Telp /Fax. 0411-8112960 , Email: gadilmedia@gmail.com

Hasil Kemajuan Pembangunan di Kota Makassar Prov. Sul - Sel



Sanksi pelanggaran pasal 44:

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyerahkan, mem a merkan mengedarkan , atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (I), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan /ata u denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

@ Hak cipta 2011, pada penulis (*all right reserved*)

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, termasuk dengan menggandakan/foto copy, tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan pertama, September 2011

Ilustrasi sampul

S. Yasen

Setting Lay out Sumitro. R **Penyelaras naskah** Dra. Hj. Pahirah Syah.

Pengumpul ide

Endah Ayu Koiriyah, Ainani Syaphira,
Muh. Gadil Yasen





MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya buku berjudul "*Indikator Keberhasilan j/ham Arie/ Sirajuddin dalam Fakta dan Data*" yang ditulis oleh saudara H. Muhammad Idris Patarai. Buku ini merupakan salah satu dari sekian banyak buku yang mencoba mencatatkan sejarah perjalanan otonomi daerah di Indonesia pasca 1999. Sebuah era dimana otonomi atau kewenangan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri diterapkan secara nyata.

Perjalanan otonomi daerah di Indonesia sudah sangat panjang, mulai sejak diterapkannya kebijakan desentralisasi zaman kolonial Belanda tahun 1903 hingga hadirnya Undang Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Otonomi daerah telah memberikan solusi untuk mendorong kemajuan pembangunan daerah di mana daerah diberikan kesempatan yang luas mengembangkan kreativitas dan inovasinya. Banyak kemajuan yang telah dicapai, namun hams disadari juga bahwa masih banyak pula yang perlu dibenahi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan. Perkembangan jumlah daerah otonomi dalam sepuluh tahun terakhir bertumbuh dengan pesat. Terjadi penambahan sebanyak 205 daerah otonomi baru, yang terdiri atas 7 provinsi, 164 kabupaten, dan 34 kota.

Dalam kurun waktu satu dasawarsa pelaksanaan otonomi daerah, kita telah melihat penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih dina mis , ekonomi daerah yang tumbuh dan berkembang lebih maju dengan berbasiskan potensi sumberdaya dan kearifan lokal masing-masing daerah. Pada satu sisi, peningkatan jumlah daerah otonomi ini menunjukkan adanya kemajuan dalam pelaksanaan politik desentralisasi di Indonesia. Namun, pertumbuhan jumlah tersebut tentunya harus diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan publik di masing-masing daerah. Untuk itu, upaya penataan penyelenggaraan otonomi daerah secara komprehensif perlu terus dilakukan.

Setidaknya terdapat tiga hal prinsip yang berubah secara drastis sejak diberlakukannya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah pasca 1999. *Pertama*, otonomi daerah secara nyata telah mendorong demokratisasi yang semakin mendalam di tengah-tengah masyarakat. *Kedua*, otonomi daerah telah menumbuhkan kembangkan iklim kebebasan berkumpul, berserikat serta mengemukakan pikiran secara terbuka bagi seluruh masyarakat. *Ketiga*, dengan desentralisasi yang telah berjalan selama in i, maka

berbagai kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat tidak lagi harus melalui proses panjang dan berbelit-belit, namun menjadi sangat efisien dan responsif.

Buku yang ada di tangan pembaca saat ini, setidaknya dapat memberikan gambaran atas perjalanan otonomi daerah Kota Makassar dalam kepemimpinan Walikota Makassar Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin periode 2004-2009 dan 2009-2014. Berbagai dinamika dan upaya telah dan terus dilakukan pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan otonomi daerah, yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat, perbaikan pelayanan publik serta daya saling daerah.

Dalam rangka memantapkan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, pemerintah daerah diminta untuk tetap menjaga kualitas pelayanan publik dengan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai parameter kinerja pelayanan dasar di daerahnya masing-masing. Sehingga dapat memberikan kepastian kualitas pelayanan bagi masyarakat serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga wajib melakukan evaluasi secara obyektif terhadap capaian kinerja pelayanan publik secara lebih komprehensif yang dapat menjadi masukan guna memperbaiki berbagai kekurangan dan kelemahan yang ada. Mari kita kuatkan komitmen bahwa kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah menjadi pilihan bersama, sehingga berbagai kekurangan yang masih ada akan terus diperbaiki dan disempurnakan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga buku yang ada di tangan anda ini berguna, baik secara referensi maupun sebagai bahan yang dapat memberi inspirasi kita untuk menulis masukan dan solusi perbaikan bagi penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia.

Jakarta, Agustus 2011



Bapak Mendagri, Gamawan Fauzi Berbincang dengan Penulis
Di Pintu Keluar Kantor Kementerian dalam Negeri, Meminta Kesediaan
Menteri dalam rangka memberi kata Sambutan di Buku ini. (Jakarta, 14 Juli 2011)



DARI EDITOR

The decentralization program in Indonesia is an approach to two significant problems; it is a method for spreading government to all parts of the country; it is a method for accommodating regional differences, regional aspirations, and regional demands within the confines of the unitary state. "(Gerald S Maryanov, Cornell University, 1958).

Konsep dasar Undang-undang No. 32/ 2004 sesungguhnya sejalan dengan pendapat Maryanov dalam Bintaro, Tjokroamidjojo (1991). Bahkan dalam tataran konsep, ide normatif dan regulasi, membesarnya kewenangan dan tanggungjawab daerah otonom; keleluasaan daerah mengurus rumah tangganya sesuai kewenangan yang dilimpahkan; adanya kewenangan perencanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan di daerah dan mendorong adanya pemberdayaan masyarakat, tumbuhnya prakarsa dan inisiatif masyarakat dan legislatif.

Dalam hal kebijakan tingkat lokal, setelah adanya kewenangan yang diberikan kepada daerah, penelitian prakarsa (2010) menunjukkan adanya inovasi kebijakan di tingkat lokal. Pengalaman di Meksiko menunjukkan adanya sistem politik lokal kompetitif ke lokal responsif; munculnya birokrasi moderen dan efisien; serta adanya masyarakat sipil yang aktif.

Lain halnya di Afrika, justru pemerintah pusatnya secara konsisten mendukung pemerintah daerahnya. Dengan adanya kemampuan birokrasi pusat mentransfer, di Meksiko misalnya, maka kapasitas ke tingkat lokal yang didukung kesiapan masyarakat sipil lokal memanfaatkan peluang politik desentralisasi.

Khusus di Asia Tenggara , China dan Amerika Latin, terdapat tata kerja kelembagaan lintas unit yang koheren, mekanisme transfer fiskal yang jelas; dan mekanisme akuntabilitas yang efektif mengontrol kebijakan pemerintah lokal. Adapun inovasi di Indonesia, menurut penelitian tersebut menunjukkan semangat desentralisasi telah memunculkan pemimpin lokal (*personal leader driven*) dari pilkada langsung, yang membuka peluang kepemimpinan *responsive*, sekalipun kapasitas fiskal daerah tidak berhubungan dengan inovasi (Prakarsa, 2010).

Dalam tataran inilah kemampuan seorang kepala daerah dibutuhkan dalam memimpin daerahnya. Ilham Arief Sirajuddin dilantik sebagai Walikota Makassar, tgl 8 Mei 2004, untuk periode 2004-2008 (periode pertama). Selanjutnya pada 8 Mei 2009 kembali dilantik untuk periode 2009-2014 (periode kedua) setelah memenangkan Pilkada Walikota secara fantastis dengan jumlah perolehan suara 67,9 % dari keseluruhan suara pemilih. Ilham Arief Sirajuddin mengalahkan perolehan suara kumulatif dari 7 (tujuh) kandidat calon walikota lainnya.

Pembangunan Daerah dan Kepemimpinan Kepala Daerah

Seers (1969) mengemukakan, terdapat pertimbangan nilai dalam pembangunan (*value judgment*). Sejalan dengan itu adalah Riggs (1966), mengemukakan bahwa terdapat orientasi nilai yang menguntungkan (*favourable value orientation*) dalam pembangunan.

Dari dua pendapat tersebut, patut dikemukakan pendapat Gouled (1977), bahwa pembangunan itu sendiri memiliki dua dimensi: *social changes*, modernisasi (*special case* dari

pembangunan) dan industrialisasi (salah satu segi pembangunan, *asinggle facet*). Artinya, pembangunan yang dilaksanakan berproses jauh dengan berbagai dimensi, namun tetap berpegang pada nilai-nilai yang diutamakan, yang diperjuangkan. Dengan kata lain, pembangunan tidak patut mengorbankan nilai, dan jika ini terjadi, maka pembangunan yang dilaksanakan dapat diklasifikasi sebagai pembangunan "sesat".

Dalam kaitan itu, pembangunan daerah yang variatif dalam skala desentralisasi, harus tetap dapat terkontrol dalam satu tatanan koordinasi dan integrasi, baik dari segi perencanaan maupun regulasi dan pembiayaan. Itulah sebabnya pembangunan daerah menurut kebijakan pemerintah menyebutkannya sebagai pembangunan nasional yang diletakkan di daerah; atau dapat dikatakan bahwa pembangunan daerah adalah bagian integral dari pembangunan nasional.

Hal ini menguatkan bahwa kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan merupakan satu sistem antara pusat dan daerah. Sekalipun demikian, kondisi ini tidak berarti adanya posisi saling mendominasi. Variasi antar daerah sangat ditentukan kebijakan tingkat lokal.

Heaphy (1971) membagi atas tiga dimensi ruang / wilayah dalam pembangunan, yakni:

Pertama, Daerah diletakkan sebagai entity, dalam hal ini penekanan perencanaan bersifat bebas (*independent*).

Kedua, Daerah sebagai bagian integral secara nasional, dimana pola perencanaannya berada pada satu yurisdiksi yang merupakan bagian dari perencanaan secara nasional (*bottom up*/pendekatan daerah) dan seterusnya.

Ketiga, yaitu perencanaan pembangunan daerah sebagai instrumen alokasi sumberdaya pembangunan mencegah terjadinya kesenjangan antar daerah (*top down*/kewilayahan).

Terkait dengan pendapat Heaphy (1971), patut dipahami dalam

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) diuraikan bahwa pembangunan yang dilakukan di Indonesia merupakan usaha untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara terus menerus, berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global.

Mengacu pada pemikiran yang demikian, maka pembangunan daerah (telah disepakati) sebagai kesatuan dari semua kegiatan pembangunan, baik yang dibiayai pemerintah pusat, daerah, swasta, maupun swadaya masyarakat. Upaya pembangunan tersebut tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menggalang persatuan dan kesatuan bangsa dan negara, yang berarti pembangunan itu sendiri tetap mengacu pada nilai-nilai negara kesatuan dengan tetap memberi ruang tumbuh kembangnya demokrasi di semua segi kehidupan bernegara. Hal ini mengacu pada azas "pemerataan" pembangunan daerah, yaitu agar rakyat Indonesia memiliki kemampuan, kesempatan dan kebebasan dalam hal memenuhi keperluan pokok; sandang, pangan, dan papan yang layak; memiliki kesempatan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang layak; memperoleh kesempatan kerja dengan pendapatan yang cukup; berusaha di semua bidang didasarkan pada kemampuan; berperan dalam pembangunan daerah, sektor, dan nasional sesuai dengan kemampuan.

Pemerataan dalam berbagai esensi kehidupan yang demikian menandakan bahwa

pembangunan daerah memberi ruang bagi rakyat Indonesia memperoleh keadilan dan kebebasan sesuai dengan hak azasi manusia; dapat mengembangkan diri sesuai dengan kemampuan pribadinya dimana semua itu dapat dirasakan manfaatnya melalui penyelenggaraan pelayanan publik yang baik, yang dikelola secara baik.

Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Publik

Terdapat sejumlah definisi pelayanan publik. Lonsdale dan Eyendi (dalam The World Bank, 2000) misalnya, mengartikan *service* sebagai:

Assisting or benefiting individual through making usefull things available to them. Sedangkan public service diberi makna sebagai: some thing made available to the whole of population, and it involves thing wich people can not formally provide for them selves i.e. people must act collectively.

Humphreys (1998) menyatakan, pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai pelayanan yang utama atau lengkap yang dibiayai dari pajak. Pelayanan tersebut sudah barang tentu untuk memberi kemudahan bagi masyarakat memenuhi kebutuhannya.

Moenir (2006) menyatakan, pelayanan publik adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang dan atau kelompok orang atau instansi tertentu untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan tertentu. Pemberian pelayanan, fasilitas dan berbagai hal yang memudahkan masyarakat mencapai tujuannya sudah menjadi kewajiban pemerintah. Sejalan dengan Moenir, bahwa fungsi utama pemerintah adalah memberi pelayanan kepada masyarakat, berupa penyediaan barang/jasa umum, sehingga memudahkan masyarakat untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Salusu, 1996).

Dari sisi konsititusi dan politik, pelayanan publik merupakan salah satu tujuan utama dibentuknya negara, yaitu bagaimana mewujudkan kebahagiaan bagi masyarakatnya. Dalam konteks Indonesia, tujuan dari dibentuknya pemerintahan negara sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945 di antaranya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pelayanan publik merupakan konkritisasi dari pelaksanaan tugas negara memberikan pelayanan kepada warga negara (Sirajuddin, 2006).

Dari tinjauan literatur yang demikian itu, maka pelayanan publik dapat dipahami sebagai sesuatu yang menyangkut kepentingan umum yang harus dipenuhi dalam bentuk penyediaan barang/jasa umum dan adalah tugas dan kewajiban pemerintah.

Terdapat empat jenis/sifat barang layanan menurut Savas: *Private goods* (dinikmati sendiri, *rivalrous* dan *excludable*); *Tollgoods* (dinikmati bersama, *unrivalrous* dan *excludable*); *Collectivegoods* (dinikmati secara kolektif, *rivalrous* dan *unexcludable*); *Commonpollgoods* (dinikmati bersama secara kolektif tanpa bayar, *unrivalrous* dan *unexcludable*) (Partowidagdo, 2004).

Kiranya perlu ditekankan bahwa pelaksanaan pelayanan publik berkaitan erat dengan moral dan etika, dalam hal ini, moral dan etika aparatur yang bersifat peka dan tanggap, jujur dan bertanggungjawab, memiliki loyalitas dan dedikasi selaku penyelenggara birokrasi publik.

Raining (dalam Humphreys, 1988) mengatakan " *the public bureaucracy stand in need of ethical sensittivity in order to serve the public interest,*" yaitu birokrasi publik perlu memiliki kepekaan etika untuk bisa melayani publik dengan baik. Untuk itu, semangat kerja

birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik harus menjadi pedoman kerjanya dengan menggunakan etika semacam *sense of services*.

Kesalahan dalam pelayanan seperti patis (*apathy*), menolak berurusan (*brush off*), dingin (*coldness*), memandang rendah (*condescension*), bekerja secara mekanis (*robotisme*), ketat pada prosedur (*role book*) dan pimpong (*round a round*) tidak dijumpai dalam organisasi pelayanan publik. Semangat, motivasi dan *sense of service* aparat penting artinya untuk menghindarkan aparatur melakukan tindakan maladministrasi dalam pelaksanaan pelayanan.

Berbarengan dengan semua itu, dan agar supaya pemanfaatan semua potensi yang ada sesuai dengan keragaman daerah dapat dimaksimalkan sesuai dengan kewenangan yang diberikan pusat, baik secara desentralisasi, dekonsentrasi, maupun dalam rangka perbantuan kepada daerah, maka diperlukan birokrasi dan *leadership* yang *adaptive*.

Birokrasi, sebagaimana dikemukakan Riggs (1996), adalah sebuah organisasi yang konkret, hirarkis dan integritas, bertindak formal sebagai *agent of entity*.

Birokrasi sebagai organisasi sudah barang tentu membutuhkan *leader* untuk menggerakkannya dalam rangka mencapai tujuan yang ada. Riggs (1996) mengemukakan, tujuan birokrasi ditetapkan oleh kekuasaan yang ada di luar birokrasi itu sendiri. Mengingat *accountability* birokrasi sangat esensial, sehingga sekali lagi dibutuhkan *leader* yang juga telah ditetapkan melalui mekanisme politik yang ada di luar birokrasi itu sendiri.

Tantangan birokrasi, berupa diferensiasi struktural oleh *role of specialization* dan *performance teamwork* dalam mencapai tujuan nampak sangat sederhana secara sepintas, namun sangat kompleks, karena di dalam birokrasi itu ada "man" yang juga memiliki permasalahan tersendiri, yang juga kompleks. Riggs (1957) menamakan permasalahan ini sebagai hambatan proses, struktur dan prosedur pada birokrasi, karena di dalamnya terdapat distorsi, nepotisme dan partikularistik.

Mengingat bahwa peranan birokrasi dalam pembangunan tidak mungkin digantikan sepenuhnya pihak swasta (Mathur, 1986), maka hambatan birokrasi, dalam bentuk proses dan orientasi (Saxena, 1986) memerlukan peran kepemimpinan atau leader. Di samping itu, kepemimpinan juga dibutuhkan dalam mencermati *dualism system*, yaitu sistem administrasi tradisional (*ritualisme administratif*) dengan sistem administrasi modern (rasionalisme administratif).

Kepemimpinan akan dapat menguarai kelemahan birokrasi yang menurut Esman (1995) peningkatan daya tanggap (*responsiveness*); efisiensi sumberdaya dan efektivitas pelayanan.

Prilaku buruk birokrasi menurut Prasajo (2006) adalah terjadinya transisi dalam perilaku dan motivasi; adanya pergeseran perhatian dari kepentingan masyarakat kepada produktivitas dan efisiensi serta lebih responsif terhadap konsumen yang mampu membayar, dan lebih apatis terhadap kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah.

Selain itu, patut dikemukakan kinerja lembaga pelayanan publik (birokrasi) di daerah dipengaruhi oleh faktor kemampuan lembaga dalam mengenali dan merespon berbagai tuntutan yang berasal dan perubahan yang terjadi dalam lingkungannya. Oleh karena itu, untuk memperoleh kinerja yang baik, lembaga pelayanan publik harus memiliki kemampuan dalam melakukan penyesuaian dengan lingkungannya dan melakukan rekayasa terhadap

lingkungan tersebut.

Terkait dengan kemampuan yang diharapkan tersebut, pendekatan dalam manajemen pelayanan publik yang dikembangkan oleh lembaga pelayanan publik di daerah tentu saja berbeda dengan pendekatan "tradisional" yang cenderung kaku dan kurang sensitif terhadap perubahan, apalagi perubahan yang cepat.

Pendekatan dalam manajemen pelayanan yang cocok untuk lingkungan yang senantiasa berubah adalah pendekatan yang dinamis dan luwes terhadap dinamika lingkungan dan hal ini diperankan oleh seorang *leader* yang mampu mengembangkan kepemimpinan *adaptive*.

Kepemimpinan Adaptive Ciri Kepemimpinan Publik

James Mac Gregor Burns (1978) mendefinisikan *Leadership is one of the most observed and least understood phenomena on earth.*

Ron Heifetz's mengemukakan, "gagasan yang berlaku bahwa kepemimpinan terdiri atas kepemilikan visi dan membuat barisan dengan visi tersebut adalah pailit "sudah betakhir" karena hal tersebut terus memperlakukan situasi adaptif seolah-olah hal teknis: figur yang berwenang seharusnya dapat membayangkan atau memahami di mana persekutuan atau organisasi beroperasi dan orang-orang harus mengikuti.

Kepemimpinan dibatasi menjadi kombinasi dari tahu segalanya dan keahlian memasarkan, atau secara singkat kepemimpinan adalah:

The prevailing notion that leadership consists of having a vision and aligning people with that vision is bankrupt because it continues to treat adaptive situations as if they were technical: the authority figure is supposed to divine where the company is going, and people are supposed to follow. Leadership is reduced to a combination of grand knowing and salesmanship.

Apa itu *leadership adaptive*? Menurut Heifetz, *leadership adaptive* memiliki kriteria tersendiri sebagai kunci yang membedakan dengan pemahaman *leadership* yang dikembangkan selama ini (*key distinctions*). Kepemimpinan *adaptive* atau *leadership adaptive* dewasa ini dikembangkan sebagai bagian dari pembelajaran (*product of teaching*).

Heifetz (1994) menyatakan, *leadership adaptive* diperuntukan bagi perwujudan dan peningkatan nilai publik; memobilisasi masyarakat untuk menghadapi masalah dan mengambil keputusan mereka yang sulit, sehingga mereka mempelajari cara baru menjadi manusia. Sementara itu mobilisasi menyiratkan pada motivasi, mengatur, mengorientasikan, dan memfokuskan perhatian.

Key distinctions leadership adaptive meliputi :

1. Developed from and for the public sector (dikembangkan untuk *sektor publik*)
2. Provides a strategy (diterapkan dengan strategi tersendiri),
3. Breaks away from "heroic leadership" (dalam hal keberhasilan tidak menekankan pada satu individu sebagai penentu)

Dalam hal ini, ada kekhususan Leadership Adaptive bagi sektor publik, sehingga implementasinya pada manajemen pelayanan publik merupakan satu hal yang memiliki

relevansi yang kuat, terutama apabila gaya kepemimpinan itu diselaraskan dengan paradigma dan manajemen pembangunan berbasis masyarakat atau berpusat pada manusia yang pada intinya menekankan aspek pemberdayaan .

Tantangan kepemimpinan publik (The Public Leadership Challenge) menurut Brookes and Grint, 2010, setidaknya meliputi beberapa hal :

1. Collective

Penentuan keputusan tidak berorientasi pada satu person/ individu , melainkan terletak pada masing masing anggota. Berkait dengan hal itu, maka aspek partisipasi , tanggung jawab dan pemberian kesempatan atau pemberdayaan sektor publik menjadi sangat strategis.

2. Contextual conditions

Leadership adaptive selalu berkembang sesuai justifikasi kondisi setempat secara kontekstual:

3. Organizational

Kelembagaan yang dinamis dan berkembang secara signifikan dengan lingkungannya (environment).

4. Individual

Diperlukan kemampuan individu yang memahami secara persis kriteria kepemimpinan yang adaptive.

5. Community

Dibutuhkan masyarakat yang memiliki kesadaran kolektif yang dapat membaaur dalam satu *entity* yang sadar dan bertanggungjawab secara sosial.

6. Political

Tantangan politik merupakan satu hal yang patut diperhitungkan, mengingat paradigm pembangunan dan tanggungjawab publik (*public accountability*) senantiasa terkait dengan hal-hal yang bersifat politis.

7. Type and scale of problem

Problem tidak kontans dan terbatas, melainkan berubah ubah sesuai dinamika masyarakat.

8. Performance and public value

Bukan mustahil bahwa kinerja yang dihasilkan senantiasa memenuhi aspek atau nilai publik yang dianut.

Pejabat Publik Berpikir Publik

Kata *public* dalam konteks pelayanan publik, dimak sudkan seba gai pembeda dari individu atau masalah yang tidak terkait dengan publik. Publik dalam konteks ini dapat dikonotasikan sebagai pelayanan publik atau publik yang berarti "*pubes*" (Yunani) yang

berarti kedewasaan, baik secara fisik, emosi onal, maupun intelektual di mana orang dewasa dikategori mempunyai kemampuan bertindak secara publik (Kartasasmita, 2006).

Kemampuan bertindak secara publik adalah mencakup tindakan yang senantiasa diintegrasikan dengan berbagai kepentingan dan bersifat obyektif. Selanjutnya, penggunaan kata publik dapat berkonotasi 'kedewasaan' dan 'permintaan' yang bertenden si kecerdasan, rasional, obyektif serta merupakan permintaan yang perlu segera dipenuhi, mengingat hal itu berkaitan dengan kepentingan publik. Dalam konteks kepentingan publik, publik berarti umum, yaitu *common* (Yunani = *coinon*), yaitu *the community in general* (Kartasasmita, 2006).

Khant, dalam *Metafisika Kesusilaan* (1797) mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan legalitas dan moralitas. Menurutnya, terdapat diskursus intersubjektif antara moral dengan hukum. Moral adalah imperatif batin, dan hukum adalah norma lahiriyah. Moral adalah kapasitas individu menentukan diri sendiri - melalui tindakan pribadi- sedang efektifitas hukum melalui kekuasaan institusi atau badan otoritatif berwenang.

Di sinilah momentum yang menentukan, apakah manusia mampu menjaga nilai moral yang diyakini, yang dengan demikian timbul diskursus saling menjaga antara moral dan hukum secara efektif. Sejalan dengan hal itu, maka seorang individu dalam konteks pejabat publik, haruslah dapat bertindak sebagai *publicable* dan berpikir publik (*public thinking*). Pejabat publik sangat tidak etis berada pada skala ketegangan yang tinggi untuk hal-hal yang tidak bersifat publik. Dalam hal ini kepublikan dibutuhkan dalam ranah politik praktis dan dari situ dapat terbaca -apakah seorang pejabat publik berpikir publik dan bertindak publik, karena kepublikan setidaknya merupakan ide atau cara berpikir implementatif. Sedangkan implementasi cara berpikir diwujudkan pada apa yang dikerjakan yang bertendensi sebagai kebijakan publik, yang hanya bisa ditempuh pejabat publik. Kebijakan itu seterusnya akan menerangkan peran "kepemimpinan publik" yang dilansir Brookes and Grint (2010).

Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (1795) menjelaskan, idealnya setiap individu dapat bertindak berdasarkan maksimumnya (keyakinan moral/maksimum bernilai universal). Implementasi cara bertindak berdasarkan maksimum, antara lain dapat diamati melalui perlakuan terhadap sesama, hormat terhadap person dalam artian memahami dan memberi hak-haknya (*equity*) serta memberi penghargaan sebagai person yang juga memiliki hak-hak kepublikan (*recognition*).

Dalam konteks ini, setiap individu akan memperlakukan diri mereka secara adil dan menerapkan hal yang sama pada person atau individu lain. Artinya dari situ diharapkan muncul perilaku tidak memperlakukan person sebagai sarana, mengambil dan melucuti hak-hak mereka, mengingat setiap individu memiliki hak otonom untuk berkehendak (*autonomie des willens*) sebagai sumber universalitas, dan inilah yang disebut *Zur* sebagai "kepublikan dari heteronomi.

Legalitas dan moralitas, *Khant* dalam *Metafisika* berpendapat. bahwa legalitas adalah kesesuaian sesuatu dengan hukum atau norma, sementara itu Moralitas adalah kesesuaian sikap dan perbuatan dengan imperatif batin. Mentaaati hukum lahiriyah sebagai kewajiban (yuridis- hukum lahiriyah, etis - tindakan yang disadari sebagai kewajiban).

Hana Arent, dalam *The Public and the Private Reim*, Penguin Books (2000) mengemukakan, distingsi organisasi politik (polis) dengan organisasi keluarga (natural-alamiah). Menurutnya dalam hidup privat ada hidup lain, yang disebut *hidup politis*. Dengan

demikian, setiap individu mempunyai dua macam eksistensi, yaitu **milik** pribadi (*idion*) dan milik publik (*koinon*).

Werner Jaenger dalam *The Idealsof Greek Culture, Oxpord University Press (1933)*, mengatakan, di Yunani (Athena), seorang individu tidak bisa eksis tanpa kolektivitas di mana dia hidup. Sebagai filsuf abad 20, dia menyebutkan antara negara (polis) dengan rakyat (privat) ada istilah tengah yang menjembatani dan disebut *ruang rublik*. Ruang publik bersifat universal dan ruang privat bersifat partikular. Semakin terbuka kesadaran terhadap hak hak publik, semakin meningjat derajat kepublikan masyarakat, dan hal ini kemudian disebut sebagai *akuntabilitas publik*.

Kepemimpinan dan akuntabilitas publik walaupun para ahli sepakat pentingnya akuntabilitas dalam organisasi publik, mereka mendefinisikan akuntabilitas secara berbeda.

Minocha (1983) dan McCallum (1984) mendefinisikan akuntabilitas sebagai kewajiban hukum untuk memberi jawaban atau mempertanggung jawabkan tindakan seorang pejabat publik, khususnya dalam kaitannya dengan keuangan.

Pendapat lain menganggap definisi dan pendekatan hukurn ini kurang memadai. Mereka mengadopsi definisi akuntabilitas yang lebih kompleks sebagai metode atau cara di mana pegawai atau lembaga pemerintah memenuhi tugas dan tanggung jawabnya dan proses di mana pegawai atau lembaga pemerintah siap menerima sanksi atau hukuman jika terjadi kelalaian (Dwivedi dan Jabbra :1989).

Mukhopadhyay (1983) berpendapat, akuntabilitas merupakan bagian penting dari tindakan (kebijakan/pelayanan) suatu instansi pada sektor publik. Semakin besar akuntabilitasnya, semakin baik pula pelayanannya karena akuntabilitas berkontribusi pada penciptaan efisiensi pada sumber daya dan merupakan pencegahan instansi dan para pegawainya dari *non-feasance*, *malfeasance* dan *over-feasance* (Mukhopadhyay, 1983).

Oleh karena itu, konsep akuntabilitas pada sektor publik harus didefinisikan secara lebih komprehensif, yaitu sebagai metode di mana instansi pemerintah atau pelayan publik memenuhi tugas pokok dan fungsinya dan proses di mana instansi pemerintah atau pelayan publik bersedia menerima sanksi atas tindakannya (Dwivedi dan Jabbra, 1989).

Akuntabilitas publik, dalam ranah pemikiran yang berkembang tidak lebih dari cara pandang, atau bahkan sesuatu yang tak terpikirkan sebelumnya. Segala sesuatu dilakukan sesuai koridor, regulasi, mekanisme yang merupakan daya tanggap, respon terhadap tantangan. Dari sini sehingga terkadang dibedakan antara tanggungjawab dan akuntabilitas. Akuntabilitas tidak akan terwujud tanpa tanggungjawab. Akuntabilitas menjadi faktor keluar atau eksternal, sementara tanggungjawab merupakan faktor ke dalam atau internal. Tidak akan pernah ada birokrasi yang dapat akuntabel tanpa membangun tanggungjawab di kalangan mereka terhadap tanggungjawab dan pekerjaan mereka.

Jika kita menggali lebih dalam, bagaimana tanggungjawab diciptakan, dimulai dari penerapan kerangka pikir moralitas, penetapan mekanisme, regulasi, *reward and phunnism*, pemeliharaan disiplin, pengendalian dan terakhir *kepemimpinan*.

* * *

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DARI EDITOR	vii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABLE	xvi
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum	4
BAB II	13
PRODUK-PRODUK HUKUM	13
A. Peraturan Daerah	13
B. Peraturan Walikota	21
BAB III	47
KEBIJAKAN, STRATEGI DAN DUKUNGAN APBD	47
A. Kebijakan Umum dan Khusus.	47
B. Pengembangan Tata Ruang dan Lingkungan.	51
C. Penguatan Struktur Ekonomi.	53
D. Desentralisasi Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bebas Korupsi.	54
E. Penegakan Hukum dan Hak Azasi Manusia.	55
F. Strategi Penerapan Setiap Kebijakan.	56
BAB IV	65
PELAKSANAAN OPERASIONAL PROGRAM	65
A. Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	65
B. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Bidang Pendidikan	65
D. Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	69
E. Program Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Baik (<i>Good Governance</i>)	71
B. Berdasarkan Capaian Bidang Kewenangan	88
A. Menyabet Sejumlah Prestasi	116
C. Rekor MURI	123
D. Keberhasilan	133
BAB VII	144
P E N U T U P	144
DAFTAR PUSTAKA	145
RIWAYAT HIDUP EDITOR	147

DAFTAR TABLE

Table 1-Luas Wilayah Menurut Kecamatan Di Kota Makassar.....	6
Table 2-Jumlah Kelurahan, Rw Dan Rt Menurut Kecamatan Di Kota Makassar.....	7
Table 3-Grafik Jumlah Penduduk Kota Makassar Tahun 2007 s.d 2010.....	7
Table 4-Penduduk Kota Makassar Dari Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin.....	8
Table 5-Penduduk Kota Makassar Dari Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin.....	9
Table 6-Kondisi Sektor Lapangan Kerja Di Kota Makassar.....	10
Table 7-Jumlah Pegawai Dan Unit Kerja Di Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Kota Makassar.....	11
Table 8-Daftar Peraturan Daerah yang disahkan Tahun 2004–2008.....	13
Table 9-Daftar Peraturan Daerah yang disahkan Tahun 2009-sekarang.....	19
Table 10-Daftar Peraturan WaliKota yang disahkan Tahun 2004–2008.....	21
Table 11-Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2005 S/D Tahun Anggaran 2010.....	59
Table 12-Penerimaan Dana Perimbangan Pemerintah Kota Makassar.....	60
Table 13-Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Pemerintah Kota Makassar.....	60
Table 14-Belanja Daerah Pemerintah Kota Makassar.....	62
Table 15-Belanja Daerah Menurut Skpd.....	63
Table 16-Komposisi Pembiayaan Pemerintah Kota Makassar.....	64
Table 17-Kemampuan Baca Dan Tulis Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas.....	67
Table 18-Jumlah Sekolah Pelaksana Pendidikan Gratis Dan Sekolah Bersubsidi Penuh.....	73
Table 19-Alokasi Dana Kesehatan Gratis Di Kota Makassar Tahun 2010.....	74
Table 20-Hasil Pelaksanaan Kunjungan Rawat Inap.....	74
Table 21-Hasil Pelaksanaan Kunjungan Rawat Jalan.....	74
Table 22-Data Pelayanan Angkutan Mobil Jenazah/Ambulance Gratis 2010.....	75
Table 23-Data Pelayanan Angkutan Mobil Jenazah / Ambulance Gratis 2011.....	75
Table 24-Alokasi Anggaran Program Makassar Bebas.....	80
Table 25-Jadwal Singgah Kapal Pesiar Di Makassar Oktober 2009 S/D Awal Tahun 2011... ..	84
Table 26-Pengembangan Event- Event Strategis Visit Makassar 2011 And Beyond 2014....	85
Table 27-Indikator Kinerja Pada Peningkatan Kualitas Pendidikan.....	88
Table 28-Pencapaian Kinerja Pada Program Utama.....	89
Table 29-Jumlah Pmks, Keluarga Miskin Dan Keluarga Tak Layak Huni.....	90
Table 30-Program Pembinaan Pemuda Dan Olahraga.....	91
Table 31-Indikator Kesejahteraan Keluarga Dan Kesetaraan Gender.....	92
Table 32-Indikator Penataan Ruang.....	93
Table 33-Indikator Peningkatan Infrastruktur.....	94
Table 34-Indikator Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	95
Table 35-Indikator Pengembangan Komoditas Unggulan.....	97
Table 36-Indikator Ketahanan Ekonomi.....	100
Table 37-Pertumbuhan Investasi (Pma) Kota Makassar.....	104
Table 38-Indikator Peningkatan Kerja Dan Berusaha.....	105
Table 39-Indikator Peningkatan Kapasitas Kelembagaan.....	107
Table 40-Indikator Peningkatan Profesionalisme Aparatur.....	108
Table 41-Indikator Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	108
Table 42-Indikator Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.....	110
Table 43-Indikator Peningkatan Kualitas Materi Dan Penyebaran Informasi.....	111

Table 44-Indikator Pembinaan Kehidupan Politik Yang Demokratis.....	112
Table 45-Indikator Penegakan Hukum Dan Ham	113
Table 46-Indikator Legilasi Daerah.....	113
Table 47-Realisasi Pendapatan Daerah	114
Table 48-Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.....	115
Table 49-Dana Perimbangan	115
Table 50-Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	115

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1- Peta Administratif Kota Makassar	5
Gambar 2- Kebijakan Program Makassar Bebas Lahir Sampai Mati Dalam RPJMD 2009-2014	81
Gambar 3-Pelaksanaan Makassar Green And Clean	83
Gambar 4-Struktur Ekonomi Kota Makassar Tahun 2010.....	87
Gambar 5-PDRB Perkapita Kota Makassar Berdasarkan Harga Berlaku.....	87
Gambar 6-Perbandingan Grafik Persentase Kendaraan Berbahan Bakar Bensin Dan Solar Yang Lulus Pada Uji Emisi Gas Buang Dari Tahun 2006 Hingga Mei 2010	96
Gambar 7-Perbandingan Grafik Persentase Produksi Perikanan Tangkap	98
Gambar 8-Diagram Produksi Padi (Gkg) Tahun 2006-2010 Di Kota Makassar	98
Gambar 9-Jumlah Kasus Penyakit Ternak	98
Gambar 10-Kunjungan Wisatawan	99
Gambar 11-Jumlah Pad Sektor Pariwisata	99
Gambar 12-Perkembangan Izin Usaha	101
Gambar 13-Pertumbuhan Usaha Industri Kecil Dan Industri Menengah (Unit).....	101
Gambar 14-Indikator Pengembangan Investasi Dan Regulasi Usaha	102
Gambar 15-Nilai Investasi Dan Produk Industri Kecil	103
Gambar 16-Nilai Investasi Produksi Industri Menengah	103
Gambar 17-Pertumbuhan Investasi PMA	104
Gambar 18-Pertumbuhan Investasi (PMDN)	105
Gambar 19-Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka	106
Gambar 20-Target Realisasi Pendapatan Asli Daerah	109
Gambar 21-Grafik Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah	109

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era otonomi saat ini, kewenangan yang begitu luas yang diberikan kepada pemerintah daerah tentunya membawa konsekuensi-konsekuensi tertentu bagi pemerintah daerah itu sendiri untuk menjalankan kewenangannya yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini mengisyaratkan kepada daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan bagi masyarakat. Esensi otonomi daerah itu sendiri memberikan tanggung jawab dan kewenangan yang lebih besar kepada para pelayan publik untuk memberikan suatu pelayanan masyarakat yang handal. Ditambah lagi dengan adanya kreativitas, akuntabilitas, inovasi, dan transparansi prosedur administrasi pelayanan sehingga dapat meningkatkan tingkat kepercayaan (trust) dan tingkat kepuasan (satisfy) dari masyarakat.

Kota Makassar memiliki posisi yang sangat strategis, karena terletak di tengah-tengah kepulauan Indonesia, dan secara ekonomis daerah ini memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif, dimana Selat Makassar merupakan salah satu jalur pelayaran internasional. Disamping sebagai titik simpul transportasi laut dan udara, kota Makassar bukan hanya sebagai pusat pelayanan dan pengembangan distribusi jasa dan perdagangan Kawasan Timur Indonesia (KTI) tetapi merupakan ruang keluarga (“Living Room”) yaitu sebagai tempat yang aman tenteram, damai sangat kondusif sebagai tempat tinggal dan berinvestasi serta melakukan berbagai aktivitas.

Disamping memiliki keunggulan tersebut, Kota Makassar dihuni oleh penduduk dari berbagai etnis, budaya, memiliki nilai-nilai luhur yang diangkat dari nilai tradisional dan budaya lokal, dan secara universal dapat dipadukan dengan cara pandang global. Nilai-nilai tersebut berfungsi sebagai rambu-rambu/koridor dalam pelaksanaan semua aktivitas pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Ada empat etnis besar yang mewarnai nilai-nilai luhur tersebut, yaitu etnis Bugis, Makassar, Toraja dan Mandar, disamping etnis-etnis lainnya; Cina, India, Arab dan Melayu.

Untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam mewujudkan pembangunan, seluruh kemampuan dipadukan secara bijak antara potensi sumber daya alam yang strategi dengan potensi sumber daya manusia yang terbekali dengan nilai-nilai luhur. Pengembangan potensi harus direncanakan sebaik mungkin dan dilaksanakan seefektif dan seefisien mungkin melalui aspek yang saling terkait, saling mempengaruhi dan secara keseluruhan dikelola seoptimal mungkin yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bukan hanya itu, Makassar juga di kitari berbagai permasalahan sosial kemasyarakatan yang begitu kompleks, sehingga penanganannya juga harus didasari pada rencana kerja yang matang dengan memperhitungkan berbagai aspek dan sudut pandang.

Tak heran bila dalam memimpin kota Makassar dibutuhkan sosok pemimpin yang cerdas, berwawasan luas, kaya pengalaman, arif dan bijaksana.

Dalam tataran inilah hadir seorang Walikota yang dalam sebuah acara sakral yang dilakukan di depan Benteng Fort Rotherdam Makassar tgl 8 Mei 2004, Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, MM dilantik sebagai Walikota Makassar periode 2004-2008, selanjutnya di atas Mall Karebosi Link tgl 8 Mei 2009 beliau dilantik kembali untuk kali ke-2 sebagai Walikota Makassar. Ir.H. Ilham Arief Sirajuddin, MM yang pada masa suksesi Walikota Periode ke-2, telah berhasil menggaet suara fantastis 67,9 % dari keseluruhan suara pemilih mengalahkan perolehan suara dari 7 (tujuh) kandidat Calon Walikota lainnya. Pemilihan langsung yang digelar kembali mempercayakan Ir.H. Ilham Arief Sirajuddin,MM untuk memimpin kembali Kota ini. Hal ini tidak terlepas dari kesuksesan yang ditunjukkan selama periode pertama kepemimpinannya , dimana banyak sekali prestasi yang berhasil ditorehkan, sehingga membuat masyarakat Kota Makassar semakin mencintai dan menaruh harapan besar untuk kemajuan Kota Makassar kedepan. Apa saja prestasi tersebut secara detail akan kami ulas lebih lanjut dalam bentuk laporan keberhasilan kepemimpinan Ir.H. Ilham Arief Sirajuddin,MM mulai dari periode pertama sampai dengan periode ke-dua.

Rumusan Visi Makassar 2014 sebagai bagian dari pencapaian visi jangka panjang sebagaimana yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005 – 2025, yakni ”Makassar sebagai kota Maritim, Niaga, Pendidikan, Budaya dan Jasa yang Berorientasi Global, Berwawasan Lingkungan dan Paling Bersahabat” adalah bagian tidak terpisahkan / kelanjutan dari Visi Pemerintah Kota Makassar 2009 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 14 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Pemerintah Kota Makassar Tahun 2004-2009 yang disempurnakan dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2005-2010 yakni ”Makassar Kota Maritim, Niaga dan Pendidikan yang Bermartabat dan Manusiawi” sehingga untuk menjamin konsistensi pembangunan jangka menengah dan jangka panjang dan agar dapat dipelihara kesinambungan arah pembangunan daerah dari waktu ke waktu, maka disusun Visi 2014 :

”Makassar Menuju Kota Dunia Berlandas Kearifan Lokal”.

Visi ini terinspirasi dari dua hal mendasar:

Pertama, yakni jiwa dan semangat untuk memacu perkembangan Makassar agar lebih maju, terkemuka dan dapat menjadi kota yang diperhitungkan dalam pergaulan regional, nasional dan global. Kedua, yakni jiwa dan semangat untuk tetap memelihara kekayaan kultural dan kejayaan Makassar yang telah dibangun sebelumnya, ditandai dengan keterbukaan untuk menerima perubahan dan perkembangan, sembari tidak meninggalkan nilai-nilai yang menjadi warisan sejarah masa lalu.

Pembangunan berkarakter yaitu pembangunan mesti bisa dipahami, memiliki bahasa publik, dapat dibaca, dapat dilakukan dan adalah sesuatu yang berbeda antara satu dengan yang ada pada umumnya yang sekaligus menggambarkan pelaku pembangunan itu sendiri, watak, prilaku individu yang merancang dan menangani pembangunan itu.

Kriteria pembangunan berkarakter yaitu Perlakuan pembangunan sesuai kebutuhan, mengakselerasi potensi local, fokus dan menyelesaikan masalah, integratif dan bersifat holistik, memiliki nilai pragmatis dan filosofis.

Penjabaran dari visi tersebut, dilakukan melalui 5 (lima) misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan warga kota yang sehat, cerdas, produktif, berdaya saing dan bermartabat;
2. Mewujudkan ruang kota yang ramah lingkungan;
3. Mewujudkan peran strategis Makassar dalam perekonomian domestik dan internasional;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas;
5. Mewujudkan kehidupan warga kota yang harmonis , dinamis , demokratis dan taat hukum.

Ir.H. Ilham Arief Sirajuddin,MM adalah sosok yang cerdas, energik dan penuh inovasi, pemimpin semua ras termasuk dekat dengan warga non pribumi (warga Tionghoa) gerbang persaudaraan Indonesia- Tionghoa melambangkan simbol kedekatan itu, ia merakyat dengan semua etnis, dari dulu dekat dengan Masjid, rajin menyumbang rumah ibadah, mencanangkan gerakan Makassar gemar membaca, ia langsung mengecek saluran got warganya, menyediakan Ambulance gratis bagi warga tidak mampu, sejak tahun 2006 telah merintis sekolah bersubsidi penuh. Terkhusus untuk penanggulangan kemiskinan telah mengeluarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Makassar, itulah sederet kepiawaian IAS panggilan akrab yang dikenal oleh warganya selaku Walikota Makassar.

Rangkuman dari visi Walikota Makassar yang memuat uraian tentang potensi yang dianalisis secara bersamaan dengan permasalahan Kota Makassar yang melahirkan daftar kebutuhan yang bersifat prioritas dan non prioritas yang terkristalisasi pada visi pemerintah Kota Makassar yang menjadi pangkal tolak Renstra Tahun 2004-2009.

Berkait dengan dokumen perencanaan tersebut, Walikota Makassar telah mengaktualisasikan berupa keberhasilan antara lain :

- mendapat penghargaan dari Menteri Keuangan RI atas kinerja pengelolaan Keuangan Daerah “ Penetapan APBD tepat waktu (2007-2011), Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, opini WDP BPK atas laporan keuangan.
- untuk peningkatan kualitas pelayanan publik” Pelayanan administrasi perizinan yang telah menerapkan One Stop Service (OSS) dan pendelegasian kewenangan penandatanganan izin-izin; Pelayanan dasar yang bersubsidi penuh di sekolah dan puskesmas; Pelayanan Gratis Kartu Penduduk,Kartu Keluarga,akta kelahiran dan akta kematian; Pelayanan gratis terhadap pemakaman dan pengabuan mayat; Pelayanan gratis angkutan anak sekolah dan bantuan hukum gratis bagi masyarakat yang kurang mampu; Berdasarkan penelitian Doing Business Indonesia 2010 oleh International Finance Cooperation (IFC), Worl Bank Ciroup, Kota Makassar mendapatkan penilaian” Peringkat 9 Kategori kemudahan mendirikan usaha, Peringkat 2 Kategori kemudahan izin mendirikan bangunan, Peringkat 10 kategori kemudahan mendapatkan properti.
- Program Peningkatan Professional Aparatur antara lain : : Mencegah konflik kepentingan (conflict of interest); Penanda tanganan Pakta Integritas/Kontrak Kerja antara Walikota dengan Pejabat Pemangku Eselon secara berjenjang (Penetapan Target Kinerja kerjasama Pemerintah Kota Makassar dengan BPKP Perwakilan Sul Sel); Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai/Laporan Harta

Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN); Penyusunan standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operating Prosedure(SOP) terhadap beberapa jenis layanan sebagai pegangan penyelenggara layanan aparatur; Produk atau jasa yang dihasilkan oleh Instansi Pemerintah memenuhi ketentuan kualitas harapan masyarakat (Quality Assurance); Audit terhadap administrasi/keuangan dan kegiatan pelayanan publik” Inspektorat Daerah sebagai pengendali internal manajemen memberikan sistem peringatan dini (Early Warning System) dan penjamin kualitas (Quality Assurance); Meningkatkan peran internal auditor dari Wachdog (Pemantau) menjadi Katalisator (Penyeimbang) dan Partner bagi penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

- Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan “ Standarisasi dan sertifikasi pelayanan (ISO DLL)”, 4 unit pelayanan telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001 (Dinas Tata Ruang dan Bangunan, Dinas Perindag dan Penanaman Modal, Puskesmas Bara-Baraya, Puskesmas Jongaya dan SMK Negeri 5); 3 Unit Puskesmas dan Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan mendapat ISO 9001;
- Desentralisasi Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik & bebas korupsi sebagai tindak lanjut pelaksanaan Inpres No.5 Tahun 2004, tentang percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- MOU antara Kementerian PAN dan KPK tgl 9 Juli 2007 tentang “ Program Kerjasama Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”
- MOU antara Pemerintah Kota Makassar dengan Transparency International Indonesia (TII), tgl 28 Desember 2007 tentang penerapan Pakta Integritas dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin,MM telah berbuat banyak dan akan terus berbuat untuk kemajuan kotanya, meskipun terkadang menimbulkan pro kontra, tetapi semboyan tua leluhurnya “ Sekali Layar Terkembang Pantang Biduk Surut Kepantai” yang dimaknakan bahwa sekali menggagas sesuatu yang diyakininya akan mendatangkan kebajikan, tidaklah bergeming meskipun menuai banyak protes. Dia sangat yakin, bahwa protes membuatnya semakin bersemangat membuktikan kebenaran ide-idenya, dan masyarakat memang memiliki hak untuk memperoleh informasi yang utuh akan program-program pemerintah. Keyakinan ini membuatnya semakin bergairah membangun kotanya, meskipun kesimpulan keberhasilannya terpulang kepada semua yang mengambil peran sebagai penilai, lalu bagaimana dengan kita, bukankah kita adalah bagian dari penikmat buah-buah karyanya, meskipun kita juga sebelumnya yang membidiknya dengan hujatan kesangsian. Pada akhirnya, mari kita memberinya semangat, memberinya kepercayaan yang lebih besar dan lebih luas cakupannya, karena memang ia pantas untuk itu.

B. Gambaran Umum

Kota Makassar memiliki posisi yang sangat strategis karena terletak di tengah-tengah kepulauan Indonesia, dan secara ekonomis daerah ini memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif, dimana Selat Makassar merupakan salah satu jalur pelayaran internasional. Disamping sebagai titik simpul transportasi laut dan udara, kota Makassar bukan hanya sebagai pusat pelayanan dan pengembangan distribusi jasa dan perdagangan Kawasan Timur Indonesia (KTI) tetapi merupakan ruang keluarga (“Living Room”) yaitu sebagai tempat

yang aman tenteram,damai sangat kondusif sebagai tempat tinggal dan berinvestasi serta melakukan berbagai aktivitas.

Disamping memiliki keunggulan tersebut, Kota Makassar dihuni oleh penduduk dari berbagai etnis, budaya ,memiliki nilai-nilai luhur yang diangkat dari nilai tradisional dan budaya lokal, dan secara universal dapat dipadukan dengan cara pandang global. Nilai-nilai tersebut berfungsi sebagai rambu-rambu/koridor dalam pelaksanaan semua aktivitas pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Ada empat etnis besar yang mewarnai nilai-nilai luhur tersebut, yaitu etnis Bugis, Makassar, Toraja dan Mandar, disamping etnis-etnis lainnya; Cina, India,Arab dan Melayu.

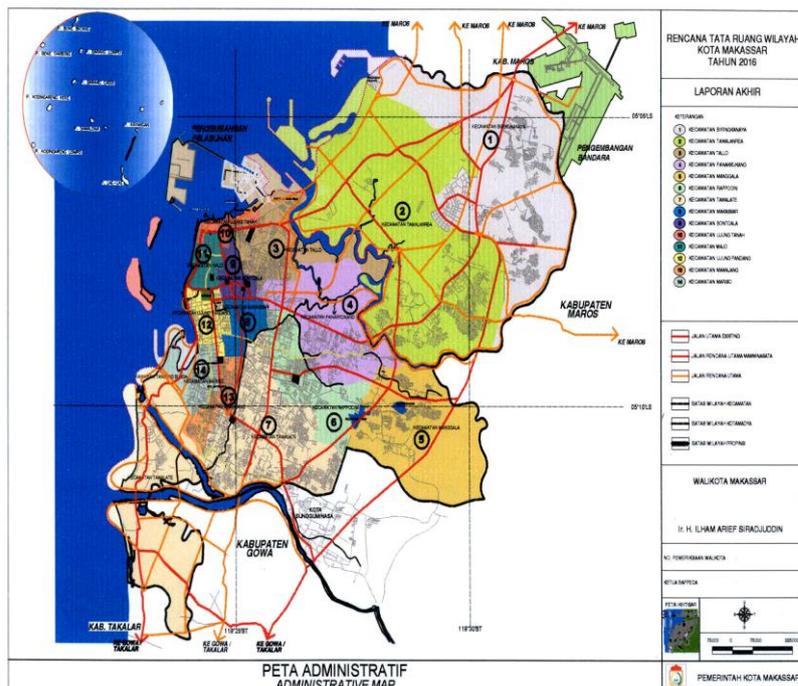
Untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam mewujudkan pembangunan, seluruh kemampuan dipadukan secara bijak antara potensi sumber daya alam yang strategi dengan potensi sumber daya manusia yang terbekali dengan nilai-nilai luhur. pengembangan potensi harus direncanakan sebaik mungkin dan dilaksanakan seefektif dan seefisien mungkin melalui aspek yang saling terkait, saling mempengaruhi dan secara keseluruhan dikelola seoptimal mungkin yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2.1 Kondisi Geografis

Kota Makassar terletak antara 119°24'17'38'' Bujur Timur dan 5°8'6'19'' Lintang Selatan, berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kabupaten Maros;
- Sebelah Timur : Kabupaten Maros;
- Sebelah Selatan : Kabupaten Gowa;
- Sebelah Barat : Selat Makassar.

Gambar 1- Peta Administratif Kota Makassar



Sumber Data: Bappeda Kota Makassar Tahun 2010

Luas Wilayah Kota Makassar adalah 175,77 KM² yang secara administratif Pemerintah Kota Makassar terbagi atas 14 Kecamatan dan 143 Kelurahan, dengan rincian luas masing-masing kecamatan yang diperbandingkan dengan prosentase luas wilayah Kota Makassar sebagai berikut :

Luas Wilayah dan Prosentase terhadap Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Makassar Tahun 2010.

Table 1-Luas Wilayah Menurut Kecamatan Di Kota Makassar

Kode Wil.	Kecamatan	Luas Area(Ha)	Prosentase Terhadap Luas Kota Makassar
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mariso	182.000	1,02
2	Mamajang	542.000	3,07
3	Tamalate	1.997.000	11,34
4	Rappocini	947.000	5,37
5	Makassar	251.000	1,41
6	Ujung Pandang	263.000	1,49
7	Wajo	199.000	1,12
8	Bontoala	209.000	1,17
9	Ujung Tanah	593.000	3,36
10	Tallo	583.000	3,30
11	Panakukang	1.686.000	9,58
12	Manggala	2.433.000	13,83
13	Biringkanaya	4.654.000	26,46
14	Tamalanrea	3.352.000	19,06
	JUMLAH	17.577.000	100,00

Sumber Data: Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar Tahun 2010

Adapun jumlah Kelurahan, RW, dan RT yang dimiliki masing-masing Kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Table 2-Jumlah Kelurahan, Rw Dan Rt Menurut Kecamatan Di Kota Makassar

KODE WIL. Area Code	KECAMATAN Subdistricts	KELURAHAN Ward	RW	RT
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)
010	MARISO	9	47	218
020	MAMAJANG	13	56	283
030	TAMALATE	10	108	530
031	RAPPOCINI	10	104	555
040	MAKASSAR	14	69	369
050	UJUNG PANDANG	10	37	139
060	WAJO	8	45	169
070	BONTOALA	12	56	239
080	UJUNG TANAH	12	50	200
090	TALLO	15	77	463
100	PANAKKUKANG	11	90	468
101	MANGGALA	6	65	350
110	BIRINGKANAYA	7	99	477
111	TAMALANREA	6	67	329
7371	MAKASSAR	143	970	4.789

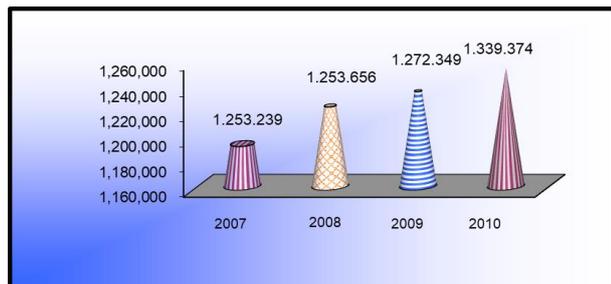
Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kota Makassar Tahun 2010

1.2.2. Kondisi Demografis

Sesuai hasil pendataan Sensus penduduk Tahun 2010 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar, jumlah penduduk Kota Makassar Tahun 2010 tercatat sebanyak 1.339.374 jiwa yang terdiri dari 661.379 laki-laki dan 677.995 perempuan. Laju pertumbuhan penduduk Kota Makassar Tahun 2010 sebesar 1,65 %. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat ditunjukkan dengan rasio jenis kelamin. Rasio jenis kelamin penduduk Kota Makassar yaitu sekitar 92,17 persen, yang berarti setiap 100 penduduk wanita terdapat 92 penduduk laki-laki.

Adapun jumlah penduduk Kota Makassar yang dicatat dalam empat tahun terakhir digambarkan dalam grafik sebagai berikut :

Table 3-Grafik Jumlah Penduduk Kota Makassar Tahun 2007 s.d 2010



Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kota Makassar Tahun 2010

Penduduk Kota Makassar bila dilihat dari kelompok umur dan jenis kelamin, kelompok terbesar adalah usia 20-24 Tahun , yang didominasi oleh kaum perempuan seperti terlihat pada tabel berikut ini.

Table 4-Penduduk Kota Makassar Dari Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
0 - 4	66.461	62.009	128.470
5 - 9	66.096	61.864	127.960
10 - 14	61.244	57.787	119.031
15 - 19	68.302	73.282	141.584
20 - 24	82.580	86.488	169.068
25 - 29	64.916	65.678	130.594
30 - 34	54.031	55.979	110.010
35 - 39	47.835	49.552	97.387
40 - 44	41.573	44.981	86.554
45 - 49	32.906	34.849	67.755
50 - 54	25.517	25.246	50.763
55 - 59	18.404	18.695	37.099
60 - 64	12.877	15.277	28.154
65 keatas	18.637	26.308	44.945
Jumlah	661.379	677.995	1.339.374

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kota Makassar Tahun 2010

Ditinjau dari kepadatan penduduk kecamatan Makassar adalah terpadat yaitu 33.390 jiwa per km persegi, disusul kecamatan Mariso (30.457 jiwa per km persegi), kecamatan Bontoala (29.872 jiwa per km persegi). Sedang Kecamatan Biringkanaya merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah yaitu sekitar 2.709 jiwa per km persegi, kemudian Kecamatan Tamalanrea 2.841 jiwa per km persegi), Manggala (4.163 jiwa per km persegi), Kecamatan Ujung Tanah (8.266 jiwa per km persegi), Kecamatan Panakkukang 8.009 jiwa per km persegi.

1.2.3 Kondisi Sosial Budaya

1.2.3.1 Kondisi Sektor Kesehatan

Pada tahun 2009 di Kota Makassar terdapat 16 Rumah Sakit, yang terdiri dari 7 Rumah Sakit Pemerintah / ABRI, 8 Rumah Sakit Swasta serta 1 Rumah Sakit khusus lainnya.

Keadaan sektor kesehatan, khususnya sarana penunjang layanan kesehatan di Kota Makassar dapat terlihat pada tabel berikut:

Table 5-Penduduk Kota Makassar Dari Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin

No.	Sarana Kesehatan	Pemilikan / Pengelola		
		Pem. Pusat	Pem. Prov.	Pem. Kota
1	2	3	4	5
1.	Rumah Sakit Umum	1	2	1
2.	Rumah Sakit Jiwa		1	
3.	Rumah Sakit Bersalin		2	
4.	Rumah Sakit Khusus Lainnya		1	
5.	Puskesmas			37
6.	Puskesmas Pembantu			47
7.	Puskesmas Keliling			37
8.	Balai Pengobatan	2	2	

Sumber Data: LAN RI Makassar 2010

1.2.3.2 Kondisi Sektor Pendidikan

Kualitas sumberdaya manusia tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) dimana pada Tahun 2009 sebesar 78,20 % dan pada Tahun 2010 telah mencapai 78,59 % yang didorong dengan dengan semakin membaiknya pelaksanaan sistem pendidikan di Kota Makassar. Demikian pula Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Makassar pada Tahun 2009 penduduk usia SD (7-12 Tahun) sebesar 96,89 %, usia SLTP (13-15 Tahun) sebesar 85,62 % dan usia SLTA (16-18 Tahun) sebesar 55,64 %. Dan pada Tahun 2010 angka partisipasi sekolah meningkat dimana penduduk usia SD (7-12 Tahun) sebesar 97,47 %, usia SLTP (13-15 Tahun) sebesar 86,06 % dan usia SLTA (16-18 Tahun) sebesar 57,47 %.

Adapun dari segi infrastruktur yang ada, data tahun 2009/2010 menunjukkan bahwa Kota Makassar memiliki jumlah Sekolah Dasar sebanyak 459 unit dengan jumlah guru sebanyak 6.542 orang dan jumlah murid sebanyak 145.749 orang. Jumlah SLTP sebanyak 171 unit dengan jumlah guru sebanyak 4.630 orang dan jumlah murid sebanyak 59.101 orang. Jumlah SLTA 112 unit dengan jumlah guru sebanyak 4.817 orang dan jumlah murid sebanyak 65.277 orang.

Seiring dengan semakin membaiknya sistem pendidikan di Kota Makassar diakui masih terdapat beberapa kekurangan dan kelemahan yang dihimpun menjadi permasalahan pokok dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan adalah prasarana dan sarana sekolah baik pada jenjang pendidikan dasar maupun menengah. Kondisi fisik gedung sekolah yang ada beberapa yang tidak memadai lagi, ruang belajar relatif kurang dan kekurangan perpustakaan, laboratorium, meubelair dan buku-buku paket pelajaran sekolah. Alat peraga pendidikan juga masih kurang serta masih banyaknya murid yang tidak mampu secara finansial. Disamping itu, taman baca dan kendaraan perpustakaan keliling masih terbatas. Demikian juga ketersediaan tenaga pengajar, upaya dilakukan penambahan sesuai kebijakan Pemerintah Pusat dan redistribusi sesuai kewenangan Pemerintah Kota untuk mendekati keseimbangan rasio murid guru. Sehingga pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dapat terwujud.

Oleh karena itu Pemerintah Kota Makassar senantiasa berupaya untuk menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan yang representatif secara terus menerus diupayakan sebagai

konsekuensi dari meningkatnya jumlah penduduk dan penuntasan program wajib belajar 9 Tahun.

1.2.3.3 Kondisi Sektor Lapangan Kerja

Berdasarkan data dari BPS Tahun 2010, angkatan kerja di Kota Makassar tercatat sebanyak 63,04 % terdiri dari yang bekerja sebanyak 54,43 % dan pengangguran sebanyak 8,61 %. Sedangkan bukan angkatan kerja pada Tahun 2010 sebesar 36,96 % yang terdiri dari yang masih duduk dibangku sekolah sebesar 13,09 %, mengurus rumah tangga 19,24 %, lainnya sebesar 4,63 % Sedangkan pengangguran terbuka pada Tahun 2010 sebesar 15,82 % mengalami kenaikan bila dibandingkan pada Tahun 2009 sebesar 15,58 %, sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja Tahun 2010 sebesar 63,04 %. Untuk lebih rincinya dapat dilihat sebagai berikut :

Table 6-Kondisi Sektor Lapangan Kerja Di Kota Makassar

Kegiatan Utama (1)	Tahun (%)		
	2008 (2)	2009 (3)	2010 (4)
1. Angkatan Kerja			
- Bekerja	51,55	52,97	54,43
- Pengangguran	6,86	7,82	8,61
Jumlah Angkatan Kerja	58,42	60,79	63,04
% Bekerja Terhadap Angkatan Kerja	88,24	92,52	85,93
2. Bukan Angkatan Kerja			
- Sekolah			
- Mengurus RT	15,54	14,26	13,09
- Lainnya	20,26	19,77	19,24
Jumlah Bukan Angkatan Kerja	5,79	5,18	4,63
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	41,59	39,11	36,96
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	16,76	15,58	15,82
	58,42	62,85	63,04

Sumber Data: Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar 2010

Sedangkan jumlah pegawai yang bekerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja pada Tahun 2010 yang diurai berdasarkan jenis kelamin dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar sebagai berikut:

**Table 7-Jumlah Pengawai Dan Unit Kerja Di Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd)
Kota Makassar**

Bagian/Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Sekretariat Daerah	141	93	234
Sekretariat DPRD	52	28	80
Kantor	44	60	104
Badan	227	213	440
Dinas	1.199	582	1.781
Satuan Polisi Pamong Praja	91	4	95
Kecamatan	677	446	1.123
Perusda/ KPN/.KPU/ Korpri	18	10	28
RSU Daya	93	79	172
Puskesmas	123	913	1.036
SLTP Negeri	754	1.396	2.150
SMU Negeri	572	837	1.409
Cabang Dinas	1.661	3.363	5.024
SMK	316	355	671
SKB	23	47	70
SD Percobaan	-	-	-
Jumlah	5.991	8.426	14.417

Sumber Data: Badan Kepegawaian Daerah Kota Makassar 2010

1.2.3.4 Kondisi Sektor Pertanian

Sebagai ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar tumbuh dan berkembang sebagai daerah perdagangan, pendidikan, industri dan jasa-jasa yang mempunyai daya tarik kepada penduduk migrant untuk datang dan bermukim di Kota Makassar sehingga sumber daya alam khususnya lahan pertanian semakin menyempit yang diganti dengan tumbuhnya pemukiman-pemukiman. Penggunaan lahan di Kota Makassar lahan pemukiman seluas 7.481 Ha yang disusul oleh penggunaan lahan usaha lainnya. Sebesar 4.72 Ha. Akibat perkembangan dan pertumbuhan ekonomi kota Makassar sehingga Kota Makassar menjadi daya tarik untuk orang datang dan bermukiman maka, luas lahan pertanian khusus lahan tadah hujan semakin berkurang hingga sekarang menjadi 2.700 Ha, tambak ikan, 1.360 Ha, ladang/tegalan 1.016 Ha, rawa-rawa 104 Ha dan lahan yang belum diusahakan sebesar 194 Ha. Kolam air tawar 32 Ha.

Lahan pertanian tersebut ditanami dengan tanaman padi, jagung dan singkong dan ubi-ubian. Luas areal panen yang diperoleh dari komoditi padi pada tahun 2008 sebesar . 1.922 Ha dengan jumlah produksi gabah kering giling setiap tahunnya sebesar 9.853 Ton dan setelah dihilangkan gabahnya diperoleh produksi beras giling setiap tahunnya 6.405 ton/ha dengan rata-rata produksi yang dihasilkan setiap tahun 51,26 Ton/Ha. jumlah kebutuhan yang di konsumsi oleh masyarakat Kota Makassar sebanyak 180.895 ton sementara itu untuk komoditi jagung pada tahun 2008 luas areal produksi sebanyak 923 Ha dengan jumlah produksi setiap tahun sebanyak 286 ton dan kebutuhan konsumsi sebanyak 35.501 ton. Pada komoditi singkong dan umbi-umbian luas areal produksi yang dihasilkan hanya sebanyak 24 Ha jumlah produksi sebesar 337 Ha dan kebutuhan konsumsi sebesar 45.636 ton.

Sebagai wilayah, perkotaan Makassar tidak mempunyai hutan namun hasil hutan seperti papan, kayu olahan banyak disuplai dari kabupaten dan luar Sulawesi untuk kebutuhan perumahan, berdasarkan data pada tahun 2007 kayu gergajian yang masuk sebanyak 459.105 M3.

1.2.3.5 Kondisi Sektor Perikanan

Dilihat dari kondisi geografis Kota Makassar, merupakan daerah maritim yang mempunyai wilayah perairan/lautan sebanyak 29,9 Km². Potensi sektor perikanan di Kota Makassar dapat dikembangkan baik sebagai perikanan laut dan perikanan darat. Potensi perikanan laut pada tahun 2007 diperoleh hasil tangkapan sebanyak 160.071,9 Ton dengan jumlah kapal yang beroperasi untuk menangkap ikan dilaut sebanyak 1.420 kapal. Hasil tangkapan ikan dan tambak ada yang dijual pada perusahaan pengolahan ikan yang berjumlah 1.524 buah atau sebagian dijual pada 3 tempat pelelangan yang ada di Kota Makassar antara lain pada pelelangan paotere. Jumlah nelayan yang ada di Kota Makassar sebanyak 1063 KK yang berada pada 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Tamalate, Kecamatan Mariso, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Tamalanrea, dan Kecamatan Biringkanaya .

Sementara untuk perikanan darat lebih banyak diusahakan pada perikanan tambak dengan luas 1 Ha dan jumlah produksi sebanyak 414,8 ton.

1.2.3.6 Kondisi Sektor Sosial Lainnya

Agama – Perkembangan pembangunan di bidang spiritual dapat dilihat dari besarnya sarana peribadatan masing-masing agama. Tempat peribadatan umat Islam berupa mesjid dan mushalla pada tahun 2009 masing-masing berjumlah 923 buah dan 48 buah. Tempat peribadatan Kristen berupa gereja masing-masing 137 buah gereja protestan dan 8 buah gereja katolik. Tempat peribadatan untuk agama Budha dan Hindu masing- masing berjumlah 26 buah dan 3 buah.

Peradilan dan Kriminal - Jumlah narapidana menurut jenis hukuman dilembaga pemasyarakatan ada 464 orang (laki-laki 464 orang dan tidak ada perempuan). Jumlah pelanggaran lalu lintas pada tahun 2009 sebanyak 24.507 kasus. Adapun jumlah kecelakaan sebanyak 497 kasus dengan korban meninggal 139 orang, luka berat 69 orang dan luka ringan 474 orang.

Tahapan Keluarga Sejahtera - jumlah keluarga pra keluarga sejahtera Di Kota Makassar yakni 63.964 keluarga dan keluarga sejahtera I sebanyak 52.700 keluarga dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 254.868.

Sosal lainnya - Di kota Makassar pada tahun 2009 jumlah anak asuh yang tercatat yang ditampung di 83 Panti Asuhan ada sebanyak 4.034 anak yang diasuh. Sedangkan jumlah gelandangan/pengemis dan anak jalanan di Kota Makassar tahun 2009 sebanyak 144 orang dan 870 orang.

BAB II PRODUK-PRODUK HUKUM

A. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah sebagai dasar kebijakan Pemerintah Daerah yang dirancang dan berhasil disahkan selama periode kepemimpinan Wali Kota H. Ilham Arief Sirajuddin adalah sebanyak 95 (Sembilan Puluh Lima) Peraturan Daerah, dimana untuk Periode Pertama 2004-2008 sebanyak sebanyak 77 (Tujuh Puluh Tujuh) Peraturan Daerah dan untuk Periode Kedua sebanyak 18 (Delapan Belas) Peraturan Daerah yang dimulai tanggal 8 Mei 2009 sampai sekarang yang diurai dalam tabel berikut :

Table 8- Daftar Peraturan Daerah yang disahkan Tahun 2004–2008

No.	Nomor Peraturan Daerah dan Tanggal Ditetapkan	Tentang	Ket
1.	Nomor 8 Tahun 2004	Perubahan APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2004	Tidak Berlaku
2.	Tgl. 31 Agustus 2004 Nomor 9 Tahun 2004 Tgl. 31 Agustus 2004	Pengaturan Perlindungan dan Jasa Pelayanan Ketenagakerjaan Dalam Wilayah Kota Makassar	Tidak Berlaku
3.	Nomor 10 Tahun 2004 Tgl. 31 Agustus 2004	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil dan Retribusi Penggantian Biaya serta Dokumen Kependudukan dan Akta Catatan Sipil di Kota Makassar	Tidak Berlaku
4.	Nomor 11 Tahun 2004 Tgl. 31 Agustus 2004	Pengaturan dan Pemungutan Retribusi Usaha di Bidang Perindustrian dan Perdagangan di Kota Makassar	Berlaku
5.	Nomor 12 Tahun 2004 Tgl. 31 Agustus 2004	Pengurusan Pasar Dalam Daerah Kota Makassar	Berlaku
6.	Nomor 13 Tahun 2004 Tgl. 31 Agustus 2004	Pembentukan PD. Bangunan Sarana Makassar	Berlaku
7.	Nomor 14 Tahun 2004 Tgl. 31 Agustus 2004	Renstra Pemerintah Kota Makassar Tahun 2004-2009	Tidak Berlaku
8.	Nomor 15 Tahun 2004 Tgl. 31 Agustus 2004	Tata Bangunan	Berlaku

9.	Nomor 16 Tahun 2004 Tgl. 4 September 2004	Penataan Kawasan Pulau, Pantai dan Pelabuhan	Berlaku
10.	Nomor 17 Tahun 2004 Tgl. 4 September 2004	Pelabuhan di Kota Makassar	Berlaku
11.	Nomor 18 Tahun 2004 Tgl. 4 September 2004	Retribusi Jasa Kepelabuhanan	Berlaku
12.	Nomor 1 Tahun 2005 Tgl. 29 Maret 2005	Kependudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Makassar	Berlaku
13.	Nomor 2 Tahun 2005 Tgl. 31 Maret 2005	Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2005	Tidak Berlaku
14.	Nomor 3 Tahun 2005	Retribusi Penggunaan Tanah dan Bangunan yang dikuasai Pemerintah Daerah untuk Pemasangan Reklame	Berlaku
15.	Nomor 4 Tahun 2005 Tgl. 21 Juni 2005	Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Makassar	Tidak Berlaku
16.	Nomor 5 Tahun 2005 Tgl. 21 Juni 2005	Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Makassar	Tidak Berlaku
17.	Nomor 6 Tahun 2005 Tgl. 21 Juni 2005	Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja BAPPEDA Kota Makassar	Tidak Berlaku
18.	Nomor 7 Tahun 2005 Tgl. 21 Juni 2005	Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Makassar	Tidak Berlaku
19.	Nomor 8 Tahun 2005 Tgl. 21 Juni 2005	Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Makassar	Tidak Berlaku
20.	Nomor 9 Tahun 2005 Tgl. 21 Juni 2005	Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Makassar	Tidak Berlaku
21.	Nomor 10 Tahun 2005 Tgl. 21 Juni 2005	Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Kota	Tidak Berlaku

		Makassar	
22.	Nomor 11 Tahun 2005 Tgl. 21 Juni 2005	Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Arsip Perpustakaan dan Pengelohan Data Kota Makassar	Tidak Berlaku
23.	Nomor 12 Tahun 2005 Tgl. 21 Juni 2005	Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa Kota Makassar	Tidak Berlaku
24.	Nomor 13 Tahun 2005 Tgl. 21 Juni 2005	Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar	Tidak Berlaku
25.	Nomor 14 Tahun 2005 Tgl. 21 Juni 2005	Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar	Tidak Berlaku
26.	Nomor 15 Tahun 2005 Tgl. 21 Juni 2005	Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Ketahanan Pangan Kota Makassar	Tidak Berlaku
27.	Nomor 16 Tahun 2005 Tgl. 21 Juni 2005	Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal Kota Makassar	Tidak Berlaku
28.	Nomor 17 Tahun 2005 Tgl. 21 Juni 2005	Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Makassar	Tidak Berlaku
30.	Nomor 18 Tahun 2005 Tgl. 21 Juni 2005	Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Makassar	Tidak Berlaku
31.	Nomor 19 Tahun 2005 Tgl. 21 Juni 2005	Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar	Tidak Berlaku
32.	Nomor 20 Tahun 2005 Tgl. 21 Juni 2005	Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Makassar	Tidak Berlaku
33.	Nomor 21 Tahun 2005 Tgl. 21 Juni 2005	Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Makassar	Tidak Berlaku

34.	Nomor 22 Tahun 2005 Tgl. 21 Juni 2005	Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Makassar	Tidak Berlaku
35.	Nomor 23 Tahun 2005 Tgl. 21 Juni 2005	Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar	Tidak Berlaku
36.	Nomor 24 Tahun 2005 Tgl. 21 Juni 2005	Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar	Tidak Berlaku
37.	Nomor 25 Tahun 2005 Tgl. 21 Juni 2005	Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar	Tidak Berlaku
38.	Nomor 26 Tahun 2005 Tgl. 21 Juni 2005	Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Makassar	Tidak Berlaku
39.	Nomor 27 Tahun 2005 Tgl. 21 Juni 2005	Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Makassar	Tidak Berlaku
40.	Nomor 28 Tahun 2005 Tgl. 21 Juni 2005	Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Keindahan Kota Makassar	Tidak Berlaku
41.	Nomor 29 Tahun 2005 Tgl. 21 Juni 2005	Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Kota Makassar	Tidak Berlaku
42.	Nomor 30 Tahun 2005 Tgl. 21 Juni 2005	Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Dalam Kota Makassar	Tidak Berlaku
43.	Nomor 31 Tahun 2005 Tgl. 21 Juni 2005	Perhitungan APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2004	Tidak Berlaku
44.	Nomor 1 Tahun 2006 Tgl. 12 Januari 2006	Penetapan APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2006	Tidak Berlaku
45.	Nomor 2 Tahun 2006 Tgl. 23 Januari 2006	Pengaturan Barang Bekas Layak Pakai Yang Berasal Dari Luar Kota Makassar	Berlaku
46.	Nomor 3 Tahun 2006	Penyelenggaraan Pendidikan	Berlaku

	Tgl. 14 Juli 2006		
47.	Nomor 4 Tahun 2006 Tgl. 11 Agustus 2006	Perhitungan APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2005	Tidak Berlaku
48.	Nomor 5 Tahun 2006 Tgl. 15 September 2006	Pengelolaan Zakat	Berlaku
49.	Nomor 6 Tahun 2006 Tgl. 27 September 2006	Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar Tahun 2005-2015	Berlaku
50.	Nomor 7 Tahun 2006 Tgl. 27 September 2006	Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran Serta Perizinan Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	Berlaku
51.	Nomor 8 Tahun 2006 Tgl. 3 Oktober 2006	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggaran DPRD Kota Makassar	Berlaku
52.	Nomor 9 Tahun 2006 Tgl. 3 Oktober 2006	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2005 – 2010	Tidak Berlaku
53.	Nomor 10 Tahun 2006 Tgl. 3 Oktober 2006	Keuangan Pada Partai Politik	Berlaku
54.	Nomor 11 Tahun 2006 Tgl. 16 Oktober 2006	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah TK. II Ujung Pandang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum TK II Ujung Pandang	Berlaku
55.	Nomor 12 Tahun 2006 Tgl. 16 Oktober 2006	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2006	Berlaku
56.	Nomor 13 Tahun 2006 Tgl. 11 Desember 2006	Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Makassar 2005 - 2025	Berlaku
57.	Nomor 14 Tahun 2006 Tgl. 11 Desember 2006	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Terminal Metro Kota Makassar	Berlaku

58.	Nomor 15 Tahun 2006 Tgl. 11 Desember 2006	Pengelolaan Terminal Penumpang	Berlaku
59.	Nomor 16 Tahun 2006 Tgl. 11 Desember 2006	Perubahanan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang	Berlaku
60.	Nomor 17 Tahun 2006 Tgl. 11 Desember 2006	Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar	Berlaku
61.	Nomor 1 Tahun 2007 Tgl. 12 Januari 2006	Perubahanan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggaran DPRD Kota Makassar	Berlaku
62.	Nomor 2 Tahun 2007 Tgl. 31 Januari 2007	Pembentukan Dana Cadangan Tahun 2007 untuk Penyelenggaraan Pemilihan WaliKota dan Wakil WaliKota Kota Makassar	Berlaku
63.	Nomor 3 Tahun 2007 Tgl. 2 Februari 2007	Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2007	Tidak Berlaku
64.	Nomor 4 Tahun 2007 Tgl. 11 Juni 2007	Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Makassar	Tidak Berlaku
65.	Nomor 5 Tahun 2007 Tgl. 11 Juni 2007	Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar	Tidak Berlaku
66.	Nomor 6 Tahun 2007 Tgl. 25 Juni 2006	Perubahanan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggaran DPRD Kota Makassar	Berlaku
67.	Nomor 7 Tahun 2007 Tgl. 1 Agustus 2007	Perhitungan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2006	Tidak Berlaku
68.	Nomor 8 Tahun 2007	Perubahanan Anggaran dan Pendapatan	Tidak

	Tgl. 10 Oktober 2007	Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2007	Berlaku
69.	Nomor 9 Tahun 2007 Tgl. 22 Nopember 2007	Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keluarga Berencana Kota Makassar	Tidak Berlaku
70.	Nomor 10 Tahun 2007 Tgl. 22 Nopember 2007	Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar	Tidak Berlaku
71.	Nomor 11 Tahun 2007 Tgl. 22 Nopember 2007	Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Makassar	Tidak Berlaku
72.	Nomor 12 Tahun 2007 Tgl. 22 Nopember 2007	Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi Kota Makassar	Tidak Berlaku
73.	Nomor 13 Tahun 2007 Tgl. 22 Nopember 2007	Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Makassar	Tidak Berlaku
74.	Nomor 14 Tahun 2007 Tgl. 22 Nopember 2007	Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar	Tidak Berlaku
75.	Nomor 15 Tahun 2007 Tgl. 28 Desember 2007	Penetapan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2008	Tidak Berlaku
76.	Nomor 1 Tahun 2008 Tgl. 1 April 2008	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Berlaku
77.	Nomor 2 Tahun 2008 Tgl. 25 Juni 2008	Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen Kota Makassar	Berlaku

Sumber : Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Makassar 2011

Table 9-Daftar Peraturan Daerah yang disahkan Tahun 2009-sekarang

No.	Nomor Peraturan Daerah dan Tanggal Ditetapkan	Tentang	Ket
1.	Nomor 4 Tahun 2009 Tgl. 24 Juni 2009	Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	Berlaku

2.	Nomor 5 Tahun 2009 Tgl. 28 Agustus 2009	Pertanggungjawaban Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2008	Tidak Berlaku
3.	Nomor 6 Tahun 2009 Tgl. 7 September 2009	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2009-2014	Berlaku
4.	Nomor 7 Tahun 2009 Tgl. 7 September 2009	Pelayanan Kesehatan di Kota Makassar	Berlaku
5.	Nomor 8 Tahun 2009 Tgl. 7 September 2009	Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan di Kota Makassar	Berlaku
6.	Nomor 9 Tahun 2009 Tgl. 7 September 2009	Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Makassar	Berlaku
7.	Nomor 10 Tahun 2009 Tgl. 8 September 2009	Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Bandara Terpadu Kota Makassar	Berlaku
8.	Nomor 11 Tahun 2009 Tgl. 8 September 2009	Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Riset Terpadu Kota Makassar	Berlaku
9.	Nomor 12 Tahun 2009 Tgl. 8 September 2009	Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Bisnis Global Terpadu Kota Makassar	Berlaku
10.	Nomor 13 Tahun 2009 Tgl. 8 September 2009	Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Pergudangan Terpadu Kota Makassar	Berlaku
11.	Nomor 14 Tahun 2009 Tgl. 10 September 2009	Penetapan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Makassar Perubahanan Tahun Anggaran 2009	Tidak Berlaku
12.	Nomor 15 Tahun 2009 Tgl. 14 September 2009	Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Kota Makassar	Berlaku
13.	Nomor 16 Tahun 2009 Tgl. 23 Desember 2009	Tambahan Modal Pemerintah Kota Makassar pada Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan	Berlaku
14.	Nomor 17 Tahun 2009 Tgl. 31 Desember 2009	Penetapan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun	Tidak Berlaku

		Anggaran 2010	
15.	Nomor 1 Tahun 2010 Tgl. 6 Oktober 2010	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2010	Tidak Berlaku
16.	Nomor 2 Tahun 2010 Tgl. 11 Nopember 2010	Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Makassar Tahun Anggaran 2010	Tidak Berlaku
17.	Nomor 3 Tahun 2010 Tgl. 19 Nopember 2010	Pajak Daerah Kota Makassar	Berlaku
18.	Nomor 4 Tahun 2010 Tgl. 31 Desember 2010	Penetapan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2011	Tidak Berlaku

Sumber : Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Makassar 2011

Dari sejumlah Peraturan Daerah dimaksud, terdapat beberapa Peraturan Daerah yang secara fenomenal yang memperlihatkan komitmen H. Ilham Arief Sirajuddin dalam membangun Kota Makassar diantaranya Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2010 tentang **Pelayanan Kesehatan di Kota Makassar**, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2010 tentang **Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan di Kota Makassar**, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2010 tentang **Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Makassar**, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2006 tentang **Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran Serta Perizinan Tempat Penjualan Minuman Beralkohol**, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2006 tentang **Pengelolaan Zakat**.

B. Peraturan Walikota

Peraturan WaliKota sebagai dasar kebijakan Pemerintah Daerah yang dirancang dan berhasil disahkan selama periode kepemimpinan WaliKota H. Ilham Arief Sirajuddin adalah sebanyak 311 (Tiga Ratus Sebelas) Peraturan WaliKota, dimana untuk Periode Pertama 2004-2008 sebanyak 152 (Seratus Lima Puluh Dua) Peraturan WaliKota dan untuk Periode Kedua sebanyak 159 (Seratus Lima Puluh Sembilan) Peraturan WaliKota yang dimulai tanggal 8 Mei 2009 sampai sekarang yang diurai dalam tabel berikut :

Table 10-Daftar Peraturan WaliKota yang disahkan Tahun 2004–2008

No.	Nomor Peraturan WaliKota dan Tanggal ditetapkan	Tentang	Ket
1.	Nomor 1 Tahun 2004 Tgl. 20 Desember 2004	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perda Kota Makassar No. 12 Tahun 2004 tentang Pengurusan Pasar Dalam Daerah Kota Makassar.	PD Pasar Raya

2.	Nomor 2 Tahun 2004 Tgl. 27 Desember 2004	Pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Dokumen Kependudukan dan Akta Catatan Sipil di Kota Makassar	Dinas Capil
3.	Nomor 4 Tahun 2004 Tgl. 27 Desember 2004	Prosedur dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.	Dinas Capil
4.	Nomor 5 Tahun 2005 Tgl. 11 Januari 2005	Tarif/Harga Dasar Satuan Listrik Non PLN Dalam Wilayah Kota Makassar.	Dispenda
5.	Nomor 6 Tahun 2005 Tgl. 17 Januari 2005	Jabatan Fungsional Perantara Hubungan Industrial dan Angka Kreditnya.	Bagian Ortala
6.	Nomor 7 Tahun 2005 Tgl. 17 Januari 2005	Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	Bagian Ortala
7.	Nomor 8 Tahun 2005 Tgl. 17 Januari 2005	Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan	Bagian Ortala
8.	Nomor 9 Tahun 2005 Tgl. 17 Januari 2005	Jabatan Fungsional Pekerja Sosial	Bagian Ortala
9.	Nomor 10 Tahun 2005 Tgl. 17 Januari 2005	Jabatan Fungsional Pengantar Kerja	Bagian Ortala
10.	Nomor 11 Tahun 2005 Tgl. 26 Januari 2005	Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Gangguan	Dispenda
11.	Nomor 13 Tahun 2005 Tgl. 14 Pebruari 2005	Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sub Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kota Makassar	Bagian Ortala
12.	Nomor 14 Tahun 2005 Tgl. 14 Pebruari 2005	Tata Cara Pemberian Izin Pada Pemerintah Kota Makassar	Kantor Perizinan
13.	Nomor 15 Tahun 2005 Tgl. 16 Pebruari 2005	Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Umum Kota Makassar Pelyanan dari Makassar Mall Menuju Kawasan Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP)	Dishub
14.	Nomor 17 Tahun 2005 Tgl. 02 Maret 2005	Penyesuaian tarif Angkutan Umum Jenis Mikrolet (Pete-pete) Dalam Wilayah Kota	Dishub

		Makassar	
15.	Nomor 18 Tahun 2005 Tgl. 31 Maret 2005	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar Tahun Anggaran 2005	Bagian Keuangan
16.	Nomor 19 Tahun 2005 Tgl. 04 April 2005	Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Makassar	Bagian Keuangan
17.	Nomor 20 Tahun 2005 Tgl. 04 April 2005	Penghasilan tetap Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Makassar	Bagian Keuangan
18.	Nomor 21 Tahun 2005 Tgl. 02 Mei 2005	Petunjuk Teknis Pemakaian Kekayaan Daerah Atas Lapangan Karebosi Lapangan Lainnya Serta Taman yang dikuasai Pemerintah Kota Makassar	Bag. Keuangan
19.	Nomor 1 Tahun 2006 Tgl. 12 Januari 2006	Penjabaran APBD Kota Makassar	Bagian Ortala
20.	Nomor 2 Tahun 2006 Tgl. 14 Pebruari 2006	Nomenklatur, Uraian Tugas Jabatan Non Struktural dan Pola Jabatan Pada UPTD Perbengkelan Kota Makassar	Bag Tapem
21.	Nomor 3 Tahun 2006 Tgl. 15 Pebruari 2006	Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kota Makassar	Bag. Keuangan
22.	Nomor 4 Tahun 2006	Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak lingkungan Hidup (AMDAL) Daerah Kota Makassar	Bag. Ortala
23.	Nomor 5 Tahun 2006	Tata Cara Memperoleh Izin Perdagangan Barang Bekas Pakai Yang Berasal Dari Luar Kota	Bag. Ortala
24.	Nomor 6 Tahun 2006 Tgl. 6 Juni 2006	Perubahanan Atas Peraturan WaliKota Makassar Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penjabaran APBD TA 2006	Bag. Ortala
25.	Nomor 22 Tahun 2006 Tgl. 6 Juni 2006	Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Perencanaan Pembangunan Kota Makassar	Bag. Ortala
26.	Nomor 23 Tahun 2006 Tgl. 6 Juni 2006	Uraian Tugas Jabatan Struktural Inspektorat Kota Makassar	Bag. Ortala
27.	Nomor 24 Tahun 2006	Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan	Bag.

	Tgl. 6 Juni 2006	Pendidikan dan Pelatihan Kota Makassar	Ortala
28.	Nomor 25 Tahun 2006 Tgl. 6 Juni 2006	Uraian tugas jabatan struktural Badan Pemberdayaan Masyarakat dan KB Kota Makassar	Bag. Ortala
29.	Nomor 26 Tahun 2006 Tgl. 6 Juni 2006	Uraian Tugas Jabatan Struktural Kantor Kependidikan dan catatan Sipil Kota Makassar	Bag. Ortala
30.	Nomor 27 Tahun 2006 Tgl. 6 Juni 2006	Uraian Tugas Jabatan Struktural Kantor Arsip Perpustakaan dan Pengolahan Data Kota Makassar	Bag. Ortala
31.	Nomor 28 Tahun 2006 Tgl. 6 Juni 2006	Uraian Tugas Jabatan Struktural Kantor Kesatuan Bangsa Kota Makassar	Bag. Ortala
32.	Nomor 29 Tahun 2006 Tgl. 6 Juni 2006	Uraian Tugas Jabatan Struktural Kantor Pelayanan administrasi Perizinan Kota Makassar	Bag. Ortala
33.	Nomor 30 Tahun 2006 Tgl. 6 Juni 2006	Uraian Tugas Jabatan Struktural Kantor Kesatuan Pamong Praja Kota Makassar	Bag. Ortala
34.	Nomor 31 Tahun 2006 Tgl. 6 Juni 2006	Uraian tugas jabatan struktural Kantor Ketahanan Pangan Kota Makassar	Bag. Ortala
35.	Nomor 32 Tahun 2006 Tgl. 6 Juni 2006	Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kota Makassar	Bag. Ortala
36.	Nomor 33 Tahun 2006 Tgl. 6 Juni 2006	Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Makassar	Bag. Ortala
37.	Nomor 34 Tahun 2006 Tgl. 6 Juni 2006	Uraian Tugas Jabatan struktural Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Makassar	Bag. Ortala
38.	Nomor 35 Tahun 2006 Tgl. 6 Juni 2006	Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pendapatan Kota Makassar	Bag. Ortala
39.	Nomor 56 Tahun 2006 Tgl. 6 Juni 2006	Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Pemreintah Kota Makassar	Bag Keuangan
40.	Nomor 57 Tahun 2006 Tgl. 23 Juni 2006	Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar	Bag. Keuangan

41.	Nomor 58 Tahun 2006 Tgl. 23 Juni 2006	Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengendali Program KB pada BPM dan KB Kota Makassar	Bag. Ortala
42.	Nomor 60 Tahun 2006	Perubahanan Ketiga Peraturan WaliKota Makassar Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penjabaran APBD TA 2006	Bag. Ortala
43.	Nomor 61 Tahun 2006 Tgl. 24 Juli 2006	Penyelenggaraan Tata Kerja Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar	Bag. Ortala
44.	Nomor 62 Tahun 2006 Tgl. 11 Agustus 2006	Penjabaran Perhitungan APBD TA 2005	Bag. Ortala
45.	Nomor 63 Tahun 2006 Tgl. 11 Agustus 2006	Perubahanan Peraturan WaliKota Makassar Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembangunan Sarana Multiguna Dalam Kota Makassar	Bag. Ortala
46.	Nomor 64 Tahun 2006 Tgl. 23 Agustus 2006	Protap Pelaksana Tugas Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Dalam Wilayah Kota Makassar	Bag. Ortala
47.	Nomor 65 Tahun 2006 4 Sept 2006	Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja SD, SMP, SMU serta SMK Dalam Kota Makassar	Bag. Ortala
48.	Nomor 67 Tahun 2006	Uraian Tugas Non Struktural Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD)	Bag. Ortala
49.	Nomor 68 Tahun 2006	Pengelolaan Lapangan	
50.	Nomor 69 Tahun 2006	Uraian Tugas Non Struktural Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Pembinaan dan Pembangunan Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar	Bag. Ortala
51.	Nomor 70 Tahun 2006	Uraian Tugas Non Struktural Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Pemakaman pada Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Keindahan Kota Makassar	Bag. Ortala
52.	Nomor 71 Tahun 2006	Uraian Tugas Non Struktural Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) SKB	Bappeda

		pada Dinas Pendidikan Kota Makassar	
53.	Nomor 72 Tahun 2006	Uraian Tugas Non Struktural Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) pada Dinas Kelautan dan Ketahanan Pangan Kota Makassar	Bappeda
54.	Nomor 73 Tahun 2006	Uraian Tugas Non Struktural Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Obat pada Dinas Kesehatan Kota Makassar	Bappeda
55.	Nomor 75 Tahun 2006	Uraian Tugas Non Struktural Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Tamangapa pada Dinas BLHD Kota Makassar	Bappeda
56.	Nomor 76 Tahun 2006		
57.	Nomor 77 Tahun 2006	Penjabaran Perubahan APBD TA 2006	Bappeda
58.	Nomor 78 Tahun 2006	Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Tahun 2007	Bappeda
59.	Nomor 79 Tahun 2006	Rencana Kerja SKPD Kota Makassar Dinas Informasi dan Komunikasi	Bappeda
60.	Nomor 80 Tahun 2006	Rencana Kerja SKPD Kota Makassar Dinas Kecamatan Ujung Tanah	Bappeda
61.	Nomor 81 Tahun 2006	Rencana Kerja SKPD Kota Makassar Kecamatan Ujung Pandang	Bappeda
62.	Nomor 82 Tahun 2006	Rencana Kerja SKPD Kota Makassar Kecamatan Wajo	Bappeda
63.	Nomor 83 Tahun 2006	Rencana Kerja SKPD Kota Makassar Kantor Pelayanan Administrasi	Bappeda
64.	Nomor 84 Tahun 2006	Rencana Kerja SKPD Kota Makassar Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Bappeda
65.	Nomor 85 Tahun 2006 Tgl. 22 Nopember 2006	Rencana Kerja SKPD Kota Makassar Kecamatan Rappocini	Bappeda
66.	Nomor 86 Tahun 2006 Tgl. 22 Nopember 2006	Rencana Kerja SKPD Kota Makassar Badan Pemberdayaan Masyarakat dan KB	Bappeda

67.	Nomor 87 Tahun 2006 Tgl. 22 Nopember 2006	Rencana Strategis SKPD Kota Makassar Dinas Sosial	Bappeda
68.	Nomor 88 Tahun 2006 Tgl. 22 Nopember 2006	Rencana Strategis SKPD Kota Makassar Dinas Kesehatan	Bappeda
69.	Nomor 89 Tahun 2006 Tgl. 22 Nopember 2006	Rencana Strategis SKPD Kota Makassar Kecamatan Ujung Pandang	Bappeda
70.	Nomor 90 Tahun 2006 Tgl. 22 Nopember 2006	Rencana Strategis SKPD Kota Makassar Kesatuan Bangsa	Bappeda
71.	Nomor 91 Tahun 2006 Tgl. 22 Nopember 2006	Rencana Strategis SKPD Kota Makassar Kesatuan Bangsa	Bappeda
72.	Nomor 92 Tahun 2006 Tgl. 22 Nopember 2006	Rencana Strategis SKPD Kota Makassar Kecamatan Tallo	Bappeda
73.	Nomor 93 Tahun 2006 Tgl. 22 Nopember 2006	Rencana Strategis SKPD Kota Makassar Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Keindahan	Bappeda
74.	Nomor 94 Tahun 2006 Tgl. 22 Nopember 2006	Rencana Strategis SKPD Kota Makassar Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Keindahan	Bappeda
75.	Nomor 95 Tahun 2006 Tgl. 22 Nopember 2006	Rencana Strategis SKPD Kota Makassar Kecamatan Mamajang	Bappeda
76.	Nomor 96 Tahun 2006 Tgl. 22 Nopember 2006	Rencana Strategis SKPD Kota Makassar Dinas pekerjaan Umum	Bappeda
77.	Nomor 97 Tahun 2006 Tgl. 22 Nopember 2006	Rencana Strategis SKPD Kota Makassar Dinas Perhubungan	Bappeda
78.	Nomor 98 Tahun 2006 Tgl. 22 Nopember 2006	Rencana Strategis SKPD Kota Makassar Kecamatan Panakukang	Bappeda
79.	Nomor 99 Tahun 2006 Tgl. 22 Nopember 2006	Rencana Strategis SKPD Kota Makassar Dinas Pendidikan	Bappeda
80.	Nomor 100 Tahun 2006 Tgl. 22 Nopember 2006	Rencana Strategis SKPD Kota Makassar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Bappeda
81.	Nomor 101 Tahun 2006 Tgl. 22 Nopember 2006	Rencana Strategis SKPD Kota Makassar Kecamatan Makassar	Bappeda

82.	Nomor 102 Tahun 2006 Tgl. 22 Nopember 2006	Rencana Strategis SKPD Kota Makassar Badan Pendidikan dan Pelatihan	Bappeda
83.	Nomor 103 Tahun 2006 Tgl. 22 Nopember 2006	Rencana Strategis SKPD Kota Makassar Dinas Tata Ruang dan Bangunan	Bappeda
84.	Nomor 104 Tahun 2006 Tgl. 22 Nopember 2006	Rencana Strategis SKPD Kota Makassar Kecamatan Tamalanrea	Bappeda
85.	Nomor 105 Tahun 2006 Tgl. 22 Nopember 2006	Rencana Strategis SKPD Kota Makassar Kantor Arsip, Perpustakaan dan Pengolahan Data	Bappeda
86.	Nomor 106 Tahun 2006 Tgl. 22 Nopember 2006	Rencana Strategis SKPD Kota Makassar Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil	Bappeda
87.	Nomor 107 Tahun 2006 Tgl. 22 Nopember 2006	Rencana Strategis SKPD Kota Makassar Kecamatan Bontoala	Bappeda
88.	Nomor 108 Tahun 2006 Tgl. 22 Nopember 2006	Rencana Strategis SKPD Kota Makassar Inspektorat	Bappeda
89.	Nomor 109 Tahun 2006 Tgl. 22 Nopember 2006	Rencana Strategis SKPD Kota Makassar Dinas Tenaga Kerja	Bappeda
90.	Nomor 110 Tahun 2006 Tgl. 22 Nopember 2006	Rencana Strategis SKPD Kota Makassar Kecamatan Mariso	Bappeda
91.	Nomor 111 Tahun 2006 Tgl. 22 Nopember 2006	Rencana Strategis SKPD Kota Makassar Sekretariat Daerah	Bappeda
92.	Nomor 112 Tahun 2006 Tgl. 22 Nopember 2006	Rencana Strategis SKPD Kota Makassar Sekertariat DPRD	Bappeda
93.	Nomor 113 Tahun 2006 Tgl. 22 Nopember 2006	Rencana Strategis SKPD Kota Makassar Kecamatan Biringkanaya	Bappeda
94.	Nomor 114 Tahun 2006 Tgl. 22 Nopember 2006	Rencana Strategis SKPD Kota Makassar Dinas Pendapatan Daerah	Bag. Ortala
95.	Nomor 115 Tahun 2006 Tgl. 22 Nopember 2006	Rencana Strategis SKPD Kota Makassar Bappeda	Bagian Keuangan
96.	Nomor 116 Tahun 2006 Tgl. 29 Nopember 2006	Rencana Strategis SKPD Kota Makassar Kecamatan Tamalate	Bagian Keuangan
		Rencana Strategis SKPD Kota Makassar	

97.	Nomor 117 Tahun 2006 Tgl. 30 Nopember 2006	Kecamatan Manggala	
98.	Nomor 118 Tahun 2006 Tgl. 11 Desember 2006	Rencana Strategis SKPD Kota Makassar Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar	
99.	Nomor 119 Tahun 2006 Tgl. 11 Desember 2006	Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan Kota Makassar	
100.	Nomor 120 Tahun 2006 Tgl. 20 Desember 2006	Perubahanan Ketiga Peraturan Wali Kota Kota Makassar Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penjabaran Perubahanan APBD Tahun Anggaran 2006.	
101.	Nomor 1 Tahun 2007 Tgl. 17 Januari 2007	Rencana zonasi Wilayah Pesisir dan Laut di Kota Makassar	
102.	Nomor 2 Tahun 2007 Tgl. 2 Pebruari 2007	Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP- MB) dan Surat izin tempat penjualan minuman beralkohol (SITP-MB)	
103.	Nomor 3 Tahun 2007 Tgl. 15 Pebruari 2007	Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Pengelola Pelataran Pantai Losari Pada Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Keindahan Kota Makassar	
104.	Nomor 4 Tahun 2007 Tgl. 21 Pebruari 2007	Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2007	
105.	Nomor 5 Tahun 2007 Tgl. 21 Pebruari 2007	Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Kota Makassar	
106.	Nomor 6 Tahun 2007 Tgl. 26 Pebruari 2007	Jadwal Referensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2007	
107.	Nomor 8 Tahun 2007 Tgl. 2 April 2007	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Makassar	
108.	Nomor 9 Tahun 2007	Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata	Bagian

	Tgl. 3 April 2007	Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Pengelola Kawasan Pusat Jajan Wisata Pantai Laguna pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Makassar	Keuangan
109.	Nomor 10 Tahun 2007 Tgl. 9 April 2007		
110.	Nomor 12 Tahun 2007 Tgl. 25 Mei 2007	Pedoman Penggunaan Kertas Untuk Arsip Bernilai Guna Tinggi Tahun 2007	
111.	Nomor 13 Tahun 2007 Tgl. 5 Juni 2007	Pengaturan Pemasangan Reklame dan Atribut Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Dalam Kota Makassar	
112.	Nomor 14 Tahun 2007 Tgl. 20 Juni 2007	Pengelolaan Dana Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	
113.	Nomor 15 Tahun 2007 Tgl. 2 Juli 2007	Penerapan Regulatory Impact Assesment (RIA) Dalam Penyelesaian Pra Rancangan Perda/Perwa yang Terkait Investor di Kota Makassar	
114.	Nomor 16 Tahun 2007 Tgl. 2 Juli 2007	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar T.A. 2007	
115.	Nomor 17 Tahun 2007 Tgl. 2 Juli 2007	Uraian Tugas Jabatan Non Struktural UPTD Rumah Susun Sederhana (RUSUNA A) Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar	
116.	Nomor 18 Tahun 2007 Tgl. 2 Juli 2007	Uraian Tugas Jabatan Non Struktural UPT Pengendalian Program Keluarga Berencana (KB) pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Makassar	
117.	Nomor 23 Tahun 2007 Tgl. 10 Juli 2007	Uraian Tugas Jabatan Non Struktural UPTD Balai Benih Ikan pada Dinas Kelautan dan Ketahanan Pangan Kota Makassar	
118.	Nomor 24 Tahun 2007 Tgl. 12 Juli 2007	Uraian Tugas Jabatan Non Struktural UPBD Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kota Makassar	
119.	Nomor 25 Tahun 2007 Tgl. 2 Agustus 2007	Pembagian Ruang Peruntukan dan Larangan Penggunaan Dalam Area Pekarangan Lapangan Karebosi	
		Perubahan Ketiga Penjabran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar (APBD) Tahun Anggaran 2007	

120.	Nomor 26 Tahun 2007 Tgl. 3 Agustus 2007	Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar Tahun Anggaran 2007	Bagian Keuangan
121.	Nomor 27 Tahun 2007 Tgl. 19 September 2007	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2008	
122.	Nomor 28 Tahun 2007 Tgl. 10 Oktober 2007	Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Barang Lompo	
123.	Nomor 29 Tahun 2007 Tgl. 23 Oktober 2007	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Makassar Tahun Anggaran 2007	
124.	Nomor 30 Tahun 2007 Tgl. 23 Oktober 2007	Pedoman Pemberian Kode Jabatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar	
125.	Nomor 31 Tahun 2007 Tgl. 24 Oktober 2007	Tugas Pokok dan Fungsi Direktur, Wakil Direktur, Sub Bagian dan Sub Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar	
126.	Nomor 32 Tahun 2007 Tgl. 25 Oktober 2007	Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian dan Sub Bidang pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Makassar	
127.	Nomor 33 Tahun 2007 Tgl. 26 Oktober 2007	Surat Tanda Nomor Layar, Pas Kecil dan Sertifikat Kesempurnaan Kapal Berukuran Isi Kotor Lebih Kecil dari 7 Gros Tanse (GT)	
128.	Nomor 34 Tahun 2007 Tgl. 26 Oktober 2007	Tugas dan Fungsi Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar	
129.	Nomor 35 Tahun 2007 Tgl. 26 Oktober 2007	Tugas dan Fungsi Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Makassar	
130.	Nomor 36 Tahun 2007 Tgl. 26 Oktober 2007	Tugas dan Fungsi Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Pada Dinas Koperasi Menengah Kota Makassar	
131.	Nomor 37 Tahun 2007 Tgl. 26 Oktober 2007	Tugas dan Fungsi Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang pada Badan	

		Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Makassar	
132.	Nomor 3 Tahun 2007 Tgl. 26 Oktober 2007	Tugas dan Fungsi Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Pada Badan Keluarga Berencana (KB) Kota Makassar	
133.	Nomor 39 Tahun 2007 Tgl. 28 Desember 2007	Tugas dan Fungsi Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Makassar	
134.	Nomor 40 Tahun 2007 Tgl. 28 Desember 2007	Bentuk dan Tata Cara Penerbitan Surat pemberitahuan, Surat Keterangan dan Surat Tagihan serta Surat Setoran Pajak Restoran	
135.	Nomor 41 Tahun 2007 Tgl. 28 Desember 2007	Bentuk dan Tata Cara Penerbitan Surat pemberitahuan, Surat Keterangan dan Surat Tagihan serta Surat Setoran Pajak Hotel	
136.	Nomor 42 Tahun 2007 Tgl. 28 Desember 2007	Bentuk dan Tata Cara Penerbitan Surat pemberitahuan, Surat Keterangan dan Surat Tagihan serta Surat Setoran Pajak Hiburan	
137.	Nomor 43 Tahun 2007 Tgl. 28 Desember 2007	Bentuk dan Tata Cara Penerbitan Surat pemberitahuan, Surat Keterangan dan Surat Tagihan serta Surat Setoran Pajak Reklame	
138.	Nomor 1 Tahun 2008 Tgl. 17 Januari 2008	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar T.A. 2008	
139.	Nomor 2 Tahun 2008 Tgl. 4 Pebruari 2008	Jenis dan Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar	
140.	Nomor 3 Tahun 2008 Tgl. 19 Maret 2008	Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Kota Makassar	
141.	Nomor 4 Tahun 2008 Tgl. 24 April 2008	Pengaturan Pergerakan Kendaraan Bermotor di Jl Sungai Saddang Baru, Jl. Rappocini Raya dan Jl. Landak Baru	
142.	Nomor 5 Tahun 2008 Tgl. 27 Mei 2008	Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Makassar	
143.	Nomor 6 Tahun 2008 Tgl. 27 Mei 2008	Ketentuan Perincian Bidan Kesehatan	
144.	Nomor 7 Tahun 2008	Penyesuaian Tarif Angkutan Umum Jenis	

	Tgl. 16 Juni 2008	Mikrolet OMBUDSMAN Kota Makassar	
145.	Nomor 8 Tahun 2008 Tgl. 18 Juni 2008	Garis Sempadan dan Fungsi Bangunan Gedung pada Masing-Masing Ruas Jalan di Kota Makassar	
146.	Nomor 9 Tahun 2008 Tgl. 18 Juni 2008	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar 2009	
147.	Nomor 10 Tahun 2008 Tgl. 20 Juni 2008	Pedoman Pengelolaan Infrastruktur	
148.	Nomor 11 Tahun 2008 Tgl. 24 Juni 2008	Ketentuan Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Panitia Pemerintah Kota Makassar	
149.	Nomor 12 Tahun 2008 Tgl. 24 Juni 2008	Penetapan Indeks Dasar Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dalam Wilayah Kota Makassar	
150.	Nomor 13 Tahun 2008 Tgl. 2 Juli 2008	Perubahanan Peraturan WaliKota Makassar Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Makassar Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Pemerintah Kota Makassar	

Tabel 2. b

Daftar Peraturan WaliKota yang disahkan Tahun 2009–sekarang

No.	Nomor Peraturan WaliKota dan Tanggal ditetapkan	Tentang	Ket
1.	Nomor 19 Tahun 2009 Tgl. 16 Juni 2009	Perubahanan Atas Peraturan WaliKota Makassar Nomor 1 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar	

2.	Nomor 22 Tahun 2009 Tgl. 13 Juli 2009	Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Sekretariat Daerah Kota Makassar	
3.	Nomor 23 Tahun 2009 Tgl. 13 Juli 2009	Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar	
4.	Nomor 24 Tahun 2009 Tgl. 13 Juli 2009	Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan Kota Makassar	
5.	Nomor 25 Tahun 2009 Tgl. 13 Juli 2009	Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Kesehatan Kota Makassar	
6.	Nomor 26 Tahun 2009 Tgl. 13 Juli 2009	Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar	
7.	Nomor 27 Tahun 2009 Tgl. 13 Juli 2009	Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar	
8.	Nomor 28 Tahun 2009 Tgl. 13 Juli 2009	Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Makassar	
9.	Nomor 29 Tahun 2009 Tgl. 13 Juli 2009	Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar	
10.	Nomor 30 Tahun 2009 Tgl. 13 Juli 2009	Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar	
11.	Nomor 31 Tahun 2009 Tgl. 13 Juli 2009	Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar	
12.	Nomor 32 Tahun 2009 Tgl. 13 Juli 2009	Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Perhubungan Kota Makassar	
13.	Nomor 33 Tahun 2009 Tgl. 13 Juli 2009	Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Makassar	
14.	Nomor 34 Tahun 2009 Tgl. 13 Juli 2009	Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Sosial Kota Makassar	
15.	Nomor 35 Tahun 2009 Tgl. 13 Juli 2009	Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Makassar	
16.	Nomor 36 Tahun 2009 Tgl. 13 Juli 2009	Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian Kota	

		Makassar	
17.	Nomor 37 Tahun 2009 Tgl. 13 Juli 2009	Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Makassar	
18.	Nomor 38 Tahun 2009 Tgl. 13 Juli 2009	Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pertamanan dan Kebersihan	
19.	Nomor 39 Tahun 2009 Tgl. 13 Juli 2009	Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Makassar	
20.	Nomor 40 Tahun 2009 Tgl. 13 Juli 2009	Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar	
21.	Nomor 41 Tahun 2009 Tgl. 13 Juli 2009	Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Inspektorat Kota Makassar	
22.	Nomor 42 Tahun 2009 Tgl. 13 Juli 2009	Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Makassar	
23.	Nomor 43 Tahun 2009 Tgl. 13 Juli 2009	Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Makassar	
24.	Nomor 44 Tahun 2009 Tgl. 13 Juli 2009	Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Makassar	
25.	Nomor 45 Tahun 2009 Tgl. 13 Juli 2009	Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Makassar	
26.	Nomor 46 Tahun 2009 Tgl. 13 Juli 2009	Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Keluarga Berencana (KB) Kota Makassar	
27.	Nomor 47 Tahun 2009 Tgl. 13 Juli 2009	Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Lingkungan Hidup Kota Makassar	
28.	Nomor 48 Tahun 2009 Tgl. 13 Juli 2009	Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar	
29.	Nomor 49 Tahun 2009 Tgl. 13 Juli 2009	Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kantor Arsip, Perpustakaan dan Pengolahan	

		Data Kota Makassar	
30.	Nomor 50 Tahun 2009 Tgl. 13 Juli 2009	Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Makassar	
31.	Nomor 51 Tahun 2009 Tgl. 13 Juli 2009	Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kantor Ketahanan Pangan Kota Makassar	
32.	Nomor 52 Tahun 2009 Tgl. 13 Juli 2009	Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kantor Pemberdayaan Perempuan Kota Makassar	
33.	Nomor 53 Tahun 2009 Tgl. 13 Juli 2009	Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar	
34.	Nomor 54 Tahun 2009 Tgl. 13 Juli 2009	Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar	
35.	Nomor 55 Tahun 2009 Tgl. 13 Juli 2009	Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Pelaksana Harian (LAKHAR) Badan Narkotika Kota Makassar	
36.	Nomor 56 Tahun 2009 Tgl. 13 Juli 2009	Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Sekretariat KORPRI Kota Makassar	
37.	Nomor 57 Tahun 2009 Tgl. 13 Juli 2009	Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan Kota Makassar	
38.	Nomor 58 Tahun 2009 Tgl. 13 Juli 2009	Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kelurahan Kota Makassar	
39.	Nomor 59 Tahun 2009 Tgl. 13 Juli 2009	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	
40.	Nomor 60 Tahun 2009 Tgl. 31 Juli 2009	Penyelenggaraan Kota Sehat	
41.	Nomor 61 Tahun 2009 Tgl. 14 Agustus 2009	Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik di Lingkup Pemerintah Kota Makassar	
42.	Nomor 62 Tahun 2009 Tgl. 14 Agustus 2009	Pedoman Retribusi Pelayanan Jasa Persalinan Pada Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan dan Rumah Sakit Umum Daerah di Kota Makassar	

43.	Nomor 63 Tahun 2009 Tgl. 14 Agustus 2009	Pelayanan Bantuan Hukum Kepada Penduduk Tidak Mampu	
44.	Nomor 64 Tahun 2009 Tgl. 14 Agustus 2009	Pembebasan Retribusi Pelayanan Pemakaman/Pengabuan Mayat	
45.	Nomor 65 Tahun 2009 Tgl. 14 Agustus 2009	Pembebasan Retribusi Penggantian Biaya Cetak KK, KTP dan Akta Kelurahan di Kota Makassar	
46.	Nomor 66 Tahun 2009 Tgl. 24 Agustus 2009	Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar	
47.	Nomor 67 Tahun 2009 Tgl. 28 Agustus 2009	Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar T.A. 2008	
48.	Nomor 69 Tahun 2009 Tgl. 31 Agustus 2009	Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Makassar	
49.	Nomor 72 Tahun 2009 Tgl. 10 September 2009	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahanan Kota Makassar	
50.	Nomor 73 Tahun 2009 Tgl. 14 September 2009	Penggunaan Pakaian Seragam Sutra Khas Bugis Makassar pada Pegawai Dinas Pariwisata Kota Makassar	
51.	Nomor 74 Tahun 2009 Tgl. 17 September 2009	Standar Biaya Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kota Makassar T.A. 2010	
52.	Nomor 75 Tahun 2009 Tgl. 18 September 2009	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2010	
53.	Nomor 76 Tahun 2009 Tgl. 18 September 2009	Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pendidikan Kota Makassar	
54.	Nomor 77 Tahun 2009 Tgl. 18 September 2009	Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Badan Keluarga Berencana Kota Makassar	
55.	Nomor 78 Tahun 2009 Tgl. 18 September 2009	Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)	

		pada Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan Kota Makassar	
56.	Nomor 79 Tahun 2009 Tgl. 18 September 2009	Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kesehatan Kota Makassar	
57.	Nomor 80 Tahun 2009 Tgl. 18 September 2009	Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar	
58.	Nomor 81 Tahun 2009 Tgl. 18 September 2009	Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Perhubungan Kota Makassar	
59.	Nomor 82 Tahun 2009 Tgl. 18 September 2009	Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Sosial Kota Makassar	
60.	Nomor 83 Tahun 2009 Tgl. 18 September 2009	Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar	
61.	Nomor 84 Tahun 2009 Tgl. 18 September 2009	Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Makassar	
62.	Nomor 85 Tahun 2009 Tgl. 18 September 2009	Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar	
63.	Nomor 92 Tahun 2009 Tgl. 25 Oktober 2009	Uraian Tugas Staf Ahli Wali Kota Makassar	
64.	Nomor 93 Tahun 2009 Tgl. 25 Nopember 2009	Pengelompokan Koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Menurut Fungsi Asisten Sekretariat Daerah Kota Makassar	
65.	Nomor 95 Tahun 2009 Tgl. 25 Nopember 2009	Rencana Strategi (Renstra) SKPD Dinas Pendidikan Kota Makassar	
66.	Nomor 96 Tahun 2009 Tgl. 25 Nopember 2009	Rencana Strategi (Renstra) SKPD Dinas Kesehatan Kota Makassar	

67.	Nomor 97 Tahun 2009 Tgl. 25 Nopember 2009	Rencana Strategi (Renstra) SKPD Dinas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Daya Kota Makassar	
68.	Nomor 98 Tahun 2009 Tgl. 25 Nopember 2009	Rencana Strategi (Renstra) SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar	
69.	Nomor 99 Tahun 2009 Tgl. 25 Nopember 2009	Rencana Strategi (Renstra) SKPD Dinas Pemadam Kebakaran dan penanggulangan Bencana Kota Makassar	
70.	Nomor 100 Tahun 2009 Tgl. 25 Nopember 2009	Rencana Strategi (Renstra) SKPD Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar	
71.	Nomor 101 Tahun 2009 Tgl. 25 Nopember 2009	Rencana Strategi (Renstra) SKPD Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Makassar	
72.	Nomor 102 Tahun 2009 Tgl. 25 Nopember 2009	Rencana Strategi (Renstra) SKPD Dinas Perhubungan Kota Makassar	
73.	Nomor 103 Tahun 2009 Tgl. 25 Nopember 2009	Rencana Strategi (Renstra) SKPD Dinas Pertamanan dan Keindahan Kota Makassar	
74.	Nomor 104 Tahun 2009 Tgl. 25 Nopember 2009	Rencana Strategi (Renstra) SKPD Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar	
75.	Nomor 105 Tahun 2009 Tgl. 25 Nopember 2009	Rencana Strategi (Renstra) SKPD Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar	
76.	Nomor 106 Tahun 2009 Tgl. 25 Nopember 2009	Rencana Strategi (Renstra) SKPD Kantor Pemberdayaan Perenpuan Kota Makassar	
77.	Nomor 107 Tahun 2009 Tgl. 25 Nopember 2009	Rencana Strategi (Renstra) SKPD Badan Keluarga Berencana Kota Makassar	
78.	Nomor 108 Tahun 2009 Tgl. 25 Nopember 2009	Rencana Strategi (Renstra) SKPD Dinas Sosial Kota Makassar	
79.	Nomor 109 Tahun 2009 Tgl. 25 Nopember 2009	Rencana Strategi (Renstra) SKPD Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar	
80.	Nomor 110 Tahun 2009 Tgl. 25 Nopember 2009	Rencana Strategi (Renstra) SKPD Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Makassar	

81.	Nomor 111 Tahun 2009 Tgl. 25 Nopember 2009	Rencana Strategi (Renstra) SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Makassar	
82.	Nomor 112 Tahun 2009 Tgl. 25 Nopember 2009	Rencana Strategi (Renstra) SKPD Dinas Pemuda dan Olah raga Kota Makassar	
83.	Nomor 113 Tahun 2009 Tgl. 25 Nopember 2009	Rencana Strategi (Renstra) SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar	
84.	Nomor 114 Tahun 2009 Tgl. 25 Nopember 2009	Rencana Strategi (Renstra) SKPD Kantor Kesatuan Bangsa Kota Makassar	
85.	Nomor 115 Tahun 2009 Tgl. 25 Nopember 2009	Rencana Strategi (Renstra) SKPD Sekretariat Daerah Kota Makassar	
86.	Nomor 116 Tahun 2009 Tgl. 25 Nopember 2009	Rencana Strategi (Renstra) SKPD Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar	
87.	Nomor 117 Tahun 2009 Tgl. 25 Nopember 2009	Rencana Strategi (Renstra) SKPD Badan Pendidikan dan Pelatihan Kota Makassar	
88.	Nomor 118 Tahun 2009 Tgl. 25 Nopember 2009	Rencana Strategi (Renstra) SKPD Badan Kepegawaian Daerah Kota Makassar	
89.	Nomor 119 Tahun 2009 Tgl. 25 Nopember 2009	Rencana Strategi (Renstra) SKPD Inspektorat Kota Makassar	
90.	Nomor 120 Tahun 2009 Tgl. 25 Nopember 2009	Rencana Strategi (Renstra) SKPD Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar	
91.	Nomor 121 Tahun 2009 Tgl. 25 Nopember 2009	Rencana Strategi (Renstra) SKPD Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar	
92.	Nomor 122 Tahun 2009 Tgl. 25 Nopember 2009	Rencana Strategi (Renstra) SKPD Pelaksana Harian (LAKHAR) Badan Narkotika Kota Makassar	
93.	Nomor 123 Tahun 2009 Tgl. 25 Nopember 2009	Rencana Strategi (Renstra) SKPD Sekretariat KORPRI Kota Makassar	
94.	Nomor 124 Tahun 2009 Tgl. 25 Nopember 2009	Rencana Strategi (Renstra) SKPD Kecamatan Bontoala	
95.	Nomor 125 Tahun 2009	Rencana Strategi (Renstra) SKPD	

	Tgl. 25 Nopember 2009	Kecamatan Biringkanaya	
96.	Nomor 126 Tahun 2009 Tgl. 25 Nopember 2009	Rencana Strategi (Renstra) SKPD Kecamatan Makassar	
97.	Nomor 127 Tahun 2009 Tgl. 25 Nopember 2009	Rencana Strategi (Renstra) SKPD Kecamatan Mamajang	
98.	Nomor 127 Tahun 2009 Tgl. 25 Nopember 2009	Rencana Strategi (Renstra) SKPD Kecamatan Mariso	
99.	Nomor 129 Tahun 2009 Tgl. 25 Nopember 2009	Rencana Strategi (Renstra) SKPD Kecamatan Panakkukang	
100.	Nomor 130 Tahun 2009 Tgl. 25 Nopember 2009	Rencana Strategi (Renstra) SKPD Kecamatan Manggala	
101.	Nomor 131 Tahun 2009 Tgl. 25 Nopember 2009	Rencana Strategi (Renstra) SKPD Kecamatan Rappocini	
102.	Nomor 132 Tahun 2009 Tgl. 25 Nopember 2009	Rencana Strategi (Renstra) SKPD Kecamatan Tamalanrea	
103.	Nomor 134 Tahun 2009 Tgl. 25 Nopember 2009	Rencana Strategi (Renstra) SKPD Kecamatan Tallo	
104.	Nomor 135 Tahun 2009 Tgl. 25 Nopember 2009	Rencana Strategi (Renstra) SKPD Kecamatan Tamalate	
105.	Nomor 135 Tahun 2009 Tgl. 25 Nopember 2009	Rencana Strategi (Renstra) SKPD Kecamatan Ujung Pandang	
106.	Nomor 136 Tahun 2009 Tgl. 25 Nopember 2009	Rencana Strategi (Renstra) SKPD Kecamatan Ujung Tanah	
107.	Nomor 137 Tahun 2009 Tgl. 25 Nopember 2009	Rencana Strategi (Renstra) SKPD Kecamatan Wajo	
108.	Nomor 138 Tahun 2009 Tgl. 25 Nopember 2009	Rencana Strategi (Renstra) SKPD Kantor Ketahanan Pangan Kota Makassar	
109.	Nomor 139 Tahun 2009 Tgl. 25 Nopember 2009	Rencana Strategi (Renstra) SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar	
110.	Nomor 140 Tahun 2009 Tgl. 25 Nopember 2009	Rencana Strategi (Renstra) SKPD Kantor Arsip, Perpustakaan dan Pengolahan Data	

		Kota Makassar	
111.	Nomor 141 Tahun 2009 Tgl. 25 Nopember 2009	Rencana Strategi (Renstra) SKPD Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Makassar	
112.	Nomor 142 Tahun 2009 Tgl. 25 Nopember 2009	Rencana Strategi (Renstra) SKPD Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan Kota Makassar	
113.	Nomor 143 Tahun 2009 Tgl. 25 Nopember 2009	Rencana Strategi (Renstra) SKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Makassar	
114.	Nomor 145 Tahun 2009 Tgl. 16 Desember 2009	Penetapan Kawasan Percontohan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcar-Lantas) Kota Makassar	
115.	Nomor 146 Tahun 2009 Tgl. 22 Desember 2009	Penetapan Tambahan Modal Pemerintah Kota Makassar pada Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan Kota Makassar	
116.	Nomor 147 Tahun 2009 Tgl. 31 Desember 2009	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar Tahun Anggaran 2010	
117.	Nomor 148 Tahun 2009 Tgl. 31 Desember 2009	Pengelompokan Koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Menurut Fungsi Asisten Sekretariat Daerah Kota Makassar	
118.	Nomor 149 Tahun 2009 Tgl. 31 Desember 2009	Koordinasi Berjenjang	
119.	Nomor 150 Tahun 2009 Tgl. 31 Desember 2009	Kode Etik Pegawai Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar	
120.	Nomor 1 Tahun 2010 Tgl. 4 Januari 2010	Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Catatan Sipil Di Kota Makassar	
121.	Nomor 2 Tahun 2010 Tgl. 25 Januari 2010	Pengaturan Pemasangan Reklame, Atribut Partai Politik Dalam Kota Makassar	
122.	Nomor 3 Tahun 2010	Pelaksanaan Pemungutan Retribusi	

	Tgl. 25 Januari 2010	Pelayanan Persampahan dan Kebersihan Di Kota Makassar	
123.	Nomor 4 Tahun 2010 Tgl. 15 Pebruari 2010	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Berjenjang dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar Perubahan Atas Peraturan WaliKota Makassar Nomor 147 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2010	
124.	Nomor 5 Tahun 2010 Tgl. 15 Pebruari 2010	Mekanisme Penyusunan Program Penyuluhan Pangan dan Pertanian Pada Pemerintah Kota Makassar	
125.	Nomor 6 Tahun 2010 Tgl.	Badan PerTimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pemerintah Kota Makassar	
126.	Nomor 7 Tahun 2010 Tgl. 17 Pebruari 2010	Petunjuk Pelaksanaan Penyerahan Hasil Pekerjaan Pada Lingkup Pemerintah Kota Makassar	
127.	Nomor 8 Tahun 2010 Tgl. 23 Pebruari 2010	Ketentuan Pemasangan dan Registrasi Reklame Di Atas Tanah Dan Atau Bangunan Yang dikuasai Pemerintah Kota Makassar	
128.	Nomor 9 Tahun 2010 Tgl. 23 Pebruari 2010	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan di Kota Makassar	
129.	Nomor 10 Tahun 2010 Tgl. 19 April 2010	Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Hibah	
130.	Nomor 11 Tahun 2010 Tgl. 3 Mei 2010	Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial	
131.	Nomor 12 Tahun 2010 Tgl. 3 Mei 2010	Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	
132.	Nomor 13 Tahun 2010 Tgl. 3 Mei 2010	Klinik Bisnis Terpadu Kota Makassar	
133.	Nomor 14 Tahun 2010	Tata Naskah Dinas Di Lingkungan	

	Tgl. 4 Mei 2010	Pemerintah Kota Makassar	
134.	Nomor 15 Tahun 2010 Tgl. 5 Mei 2010	Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2011	
135.	Nomor 16 Tahun 2010 Tgl. 7 Juni 2010	Perubahanan Kedua Peraturan WaliKota Makassar Nomor 147 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009	
	Nomor 17 Tahun 2010 Tgl. 7 Juni 2010	Penyesuaian Tarif Jasa Perparkiran Dalam Kota Makassar	
136.	Nomor 18 Tahun 2010 Tgl. 8 Juni 2010	Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar	
137.	Nomor 19 Tahun 2010 Tgl. 25 Juni 2010	Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Kota Makassar	
138.	Nomor 20 Tahun 2010 Tgl. 14 Juli 2010	Lembaga Pemantau Independen Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kota Makassar	
139.	Nomor 21 Tahun 2010 Tgl. 21 Juli 2010	Tata Cara Pembukaan dan Pengoperasian Rekening Kas Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar	
140.	Nomor 22 Tahun 2010 Tgl. 4 Agustus 2010	Perubahanan Ketiga Atas Peraturan WaliKota Makassar Nomor 147 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2010	
141.	Nomor 23 Tahun 2010 Tgl. 5 Agustus 2010	Penyelenggaraan Angkutan Bebas Biaya (Gratis) Bagi Anak Sekolah Dalam Wiyah Kota Makassar	
142.	Nomor 24 Tahun 2010 Tgl. 11 Agustus 2010	Pemberian Tambahan Penghasilan Dalam Bentuk Tunjangan Kesejahteraan Kepada Penasehat WaliKota, Tenaga Kontrak, Penjaga Kontainer, Petugas Kebersihan, dan Kurator Museum Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar	
143.	Nomor 25 Tahun 2010 Tgl. 24 Agustus 2010	Perubahanan Atas Peraturan WaliKota Makassar Nomor 10 Tahun 2010 tentang	

		Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan Di Kota Makassar	
144.	Nomor 26 Tahun 2010 Tgl. 24 Agustus 2010	Petunjuk Teknis Penggunaan Iuran Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. ASKES dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Puskesmas Perawatan, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, dan Pos Kesehatan Kota Makassar	
145.	Nomor 27 Tahun 2010 Tgl. 24 Agustus 2010	Standar Biaya Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA - SKPD) Kota Makassar Tahun Anggaran 2011	
146.	Nomor 28 Tahun 2010 Tgl. 26 Agustus 2010	Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009	
147.	Nomor 29 Tahun 2010 Tgl. 28 September 2010	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2009	
148.	Nomor 30 Tahun 2010 Tgl. 6 Oktober 2010	Tata Cara Pelaksanaan Penjualan Kendaraan Dinas Milik Daerah	
149.	Nomor 31 Tahun 2010 Tgl. 7 Oktober 2010	Prosedur Penertiban Hewan ternak Dalam Kota Makassar	
150.	Nomor 32 Tahun 2010 Tgl. 2010	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar	
151.	Nomor 33 Tahun 2010 Tgl. 3 Nopember 2010	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Makassar Tahun Anggaran 2010	
152.	Nomor 36 Tahun 2010 Tgl. 11 Nopember 2010	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup	
153.	Nomor 37 Tahun 2010 Tgl. 1 Desember 2010	Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas Kapasa pada Dinas Kesehatan Kota Makassar	

154.	Nomor 38 Tahun 2010 Tgl. 13 Desember 2010	Standar Pelayanan Minimal Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Kota Makassar	
155.	Nomor 39 Tahun 2010 Tgl. 13 Desember 2010	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Makassar Tahun Anggaran 2011	
156.	Nomor 40 Tahun 2010 Tgl. 31 Desember 2010	Standarisasi Bahan Bakar Minyak Bagi Kendaraan Operasional dan Kendaraan Dinas Operasional Teknis / Khusus	
157.		Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan Kota Makassar	

BAB III

KEBIJAKAN, STRATEGI DAN DUKUNGAN APBD

A. Kebijakan Umum dan Khusus.

1. Kebijakan Umum

Kebijakan Umum merupakan kebijakan pemerintah daerah secara umum. Penyusunan Kebijakan Umum diperlukan untuk menyelaraskan perencanaan daerah dengan potensi sumber daya yang ada, sehingga akan terwujud pembangunan yang efisien, efektif dan berhasil guna. Kebijakan umum disusun sebagai bagian dari strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam mewujudkan Visi dan Misi daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, layanan publik dan daya saing sebagaimana amanat otonomi daerah, serta meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa dalam mewujudkan harmonisasi kehidupan serta mewujudkan supremasi hukum dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Rumusan visi Makassar 2014 sebagai bagian dari pencapaian visi jangka panjang sebagaimana yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005 – 2025, yakni **"Makassar sebagai kota Maritim, Niaga, Pendidikan, Budaya dan Jasa yang Berorientasi Global, Berwawasan Lingkungan dan Paling Bersahabat"** adalah bagian tidak terpisahkan / kelanjutan dari Visi Pemerintah Kota Makassar 2009 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 14 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Pemerintah Kota Makassar Tahun 2004-2009 yang disempurnakan dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2005-2010 yakni **"Makassar Kota Maritim, Niaga dan Pendidikan yang Bermartabat dan Manusiawi"** sehingga untuk menjamin konsistensi pembangunan jangka menengah dan jangka panjang dan agar dapat dipelihara kesinambungan arah pembangunan daerah dari waktu ke waktu, maka disusun Visi 2014 :

"Makassar Menuju Kota Dunia Berlandas Kearifan Lokal".

Visi ini terinspirasi dari dua hal mendasar:

Pertama, yakni jiwa dan semangat untuk memacu perkembangan Makassar agar lebih maju, terkemuka dan dapat menjadi kota yang diperhitungkan dalam pergaulan regional, nasional dan global.

Kedua, yakni jiwa dan semangat untuk tetap memelihara kekayaan kultural dan kejayaan Makassar yang telah dibangun sebelumnya, ditandai dengan keterbukaan untuk menerima perubahan dan perkembangan, sembari tidak meninggalkan nilai-nilai yang menjadi warisan sejarah masa lalu.

Pembangunan berkarakter yaitu pembangunan mesti bisa dipahami, memiliki bahasa publik, dapat dibaca, dapat dilakukan dan adalah sesuatu yang berbeda antara satu dengan yang ada pada umumnya yang sekaligus menggambarkan pelaku pembangunan itu sendiri, watak, perilaku individu yang merancang dan menangani pembangunan itu. Kriteria pembangunan berkarakter yaitu Perlakuan pembangunan sesuai kebutuhan, mengakselerasi

potensi local, fokus dan menyelesaikan masalah, integratif dan bersifat holistik, memiliki nilai pragmatis dan filosofis.

Penjabaran dari visi tersebut, dilakukan melalui 5 (lima) misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan warga kota yang sehat, cerdas, produktif, berdaya saing dan bermartabat;
2. Mewujudkan ruang kota yang ramah lingkungan;
3. Mewujudkan peran strategis Makassar dalam perekonomian domestik dan internasional;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas;
5. Mewujudkan kehidupan warga kota yang harmonis , dinamis , demokratis dan taat hukum.

Nilai-Nilai Dasar.

Agar pembangunan kota Makassar memiliki daya dan tepat guna bagi peningkatan kesejahteraan rakyat maupun kualitas lingkungan secara berkelanjutan, maka diperlukan kekuatan kultural, moral dan religiusitas berupa nilai-nilai yang ditumbuh kembangkan bersama. Nilai-nilai tersebut adalah:

1. Kemerdekaan.

Kemerdekaan bagi individu dan kelompok masyarakat untuk melakukan kreativitas pembangunan. Kemerdekaan tersebut harus dipertanggung jawabkan kepada kepentingan kolektif yang menjelma dalam bentuk peraturan yang bersifat legal formal, serta kepada norma-norma kesucilaan baik menurut pandangan budaya, maupun menurut tuntunan agama.

2. Kebersamaan.

Menjadikan perbedaan-perbedaan latar belakang sebagai mozaik yang mendesain kekayaan keberagaman warga Makassar. Pada banyak simpul-simpul kehidupan, dalam kedudukan bersama sebagai warga kota, terdapat persentuhan atau persinggungan maupun intergrasi. Simpul-simpul tersebut menjadi wilayah dimana kebersamaan tetap terpelihara dan ditumbuh kembangkan.

3. Saling Memanusiakan – Sipakatau.

Makassar adalah kota dimana hidup orang-orang yang secara individu dan sosial menghormati harkat dan martabat antara satu dengan yang lain, karena sadar sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki harkat dan martabat.

4. Saling Menghargai – Sipakalebbi.

Setiap orang dapat berbeda profesi dan kedudukan di dalam masyarakat, perbedaan tersebut tidak mengurangi rasa hormat dan saling menghargai antara satu dengan lainnya tanpa memandang latar belakang profesi dan kedudukan dalam masyarakat masing-masing.

5. Saling Mengingat – Sipakainge.

Sadar akan kodrat kemanusiaan sebagai warga kota yang dapat saja khilaf, lupa dan lalai, maka diperlukan sikap untuk saling mengingatkan dengan cara-cara yang elegan, dapat diterima sesuai batas nilai masyarakat beradab dan martabat.

6. Keterbukaan.

Agar proses pembangunan dapat menyertakan peranserta masyarakat secara luas, maka diperlukan keterbukaan dari tahap perencanaan hingga pengendalian pembangunan. Keterbukaan tersebut dikemas dalam kultur yang beradab dan dijiwai oleh semangat penegakan hukum.

7. Semangat Kejuangan.

Tantangan masa depan hendaknya dihadapi dengan semangat kejuangan yang teguh dan pantang menyerah, seperti yang tertera pada logo Kota Makassar yang bertuliskan "**Sekali Layar Terkembang Pantang Biduk Surut ke Pantai**".

2. Kebijakan Khusus

Untuk menopang upaya perwujudan misi yang telah dikemukakan, dilakukan melalui 5 (lima) arahan kebijakan khusus, sebagai berikut :

1. Penataan Peningkatan Kualitas Manusia.

Melalui kebijakan ini, pembangunan Makassar diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, peningkatan derajat kesehatan, pembentukan keluarga kecil bahagia dan sejahtera untuk menangani penduduk miskin, menekan angka pengangguran dan mendorong pemantapan pengamalan agama serta apresiasi budaya. Pengembangan kreativitas pemuda dan olah raga serta kesetaraan gender.

• Pendidikan Kualitas Pendidikan

Prioritas Arah Kebijakan :

- 1). Mengoptimalkan pembiayaan pendidikan baik bersumber dari APBN, APBD dan sumber pembiayaan lainnya;
- 2). Mengoptimalkan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dengan menaikkan APK 77,0% menjadi 90,50% APM dari 51,83% menjadi 75,00%;
- 3). Meningkatkan perluasan dan pemerataan pendidikan;
- 4). Meningkatkan mutu tenaga pendidik dan anak didik;
- 5). Meningkatkan perluasan pendidikan anak usia dini dalam rangka membina, menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi anak;
- 6). Menyelenggarakan pendidikan non formal yang bermutu;
- 7). Menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat;
- 8). Mengintensifkan pelaksanaan sosialisasi pentingnya pendidikan;
- 9). Mengembangkan kurikulum muatan lokal;
- 10). Meningkatkan jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan lainnya;
- 11). Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan.

12). Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik.

- **Peningkatan derajat kesehatan Masyarakat**

Prioritas Arah Kebijakan :

- 1) Peningkatan jumlah, jaringan dan kualitas puskesmas;
- 2) Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan;
- 3) Pengembangan sistem jaminan kesehatan terutama bagi penduduk miskin;
- 4) Peningkatan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat;
- 5) Peningkatan pendidikan kesehatan pada masyarakat sejak usia dini;
- 6) Pemerataan dan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan dasar;
- 7) Pembangunan kesehatan yang memprioritaskan upaya promotif dan preventif yang dipadukan secara seimbang dengan upaya kuratif dan rehabilitatif.

- **Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Budaya Dan Agama**

Prioritas Arah Kebijakan :

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- 2) Meningkatkan pemberdayaan fakir miskin, penyandang cacat, dan kelompok rentan sosial lainnya;
- 3) Meningkatkan aksesibilitas bagi PMKS terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik, dan jaminan kesejahteraan sosial;
- 4) Mengembangkan dan menyerasikan kebijakan untuk penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut masalah kesejahteraan sosial;
- 5) Memperkuat ketahanan sosial masyarakat berlandaskan prinsip kemitraan dan nilai-nilai sosial budaya daerah;
- 6) Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial dalam mendayagunakan sumber-sumber kesejahteraan sosial;
- 7) Meningkatkan pelayanan bagi korban bencana alam dan sosial;
- 8) Meningkatkan prakarsa dan peran aktif masyarakat termasuk masyarakat mampu, dunia usaha, perguruan tinggi, dan Orsos/LSM dalam pembangunan kesejahteraan sosial secara terpadu dan berkelanjutan;
- 9) Meningkatnya pembinaan mental dan spritual masyarakat.

- **Pembinaan Pemuda dan Olahraga**

Prioritas Arah Kebijakan :

- 1) Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama;
- 2) Meningkatkan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan dan kepemimpinan dalam pembangunan;

- 3) Melindungi segenap generasi muda dari bahaya penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual di kalangan pemuda;
- 4) Mengembangkan kebijakan dan manajemen olahraga dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan;
- 5) Meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat secara lebih luas dan merata untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani;
- 6) Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga;
- 7) Meningkatkan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematis, berjenjang dan berkelanjutan;
- 8) Meningkatkan pola kemitraan dan kewirausahaan dalam upaya menggali potensi ekonomi olahraga melalui pengembangan industri olahraga;
- 9) Mengembangkan sistem penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih, dan tenaga keolahragaan.

- **Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Dan Kesetaraan Gender**

Prioritas Arah Kebijakan :

- 1) Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik;
- 2) Meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan serta bidang pembangunan lainnya, untuk mempertinggi kualitas hidup dan sumberdaya kaum perempuan;
- 3) Meningkatkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 4) Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak.

B. Pengembangan Tata Ruang dan Lingkungan.

Melalui kebijakan ini, pembangunan Makassar diarahkan untuk memantapkan pemanfaatan ruang wilayah darat, laut dan udara. Demikian juga, dimaksudkan agar pembangunan wilayah darat, laut dan udara bisa memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi warga kota dengan mengedepankan kenyamanan dan ketentraman melalui pembangunan kota sejuta pohon, bebas pencemaran.

Prioritas Arah Kebijakan :

- 1) Penyelesaian penyempurnaan Peraturan Daerah tentang RTRW.
- 2) Pengembangan kawasan dan penataan ruang Kota yang terpadu;
- 3) Mengelola pemanfaatan ruang laut, udara dan darat dengan benar;
- 4) Meningkatkan koordinasi penataan dan pemanfaatan ruang;
- 5) Meningkatkan kapasitas lembaga pengelola pemanfaatan dan penataan ruang kota;

- 6) Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya;
- 7) Meningkatkan luas daerah yang aman terhadap kebakaran dan banjir;
- 8) Meningkatkan daya jangkau penyebaran data dan informasi tentang RTRW Kota.

- **Pembangunan Infrastruktur Kota**

Prioritas Arah Kebijakan :

- 1) Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur kota;
- 2) Pengelolaan sumberdaya air diarahkan pada upaya konservasi dan pendayagunaan air permukaan dan air tanah;
- 3) Pengelolaan demand dan supply;
- 4) Pemenuhan kepentingan jangka pendek dan kepentingan jangka panjang.

- **Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Prioritas Arah Kebijakan :

- 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memelihara Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan hidup didasarkan pada agenda 21 (nasional dan global) dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan nasional yang berkelanjutan (*sustainable development*);
- 2) Pengembangan kawasan dan penataan ruang Kota yang terpadu;
- 3) Mengelola dan mendayagunakan potensi sumberdaya laut, pesisir dan pulau secara lestari berbasis masyarakat;
- 4) Membangun sistem pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan sumberdaya laut dan pesisir;
- 5) Meningkatkan upaya konservasi laut, pesisir dan pulau;
- 6) Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di wilayah pesisir, laut, pulau dan perairan tawar;
- 7) Mengembangkan upaya mitigasi lingkungan laut dan pesisir, meningkatkan keselamatan bekerja, dan meminimalkan resiko terhadap bencana alam laut bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau;
- 8) Menggiatkan kemitraan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sumberdaya laut, pesisir, dan pulau;
- 9) Mengarusutamakan (*mainstreaming*) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke seluruh bidang pembangunan;
- 10) Meningkatkan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup;
- 11) Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan;

- 12) Meningkatkan kapasitas lembaga pengelola lingkungan hidup, terutama dalam menangani permasalahan yang bersifat akumulasi, fenomena alam yang bersifat musiman dan bencana;
- 13) Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup dan berperan aktif sebagai kontrol-sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup;
- 14) Ketersediaan lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah.

C. Penguatan Struktur Ekonomi.

Melalui kebijakan ini, pembangunan Makassar diarahkan untuk terciptanya struktur ekonomi yang kokoh pada semua sektor dengan memberi tekanan pada sektor andalan; perniagaan, jasa dan industri yang dapat memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat yang berimplikasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

- **Peningkatan Komiditi Unggulan**

Prioritas Arah Kebijakan :

- 1) Peningkatan pemanfaatan sumberdaya perikanan dalam mendukung ekonomi dan tetap menjaga kelestariannya;
- 2) Penguatan sistem pemasaran dan manajemen usaha untuk mengelola resiko usaha serta untuk mendukung pengembangan agroindustri;
- 3) Pengawasan dan pengendalian pemeriksaan kualitas Bahan Asal Hewan dan Nabati.

- **Peningkatan Ketahanan Ekonomi**

Prioritas Arah Kebijakan :

- 1) Memperkuat kelembagaan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan berwawasan gender;
- 2) Memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkan wirausaha baru berkeunggulan;
- 3) Mengembangkan UMKM untuk makin berperan sebagai penyedia barang dan jasa;
- 4) Membangun koperasi yang kuat dan tangguh.

- **Pengembangan Investasi dan Regulasi Usaha**

Prioritas Arah Kebijakan :

- 1) Mengurangi biaya transaksi dan praktik ekonomi biaya tinggi baik untuk tahapan memulai (*start up*) maupun tahapan operasi suatu bisnis;
- 2) Penuntasan deregulasi (pemangkasan birokrasi) peraturan dan prosedur perijinan dan pengembangan kapasitas lembaga publik pelaksananya;

- 3) Menata aturan main yang jelas dan pemangkasan birokrasi dalam prosedur perijinan dan pengelolaan usaha dengan prinsip transparansi dan tata pemerintahan yang baik;
- 4) Menjamin kepastian usaha dan meningkatkan penegakan hukum.

- **Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha**

Prioritas Arah Kebijakan :

- 1) Menciptakan kesempatan kerja melalui investasi;
- 2) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia;
- 3) Memperbarui program-program perluasan kesempatan kerja yang antara lain melalui kredit mikro, pengembangan UKM, serta program-program pengentasan kemiskinan;
- 4) Menyempurnakan kebijakan program pendukung pasar kerja dengan mendorong terbentuknya informasi pasar kerja.

D. Desentralisasi Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bebas Korupsi.

Melalui kebijakan ini, pembangunan Makassar diarahkan untuk memantapkan pelaksanaan Otonomi Daerah secara bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat melalui pelaksanaan pembangunan berbasis partisipasi masyarakat; meningkatkan pelayanan publik dalam berbagai dimensi pembangunan; meningkatkan profesionalisme aparatur dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui perencanaan program yang terarah dan terintegrasi, pelayanan berbasis teknologi informasi (online).

- **Peningkatan Kapasitas Kelembagaan**

Prioritas Arah Kebijakan :

- 1) Menata kelembagaan pemerintah daerah agar lebih proporsional berdasarkan kebutuhan nyata daerah;
- 2) Menyiapkan ketersediaan aparatur pemerintah daerah yang berkualitas secara proporsional sesuai bidang tugasnya;
- 3) Meningkatkan kapasitas keuangan pemerintah daerah, termasuk pengelolaan keuangan;
- 4) Penataan kelembagaan masyarakat sebagai mitra pemerintah pada semua jenjang pemerintahan.

- **Peningkatan Profesionalisme Aparatur**

Prioritas Arah Kebijakan :

- 1) Menata kelembagaan pemerintah daerah agar lebih proporsional berdasarkan kebutuhan nyata daerah;
- 2) Menyiapkan ketersediaan aparatur pemerintah daerah yang berkualitas secara proporsional sesuai bidang tugasnya;
- 3) Meningkatkan kapasitas keuangan pemerintah daerah, termasuk pengelolaan keuangan.

- **Pengelolaan Keuangan Daerah**

Prioritas Arah Kebijakan :

- 1) Meningkatkan kapasitas keuangan pemerintah daerah, termasuk pengelolaan keuangan;
- 2) Pemantapan pengelolaan keuangan daerah.

- **Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**

Prioritas Arah Kebijakan :

- 1) Menata kelembagaan pemerintah daerah agar lebih proporsional berdasarkan kebutuhan nyata daerah;
- 2) Menyiapkan ketersediaan aparatur pemerintah daerah yang berkualitas secara proporsional sesuai bidang tugasnya;
- 3) Meningkatkan kapasitas keuangan pemerintah daerah, termasuk pengelolaan keuangan;
- 4) Penataan kelembagaan masyarakat sebagai mitra pemerintah pada semua jenjang pemerintahan.

- **Peningkatan Kualitas Materi dan Penyebaran Informasi**

Prioritas Arah Kebijakan :

- 1) Meningkatkan pembinaan dan pengembangan informasi dan komunikasi;
- 2) Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dibidang informasi dan komunikasi;
- 3) Menyiapkan sarana dan prasarana untuk penyebaran informasi dan komunikasi.

E. Penegakan Hukum dan Hak Azasi Manusia.

Melalui kebijakan ini, pembangunan Makassar diarahkan untuk terciptanya masyarakat yang taat hukum , demokratis dan bebas KKN .

a) Pembinaan kehidupan politik yang demokratis

Prioritas Arah Kebijakan :

- 1). Memberdayakan organisasi-organisasi kemasyarakatan, sosial keagamaan, dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat dalam mencegah dan mengoreksi ketidakadilan, diskriminasi dan ketimpangan sosial;
- 2). Meningkatkan peran (wewenang) pemerintah sebagai fasilitator dan atau mediator yang kredibel dan adil dalam menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

b) Peningkatan Penegakan Hukum dan HAM

Prioritas Arah Kebijakan :

- 1). Meningkatkan upaya kemajuan, perlindungan, penegakan, pemenuhan dan penghormatan hak asasi manusia;
- 2). Menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil;

- 3). Menggunakan nilai-nilai budaya daerah sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan terciptanya kesadaran hukum masyarakat;
- 4). Meningkatkan kerjasama yang harmonis antara kelompok atau golongan dalam masyarakat, agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing;
- 5). Memperkuat dan melakukan konsolidasi demokrasi;
- 6). Meningkatkan sosialisasi hak konstitusional dan hak hukum.

c) Legislasi daerah

Prioritas Arah Kebijakan :

- 1). Mewujudkan pelembagaan demokrasi yang lebih kokoh;
- 2). Memperkuat peran masyarakat sipil (*civil society*);
- 3). Memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah;
- 4). Menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat.

F. Strategi Penerapan Setiap Kebijakan.

Kebijakan dan sasaran strategis Kota Makassar yang disinkronkan dengan lima (5) Kebijakan sebagai berikut :

1. Kebijakan Peningkatan Kualitas Manusia dengan sasaran prioritas :
 - a. Peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan adalah sekolah gratis atau bersubsidi penuh (SD, SLTP dan SLTA), pengembangan Sekolah Cerdas, Penerapan Standar Pelayanan Minimum Sekolah dan Perbaikan sarana dan prasarana sekolah.
 - b. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat adalah pelayanan kesehatan dasar gratis, penciptaan angka kematian Nol (Zero Maternal Death) bagi ibu melahirkan, pelayanan gratis bagi ibu melahirkan dan peningkatan gizi keluarga.
 - c. Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga adalah mengurangi jumlah penduduk miskin, pelayanan gratis untuk pengurusan jenazah sebelum dikebumikan kepada masyarakat yang kurang mampu, mengurangi pengangguran, serta pemberdayaan komunitas perempuan dan pemuda dan olahraga.
2. Kebijakan Pengembangan Tata Ruang dan Lingkungan dengan sasaran prioritas :
 - a. Pembangunan infrastruktur, pembangunan dan pemeliharaan jalan, drainase, trotoar, jembatan, daerah tangkapan air, ruang publik dan infrastruktur niaga dan jasa.
 - b. Pengadaan, pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana perhubungan serta peningkatan manajemen transportasi perkotaan yang mudah diakses dengan Sistem Jaringan Transportasi Terpadu termasuk pelayanan gratis angkutan anak sekolah

- c. Peningkatan dan pemeliharaan lingkungan perumahan, pemukiman dan penataan kawasan kumuh serta pelayanan gratis untuk angkutan jenazah dan pemakaman mayat
 - d. Pengelolaan lingkungan hidup, adalah pembangunan ruang terbuka hijau, pencegahan dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan.
3. Kebijakan Penguatan Struktur Ekonomi dengan sasaran prioritas :
- a. Penciptaan iklim investasi yang kondusif, adalah penyediaan sistem informasi yang memadai, peningkatan fasilitas kegiatan ekonomi masyarakat dan pelayanan dunia usaha berbasis Teknologi Informasi.
 - b. Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah pengembangan sentra industri rakyat, penerapan regulasi yang berpihak pada UMKM, pembinaan kelompok-kelompok usaha produktif dan pembentukan klinik bisnis kecamatan.
 - c. Peningkatan daya saing komoditi unggulan adalah pengembangan dan pemanfaatan potensi wilayah pantai, pesisir dan pulau, pembentukan kawasan niaga maritim, pengembangan teknologi pangan alternatif serta pendidikan dan pelatihan pengembangan komoditi unggulan.
 - d. Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha adalah pengembangan jaringan dan kerjasama pembiayaan usaha, peningkatan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat, peningkatan latihan dan kursus bagi pencari kerja serta peningkatan pola kemitraan pemerintah dengan pelaku usaha.
4. Kebijakan Desentralisasi Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bebas Korupsi dengan sasaran prioritas :
- a. Peningkatan Pelayanan Publik adalah, peningkatan pelayanan perizinan terpadu, pelayanan administrasi kependudukan dan akte catatan sipil gratis secara cermat dan akurat.
 - b. Peningkatan Profesionalisme Aparatur adalah penataan dan pemantapan akuntabilitas dan kinerja aparatur, transparansi pengelolaan kegiatan dan keuangan daerah dan peningkatan kapasitas aparatur.
 - c. Peningkatan Kapasitas Perencanaan dan pengendalian pembangunan adalah pelibatan multistakeholders dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
 - d. Penegakan Pakta Integritas di lingkungan pemerintahan adalah transparansi pengadaan barang dan jasa serta penegakan sanksi (*funishing*) atas pelanggaran peraturan yang berlaku serta penghargaan (*reward*) bagi aparat yang berprestasi.
 - e. Peningkatan Kualitas dan Jaringan Informasi adalah penggunaan Teknomogi Informasi (IT) secara terpadu untuk pelayanan publik dan kerjasama antar daerah serta pelaksanaan *Ombudsman*.
5. Kebijakan Penegakan Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan sasaran prioritas :

- a. Pembangunan Politik dan Kesadaran Berdemokrasi adalah pembinaan partai politik; peningkatan kesadaran berbangsa dan bernegara; serta membangun iklim demokrasi yang sehat
- b. Penegakan Hukum dan HAM, diantaranya adalah pemberdayaan masyarakat dalam pemahaman hukum dan HAM bersama lembaga dan aparat penegak hukum, peningkatan kesadaran hukum dalam bentuk pemberian bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat kurang mampu serta pemberantasan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) .
- c. Legislasi Daerah, diantaranya adalah pengembangan dan penyempurnaan materi peraturan daerah, sosialisasi dan verifikasi produk-produk perundang-undangan dan peningkatan koordinasi serta kerjasama dengan lembaga legislatif.

G. Dukungan APBD

Sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD Kota Makassar disusun dengan menggunakan sistem penganggaran terpadu (unified budget), yang mengintegrasikan antara anggaran berbasis kinerja (performance based budgeting), dengan kerangka program jangka menengah, dan standar akuntansi keuangan pemerintah.

Dengan sistem penganggaran terpadu yang berbasis kinerja telah mereformasi sistem anggaran yang selama ini menggunakan asas pendekatan pertumbuhan (incremental) semata dan line item budget, menjadi sistem penganggaran terpadu, yang bersifat adaptif dan aspiratif terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam program jangka menengah, serta transparan dan akuntabel, karena menggunakan standar akuntansi sektor publik dalam pelaporannya.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar, disusun dengan mengklasifikasikan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek belanja.

Melalui pendekatan ini, setiap program dan kegiatan yang dianggarkan harus menggambarkan dengan jelas tentang tolok ukur atau indikator sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja, memuat tentang standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan tentang biaya satuan perkomponen kegiatan, memuat penjelasan tentang hubungan antara bagian pendapatan yang membiayai Belanja Langsung dan Belanja Tidak langsung.

Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Masing-masing dari bagian APBD yang terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dapat dijelaskan sebagai berikut :

H. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun pada Tahun Anggaran 2005 diperoleh realisasi sebesar Rp. 607.905.070.288,98 sedangkan pada Tahun Anggaran **2010** diperoleh realisasi sebesar **Rp. 1.451.537.120.407,85**

atau meningkat sebesar **Rp. 843.632.050.118,87** atau **138,78%**, peningkatan tersebut didukung oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat kota Makassar. Penjelasan berdasarkan kelompok pendapatan dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Bagian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang secara keseluruhan untuk Tahun Anggaran 2005 mampu direalisasikan sebesar Rp. 99.841.782.817,98 jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pada Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 210.068.212.207,64 mengalami peningkatan sebesar Rp. 110.226.429.389,66 atau 110,40%.

Berikut ini akan digambarkan Pendapatan Asli Daerah dari Tahun Anggaran 2005 sampai dengan tahun anggaran 2010, sebagai berikut:

Table 11-Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2005 S/D Tahun Anggaran 2010

URAIAN	TAHUN ANGGARAN						SELISI H
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8 (2-7)
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	99,841,782,817.98	120,890,777,136.68	136,626,469,085.59	154,911,891,959.39	170,698,725,818.79	210,068,212,207.64	110,226,429,389.66
1.1 Pajak Daerah	63,113,534,206.00	77,878,472,788.00	85,996,524,046.00	98,318,693,736.00	15,223,338,976.00	133,508,755,341.00	70,395,221,135.00
1.2 Retribusi Daerah	31,496,669,939.47	37,066,083,922.47	37,972,419,441.05	40,966,229,794.00	39,980,839,820.00	59,727,754,725.43	28,231,084,785.96
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1,757,965,302.82	1,891,718,875.39	3,919,276,775.54	4,357,505,688.22	5,665,752,809.23	5,917,813,865.99	4,159,848,563.17
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3,473,613,369.69	4,054,501,550.82	8,738,248,823.00	11,269,462,741.17	9,828,794,213.56	10,913,888,275.22	7,440,274,905.53

2. Bagian Dana Perimbangan

Pendapatan yang berasal dari bagian Dana Perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus yang secara keseluruhan untuk Tahun Anggaran 2005 mampu direalisasikan sebesar Rp. 411.094.900.016,00 jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pada Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 861.280.547.227,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 450.185.647.211,00 atau 109,51%.

Berikut ini akan digambarkan Dana perimbangan dari Tahun Anggaran 2005 sampai dengan tahun anggaran 2010, sebagai berikut:

Table 12-Penerimaan Dana Perimbangan Pemerintah Kota Makassar

URAIAN	TAHUN ANGGARAN						SELISIH
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8 (2-7)
2 DANA PERIMBANGAN	411,094,900,016.00	619,958,299,314.00	701,452,339,401.00	789,251,884,195.00	833,834,215,606.00	861,280,547,227.00	450,185,647,211.00
2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	88,019,900,016.00	92,274,299,314.00	109,075,339,401.00	125,930,492,195.00	143,383,511,606.00	171,260,420,227.00	83,240,520,211.00
2.2 Dana Alokasi Umum	323,075,000,000.00	513,004,000,000.00	583,842,000,000.00	643,328,392,000.00	647,299,704,000.00	644,266,427,000.00	321,191,427,000.00
2.3 Dana Alokasi Khusus	-	14,680,000,000.00	8,535,000,000.00	19,993,000,000.00	43,151,000,000.00	45,753,700,000.00	45,753,700,000.00

3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah yang terdiri dari Hibah, Dana darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi dan Pemda Lainnya, Dana Penyesuaian serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya, secara keseluruhan untuk Tahun Anggaran 2005 mampu direalisasikan sebesar Rp. 96.968.387.455,00 jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pada Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 380.188.360.973,21 mengalami peningkatan sebesar Rp. 283.219.973.518,21 atau 292,07%.

Berikut ini akan digambarkan Lain-lain Pendapatan yang sah dari Tahun Anggaran 2005 sampai dengan tahun anggaran 2010, sebagai berikut:

Table 13-Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Pemerintah Kota Makassar

URAIAN	TAHUN ANGGARAN						SELISIH
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8 (2-7)
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	96,968,387,455.00	88,259,420,830.00	107,462,360,323.00	196,887,782,519.47	211,184,779,475.00	380,188,360,973.21	283,219,973,518.21
3.1 Hibah	1,650,000,000.00	4,300,000,000.00	5,417,387,480.00	3,087,582,000.00	1,559,018,800.00	2,593,035,300.00	943,035,300.00

3.2 Dana Darurat	-	-	-	3,000,000,000.00	-	100,000,000.00	100,000,000.00
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provi. dan Pemda lainnya	75,053,887,455.00	78,205,560,890.00	83,268,013,643.00	128,139,956,935.00	115,012,318,875.00	155,704,122,541.21	80,650,235,086.21
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	20,264,500,000.00	5,753,859,940.00	5,078,559,200.00	5,272,789,600.00	68,965,037,000.00	190,426,514,332.00	170,162,014,332.00
3.5 Bantuan Keuangan dari Prov. atau Pemda Lainnya	-	-	13,698,400,000.00	57,387,453,984.47	25,648,404,800.00	31,364,688,800.00	31,364,688,800.00

3.3.2. Belanja Daerah

Kondisi perekonomian negara yang menghadapi dampak dari krisis global juga berimbas kepada perekonomian daerah, menuntut daerah untuk lebih cermat dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas dengan lebih mempertajam skala prioritas. Tidak sedikit permasalahan dan kebutuhan yang harus ditangani dan diselesaikan secara paripurna namun karena diperhadapkan pada keterbatasan dana, menyebabkan kebutuhan dan masalah tersebut terpaksa hanya diselesaikan secara parsial dengan mempertimbangkan tingkat urgensi dan kondisi yang terjadi ditengah masyarakat.

Berkaitan dengan kebutuhan belanja yang cenderung meningkat yang belum dapat diimbangi dengan peningkatan sumber pendapatan yang memadai, maka diperlukan upaya-upaya yang mengarah pada peningkatan efektifitas dan efisiensi aparatur dan perangkat-perangkat daerah, pelibatan dan peningkatan partisipasi masyarakat melalui strategi :

- a. Menata sistem dan mekanisme kerja perangkat kota agar lebih responsif, akuntabel dan transparan sesuai dengan semangat dan jiwa otonomi dan desentralisasi
- b. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dan kemasyarakatan.
- c. Peningkatan pelayanan masyarakat di urusan pendidikan dan kesehatan.
- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan jaringan utililitas Kota sebagai pelayanan dasar bagi masyarakat kota dengan menyusun prioritas penanganannya (Infrastruktur)
- e. Memperkokoh sektor pertanian dan perkebunan sebagai sektor utama dalam struktur perekonomian yang mampu menyerap dan memperluas lapangan kerja
- f. Menciptakan suasana yang harmonis dan bersahabat yang berlandaskan nafas keagamaan demi terciptanya kerukunan hidup antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat

Strategi sebagaimana disebutkan diatas diharapkan dapat mencapai sasaran sebagai berikut :

- a. Tumbuh dan berkembangnya potensi sumber daya manusia, alam, buatan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mengelola dan menata kota agar dapat tumbuh dan berkembang dengan mengutamakan kelestarian lingkungan hidup.
- b. Terciptanya kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk membangun dan mendorong partisipasi dalam bidang pembangunan kota.
- c. Tersedianya fasilitas dan utilitas kota yang memenuhi kebutuhan minimal masyarakat.
- d. Meningkatnya kegiatan ekonomi perkotaan atas dukungan ketersediaan infra struktur.
- e. Penataan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan menyerasikan keseimbangan kota.
- f. Terciptanya peran agama sebagai landasan spiritual dan etika dalam membentuk teknologi struktur masyarakat serta mengutamakan kerukunan hidup antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat.

Belanja daerah akan dibagi kedalam dua kelompok belanja yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang secara keseluruhan untuk Tahun Anggaran 2005 mampu direalisasikan sebesar Rp. 584.186.553.428,51 jika dibandingkan dengan realisasi pengeluaran pada Tahun Anggran 2010 sebesar Rp.1.379.967.044.696,17 mengalami peningkatan sebesar Rp. 795.780.491.267,66 atau 136,22%.

Untuk Belanja Tidak Langsung terdiri dari 8 jenis belanja yaitu; belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten dan pemerintah desa, dan belanja tidak terduga. Sedangkan Belanja Langsung terdiri dari tiga jenis belanja yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Berikut ini akan digambarkan Belanja daerah dari Tahun Anggaran 2005 sampai dengan tahun anggaran 2010, sebagai berikut:

Table 14-Belanja Daerah Pemerintah Kota Makassar

URAIAN	TAHUN ANGGARAN						SELISIH
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8 (2-7)
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	339,514,825,287.47	408,281,370,089.36	453,560,827,553.28	623,097,146,238.00	616,029,846,808.01	732,613,162,933.67	393,098,337,646.20
5.1.1 Belanja Pegawai	307,382,582,051.00	363,669,404,414.00	405,682,099,083.00	527,116,004,935.00	574,126,173,031.00	678,333,932,314.00	370,951,350,263.00
5.1.2 Belanja Bunga	190,667,820.00	1,621,374,677.47	1,243,438,329.28	-	-	2,119,727,019.67	1,929,059,199.67
5.1.3 Belanja Subsidi	3,377,845,670.47	4,457,413,399.89	4,424,916,654.00	1,728,066,825.00	1,125,000,000.00	-	(3,377,845,670.47)
5.1.4 Belanja Hibah	17,493,350,000.00	22,744,760,645.00	3,500,000,000.00	61,598,935,217.00	23,304,715,000.00	25,175,607,000.00	7,682,257,000.00
5.1.5 Belanja Bantuan Sosial	11,070,379,746.00	15,788,416,953.00	38,710,373,487.00	32,654,139,261.00	17,473,958,777.01	26,232,596,600.00	15,162,216,854.00
5.1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kat	-	-	-	-	-	-	-
5.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Pro	-	-	-	-	-	-	-
5.1.8 Belanja tidak terduga	-	-	-	-	-	751,300,000.00	751,300,000.00
5.2 BELANJA LANGSUNG	244,671,728,141.04	400,461,047,350.65	421,324,390,024.40	516,896,296,267.22	625,013,421,844.00	647,353,881,762.50	402,682,153,621.46
5.2.1 Belanja Pegawai	12,296,449,009.50	18,990,719,557.00	85,359,361,697.00	96,017,620,764.00	126,383,772,185.00	139,261,995,930.00	126,965,516,020.50
5.2.2 Belanja Barang dan Jasa	169,198,613,941.00	255,150,566,084.65	196,024,572,009.00	236,173,194,110.75	301,449,071,321.00	329,417,215,928.50	160,218,601,987.50
5.2.3 Belanja Modal	63,176,665,190.54	126,329,761,709.00	139,940,456,318.40	185,705,181,402.47	197,180,578,338.00	178,674,669,904.00	115,498,004,713.46
5 BELANJA DAERAH	584,186,553,428.51	808,742,417,440.01	874,885,217,577.68	1,139,993,442,505.22	1,241,043,268,652.01	1,379,967,044,696.17	795,780,491,267.66

Table 15-Belanja Daerah Menurut Skpd

NO. URUT	URAIAN/UNIT KERJA	2007	2008	2009	2010	SELISIH'
1	2	3	4	5	6	7(6-3)
1	Dinas Pendidikan	299,092,132,154.00	384,835,851,243.00	455,944,642,930.00	541,649,962,691.00	541,649,962,691.00
2	Dinas Kesehatan	48,360,169,124.00	58,183,403,287.00	79,459,921,631.00	83,752,955,434.00	83,752,955,434.00
3	Rumah Sakit Umum Daya	4,087,398,095.00	8,751,813,783.00	18,133,656,040.00	20,481,907,567.50	20,481,907,567.50
4	Dinas Pekerjaan Umum	113,477,683,344.00	152,464,989,844.47	196,156,615,557.00	199,692,515,554.00	199,692,515,554.00
5	Dinas Pemadam Kebakaran dan P. Bencana	6,409,645,323.00	9,951,355,782.00	9,534,090,022.00	13,887,402,064.00	13,887,402,064.00
6	Dinas Tata Ruang dan Bangunan	5,196,657,937.00	6,208,420,405.00	6,650,936,062.00	7,313,034,047.00	7,313,034,047.00
7	BAPPEDA	15,274,228,898.00	13,927,068,619.00	14,644,080,056.00	14,789,219,739.00	14,789,219,739.00
8	Dinas Perhubungan	8,869,862,436.00	9,495,810,497.00	10,337,070,425.00	11,649,618,019.00	11,649,618,019.00
9	Dinas Pertamanan dan Kebersihan	21,262,871,395.00	46,834,480,496.00	29,927,208,888.00	33,755,590,846.00	33,755,590,846.00
10	Badan Lingkungan Hidup Daerah			1,624,540,152.00	3,746,208,467.00	3,746,208,467.00
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	6,900,267,813.00	8,530,713,259.00	9,383,250,394.00	10,217,373,092.00	10,217,373,092.00
12	Kantor Pemberdayaan Perempuan			665,921,475.00	1,990,694,586.00	1,990,694,586.00
13	Badan Keluarga Berencana		3,748,122,312.00	11,751,976,605.00	12,472,516,043.00	12,472,516,043.00
14	Dinas Sosial	4,598,992,844.40	6,236,562,807.00	6,695,175,928.00	6,366,492,487.00	6,366,492,487.00
15	Dinas Tenaga Kerja	3,095,528,462.00	3,497,012,463.00	3,730,694,614.00	4,918,040,973.00	4,918,040,973.00
16	Dinas Koperasi dan UKM		1,435,209,700.00	4,356,737,876.00	4,289,600,368.00	4,289,600,368.00
17	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	6,645,019,722.00	8,124,419,105.00	6,726,281,053.00	9,462,467,561.00	9,462,467,561.00
18	Dinas Pemuda dan Olahraga		3,053,203,800.00	5,506,133,882.00	5,049,352,724.00	5,049,352,724.00
19	Satuan Polisi Pamong Praja	4,977,605,234.00	6,477,307,860.00	6,812,904,755.00	7,809,688,810.00	7,809,688,810.00
20	Kantor Kesatuan Bangsa	3,992,226,375.00	2,372,452,634.00	2,705,377,474.00	2,658,051,897.00	2,658,051,897.00
21	DPRD	9,531,290,456.00	9,558,249,975.00	10,152,123,699.00	10,541,192,063.00	10,541,192,063.00
22	KDH & WKDH	359,466,721.00	701,934,053.00	644,311,212.00	764,478,480.00	764,478,480.00
23	Sekretariat Daerah Kota Makassar	175,398,431,625.28	227,044,273,456.00	167,388,906,150.01	177,322,136,255.67	177,322,136,255.67
24	Sekretariat DPRD	26,340,269,175.00	30,063,482,571.75	27,688,305,375.00	30,072,190,811.00	30,072,190,811.00
25	Badan Narkotika Kota	3,328,669,675.00	4,227,013,324.00	324,858,200.00	1,980,537,392.00	1,980,537,392.00
26	Badan Pendidikan dan Pelatihan		4,281,795,372.00	4,438,689,325.00	4,460,216,929.00	4,460,216,929.00
27	Badan Kepegawaian Daerah	4,248,991,481.00	5,089,056,462.00	7,385,790,824.00	7,863,216,972.00	7,863,216,972.00
28	Inspektorat Daerah	20,458,495,489.00	22,551,861,330.00	5,354,428,826.00	5,810,806,583.00	5,810,806,583.00
29	Dinas Pendapatan Daerah	1,010,910,157.00	2,293,766,900.00	32,213,493,854.00	43,070,859,219.00	43,070,859,219.00
30	Kantor Pelayanan Perizinan	3,259,277,636.00	3,729,696,504.00	1,764,855,942.00	1,892,039,686.00	1,892,039,686.00
31	Kecamatan Bontobala	3,265,463,747.00	3,978,500,777.00	4,190,059,032.00	4,158,134,130.00	4,158,134,130.00
32	Kecamatan Biringkanaya	4,110,099,401.00	5,067,329,565.00	4,342,387,341.00	4,336,326,944.00	4,336,326,944.00
33	Kecamatan Makassar	3,431,577,642.00	4,103,274,570.00	5,777,222,204.00	5,874,793,106.00	5,874,793,106.00
34	Kecamatan Mamajang	2,973,397,372.00	3,446,342,196.00	4,661,722,481.00	4,633,175,130.00	4,633,175,130.00
35	Kecamatan Mariso	4,152,116,052.00	4,873,149,095.00	3,764,830,089.00	3,800,522,872.00	3,800,522,872.00
36	Kecamatan Panakkukang	2,691,580,142.00	3,144,098,579.00	5,280,725,728.00	5,105,888,224.00	5,105,888,224.00
37	Kecamatan Manggala	3,578,227,378.00	4,369,314,877.00	3,449,486,923.00	3,519,291,497.00	3,519,291,497.00
38	Kecamatan Rappocini	2,816,359,097.00	3,482,889,827.00	4,812,551,443.00	4,733,463,630.00	4,733,463,630.00
39	Kecamatan Tamalanrea	3,529,095,532.00	4,318,123,325.00	3,886,089,026.00	4,062,306,776.00	4,062,306,776.00
40	Kecamatan Tallo	3,498,821,796.00	4,384,084,167.00	4,495,227,101.00	4,401,389,309.00	4,401,389,309.00
41	Kecamatan Tamalate	3,093,397,703.00	3,288,632,593.00	4,977,359,630.00	5,006,052,838.00	5,006,052,838.00
42	Kecamatan Ujung Pandang	2,840,136,965.00	3,155,596,542.00	3,623,038,703.00	3,444,130,427.00	3,444,130,427.00
43	Kecamatan Ujung Tanah	2,531,680,082.00	2,791,145,409.00	3,486,667,675.00	3,263,017,569.00	3,263,017,569.00
44	Kecamatan Wajo			3,156,376,919.00	3,049,757,477.00	3,049,757,477.00
45	Sekretariat KORPRI			49,771,600.00	798,872,121.00	798,872,121.00
46	Kantor Ketahanan Pangan			294,809,400.00	3,526,417,155.00	3,526,417,155.00
47	Badan Pemberdayaan Masyarakat	11,158,413,083.00	15,874,220,153.00	9,908,421,635.00	9,365,560,826.00	9,365,560,826.00
48	Dinas Komunikasi dan Informatika	4,075,939,020.00	4,186,290,344.00	3,623,466,657.00	4,163,208,594.00	4,163,208,594.00
49	Kantor Arsip, Perpustakaan dan Pengolahan Data	2,854,883,645.00	3,772,961,693.00	3,615,509,231.00	3,568,735,895.00	3,568,735,895.00
50	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan	11,016,095,460.00	14,398,004,534.00	17,826,331,532.00	12,354,528,974.00	12,354,528,974.00
51	Dinas Perindustrian, Perdagangan & Penanaman Modal	7,091,841,889.00	7,690,156,415.00	7,718,235,076.00	7,071,103,842.00	7,071,103,842.00
	JUMLAH	874,885,217,577.68	1,139,993,442,505.22	1,241,043,268,652.01	1,379,967,044,696.17	1,379,967,044,696.17

3.3.3. Pembiayaan Daerah

Seiring dengan semakin membaiknya pelaksanaan Otonomi Daerah dan semakin meningkatnya kesadaran warga masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan pemerintah, maka tuntutan kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana pelayanan semakin meningkat yang sudah barang tentu membutuhkan penyediaan anggaran yang semakin besar dan meningkat setiap tahun. Disisi lain, pendapatan Daerah, baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah

maupun Dana Perimbangan menunjukkan trend pertumbuhan yang tidak seimbang dengan kebutuhan akan pendanaan.

Kondisi ini, memaksa Pemerintah Daerah untuk mencari sumber pendanaan lain yang memungkinkan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan tersebut, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan untuk menutup kesenjangan tersebut adalah Pembiayaan Daerah Netto yaitu Selisih lebih antara Penerimaan Pembiayaan Daerah dengan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Pembiayaan ini secara garis besar dibagi menjadi dua bagian yaitu :

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah secara keseluruhan untuk Tahun Anggaran 2005 mampu direalisasikan sebesar Rp. 43.474.465.671,37 jika dibandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 85.105.445.634,36 mengalami peningkatan sebesar Rp. 41.630.979.962,99 atau 0,96%.
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah secara keseluruhan untuk Tahun Anggaran 2005 mampu direalisasikan sebesar Rp. 17.916.795.292,48 jika dibandingkan dengan realisasi pengeluaran pada Tahun Anggran 2010 sebesar Rp. 9.749.719.456,03 mengalami penurunan sebesar Rp. 8.167.075.836,45 atau 0,46%.

Besarnya masing-masing jenis pembiayaan digambarkan sebagai berikut :

Table 16-Komposisi Pembiayaan Pemerintah Kota Makassar

URAIAN	TAHUN ANGGARAN						SELISIH
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8 (2-7)
6 PEMBIAYAAN							-
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN	43,474,465,671.37	49,064,678,602.36	63,432,664,379.93	114,354,879,440.94	116,802,312,819.58	85,105,445,634.36	41,630,979,962.99
6.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	41,995,629,196.37	47,040,760,066.36	49,522,011,280.93	101,586,269,346.94	114,396,987,634.58	84,965,096,296.36	42,969,467,099.99
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	7,500,000,000.00	-	-	-
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-	-
6.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-
6.1.5 Penerimaan kembali pemberian pinjaman	-	-	-	-	-	-	-
6.1.6 Penerimaan Piutang Daerah	1,478,836,475.00	429,243,343.00	13,910,653,099.00	87,900,860.00	692,283,100.00	140,349,338.00	(1,338,487,137.00)
6.1.7 Penerimaan Kewajiban Pihak Ketiga	-	-	-	5,180,709,234.00	1,713,042,085.00	-	-
Penerimaan Piutang Lain-lain	-	1,594,675,193.00	-	-	-	-	-
5.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN	17,916,795,292.48	17,412,175,526.10	32,486,022,894.90	1,000,000,000.00	6,182,462,816.00	9,749,719,456.03	(8,167,075,836.45)
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan	-	-	7,500,000,000.00	-	-	-	-
6.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	3,094,341,479.10	5,750,000,000.00	6,500,000,000.00	-	1,000,000,000.00	1,860,000,000.00	(1,234,341,479.10)
6.2.3 Pembayaran Pokok Utang	8,690,534,156.38	9,926,725,601.10	18,462,298,644.90	-	5,182,462,816.00	7,889,719,456.03	(800,814,700.35)
6.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	248,730,043.00	-	-	-	-	-	(248,730,043.00)
6.2.6 Investasi Non Permanen	-	-	-	1,000,000,000.00	-	-	-
Pembayaran Utang Belanja	5,882,594,114.00	735,449,925.00	23,724,250.00	-	-	-	(5,882,594,114.00)
Pembayaran Utang Pajak	595,500.00	-	-	-	-	-	(595,500.00)

BAB IV

PELAKSANAAN OPERASIONAL PROGRAM

A. Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah adalah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, sebagai bentuk implementasi dari kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada pemimpinnya. Sebagai bagian dari komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah pada saat penyampaian Visi dan Misi calon Pemimpin Pemerintah Daerah, maka untuk Kota Makassar, Kebijakan ditempuh dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat terdiri atas beberapa bidang, yaitu :

B. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Bidang Pendidikan

Kualitas sumberdaya manusia tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) dimana pada Tahun 2009 sebesar 78,20 % dan pada Tahun 2010 telah mencapai 78,59 % yang didorong dengan dengan semakin membaiknya pelaksanaan sistem pendidikan di Kota Makassar. Demikian pula Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Makassar pada Tahun 2009 penduduk usia SD (7-12 Tahun) sebesar 96,89 %, usia SLTP (13-15 Tahun) sebesar 85,62 % dan usia SLTA (16-18 Tahun) sebesar 55,64 %. Dan pada Tahun 2010 angka partisipasi sekolah meningkat dimana penduduk usia SD (7-12 Tahun) sebesar 97,47 %, usia SLTP (13-15 Tahun) sebesar 86,06 % dan usia SLTA (16-18 Tahun) sebesar 57,47 %.

Untuk melaksanakan komitmen terhadap kepedulian dibidang pendidikan maka Pemerintah Kota Makassar mulai pada Tahun 2008 telah mencanangkan Sekolah bersubsidi penuh sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan bagi keluarga miskin di kawasan kumuh dan di kepulauan/pesisir dengan memenuhi seluruh kebutuhan biaya pendidikan bersubsidi penuh yang dialokasikan dalam APBD Kota Makassar untuk 46 Satuan Pendidikan, yaitu 41 SD dan 5 SMP. Sebanyak 11.470 siswa miskin yang terbantu dalam program ini untuk menikmati pendidikan dasar 9 Tahun dengan membebaskan dari segala pungutan atau biaya pendidikan. Program ini dilanjutkan di Tahun 2009 dengan fokus pada 100 Satuan Pendidikan, yaitu 89 SD dan 11 SMP dengan jumlah siswa miskin 21.153 siswa, dan pada tahun 2010 dilanjutkan 138 sekolah yaitu 128 SD, 7 SMP, 2 SMA, 1 SMK. Dan kedepan Pemerintah Kota mengupayakan seluruh SD dan SMP dari 367 SD Negeri dan 40 SMP Negeri menjadi target sekolah bersubsidi penuh.

Pada Tahun 2010 selain Program sekolah bersubsidi penuh juga dilaksanakan program pendidikan Gratis atas bantuan pembiayaan dari Pemerintah Kota Makassar dan Pemerintah Provinsi dengan sasaran 527 SD/MI/SDLB/PPs Ula dan 211 SMP/MTS/SMPLB/PPs Wusta dengan pembagian Porsi anggaran 40 % APBD Provinsi dan 60 % APBD Kota dengan Anggaran sebagai berikut :

- APBD Provinsi dengan Pagu sebesar Rp. 21.877.362.800,-.
- APBD Kota dengan Pagu sebesar Rp. 32.816.044.200,-.

Dengan Total Anggaran secara keseluruhan sebesar Rp. 54.693.407.000,-.

Dan terdapat 10 SD Swasta dan 12 SMP Swasta yang menolak atau tidak beminat ikut dalam Program Pendidikan Gratis dengan alasan bahwa apabila ikut program pendidikan

gratis tidak bisa memungut sumbangan, sedangkan biaya operasional sekolah jauh lebih besar dibandingkan dengan bantuan pendidikan gratis.

Disamping itu pula telah dilakukan berbagai perbaikan dan renovasi dan penambahan asset serta peningkatan mutu terhadap 322 sekolah untuk mendukung aktivitas proses belajar mengajar secara layak dan berkualitas. Hingga Tahun 2010 jumlah sekolah, siswa dan guru yang mengajar merupakan faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan pendidikan di Kota Makassar. Adapun rincian jumlah sekolah, siswa dan guru adalah sebagai berikut : jenjang pendidikan TK dengan jumlah sekolah Negeri sebanyak 1 unit, swasta 332 unit dengan jumlah siswa 13.934 orang dan jumlah guru yang mengajar sebanyak 1.649 orang. Jenjang pendidikan SD/MI yaitu sekolah Dasar Negeri 364 unit sekolah dan SD swasta, 96 unit, MI 50 unit, SDLB 15 unit, PPS Ula 20 unit dengan jumlah siswa 147.422 orang dan 6.822 orang guru. Jenjang pendidikan SMP/MTs yaitu SMP Negeri 40 unit, SMP swasta 109 unit, MTs 33 unit, SMPLB 10 unit, dan PPs Wusta 19 unit dengan jumlah siswa 60.484 orang dengan jumlah guru 4.488 orang.. Jenjang pendidikan SMA/MA/SMK yaitu SMA Negeri 22 unit sekolah, SMA swasta 94 unit, SMK Negeri 9 unit, SMK swasta 81 unit dan Madrasah Aliyah 25 unit dengan jumlah siswa 60.520 orang dengan jumlah guru 3.115 orang.

Selanjutnya dibidang pendidikan Non Formal dan Informal Pemerintah Kota Makassar juga memberikan perhatian yang cukup besar, mengingat besarnya minat dan animo masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan di jalur Non Formal di Tahun 2010 dimana terdapat 225 kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (kelompok bermain/SPS/TPA/TPQ dan POS PAUD) dengan 6.828 warga belajar dan 53 PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) yang mengelolah pendidikan kesetaraan dengan rincian Paket A setara SD 9 kelompok (180 Warga belajar), Paket B setara SMP 21 kelompok (525 warga belajar), paket C setara SMA 2 kelompok (60 warga Belajar), untuk lembaga kursus dan pelatihan terdapat 432 lembaga dengan 17.402 warga belajar dengan berbagai jenis keahlian seperti, Bahasa Asing, Komputer, Akuntansi, Teknisi AC, Montir dan jenis keterampilan lainnya.

Seiring dengan semakin membaiknya sistem pendidikan di Kota Makassar diakui masih terdapat beberapa kekurangan dan kelemahan yang dihimpun menjadi permasalahan pokok dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan adalah prasarana dan sarana sekolah baik pada jenjang pendidikan dasar maupun menengah. Kondisi fisik gedung sekolah yang ada beberapa yang tidak memadai lagi, ruang belajar relatif kurang dan kekurangan perpustakaan, laboratorium, meubelair dan buku-buku paket pelajaran sekolah. Alat peraga pendidikan juga masih kurang serta masih banyaknya murid yang tidak mampu secara finansial. Disamping itu, taman baca dan kendaraan perpustakaan keliling masih terbatas. Demikian juga ketersediaan tenaga pengajar, upaya dilakukan penambahan sesuai kebijakan Pemerintah Pusat dan redistribusi sesuai kewenangan Pemerintah Kota untuk mendekati keseimbangan rasio murid guru. Sehingga pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dapat terwujud.

Oleh karena itu Pemerintah Kota Makassar senantiasa berupaya untuk menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan yang representatif secara terus menerus diupayakan sebagai konsekuensi dari meningkatnya jumlah penduduk dan penuntasan program wajib belajar 9 Tahun .

Sedangkan kemampuan membaca dan menulis penduduk Kota Makassar cukup meningkat ditandai dengan meningkatnya persentase penduduk yang dapat membaca dan menulis baik huruf latin dan yang buta huruf semakin berkurang. Sekitar 98 % penduduk usia 10 Tahun ke atas mampu membaca dan menulis huruf latin.

Table 17-Kemampuan Baca Dan Tulis Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas

Jenis Kelamin	Dapat Membaca dan Menulis %	Tidak dapat %
Laki-laki	99,10	0,90
Perempuan	97,11	2,89
Laki-laki + Perempuan	97,45	2,55

Sumber Data BPS Kota Makassar Tahun 2010

Sebagai tindak lanjut dari program Pemerintah Kota Makassar dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan informasi demi mencerdaskan kehidupan masyarakat dan mendorong tumbuhnya minat baca masyarakat dengan “Gerakan Makassar Gemar Membaca” (GMGM) yang bertujuan bertujuan (1). Menjadikan membaca dapat membudaya di masyarakat; (2). Menjadikan buku sebagai pusat pengetahuan dan informasi; (3) Perpustakaan dan tempat baca lainnya mudah diakses. Melalui program tersebut Pemerintah Kota Makassar telah mencanangkan penggunaan dan menyediakan 36 taman baca binaan yang tersebar pada 14 Kecamatan termasuk 6 di Kepulauan (Pulau Barang Lompo, Barang Caddi, Kodingareng, Lae-Lae, Lumu-lumu dan Bone Tambung serta pelibatan swadaya masyarakat telah dibangun 95 Taman Baca Masyarakat ,terselenggaranya layanan perpustakaan umum Kota dan telah beroperasinya 2 (dua) unit Mobil Perpustakaan keliling, dan penyediaan 2 (dua) unit kendaraan motor pintar keberbagai sekolah dan tempat keramaian umum lainnya.

C. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Bidang Kesehatan

Upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dilakukan secara terus menerus dengan memperluas cakupan pembangunan kesehatan yang disertai dengan upaya mendorong kemandirian individu, keluarga dan masyarakat luas untuk sehat dalam rangka menjamin tersedianya pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, terjangkau.

Dalam rangka peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan, Pemerintah Kota Makassar sejak Tahun 2007 sampai dengan 2010 telah melakukan pelayanan kesehatan gratis pada Seluruh Puskesmas yang ada di Kota Makassar. Pelayanan yang diberikan secara gratis kepada seluruh warganya dengan tidak membedakan latar belakang ekonomi kaya atau miskin, semuanya memperoleh pengobatan dan pemeriksaan ke Puskesmas secara gratis. Hal ini mendorong kesadaran warga akan arti pentingnya kesehatan. terbukti dari angka kunjungan ke Puskesmas Tahun 2010 menjadi 2.032.409 orang yang terdiri dari kunjungan sakit 1.561.199 orang dan kunjungan sehat 471.210 orang.

Terkait dengan kesehatan gratis tersedia 1.034 sarana pelayanan kesehatan bagi warga kota Makassar yang terdiri dari 1 Unit Rumah Sakit Umum Daerah Daya , 8 Unit Puskesmas Rawat Inap, 29 Unit Puskesmas non Rawat Inap, 41 Unit Puskesmas Pembantu

dan 953 Posyandu yang didukung oleh 1.193 Tenaga Medis dan Para Medis, serta 459 tenaga Non Medis. Sedangkan masyarakat pulau disediakan Puskesmas Keliling laut 2 buah yang siap memberikan pelayanan dan mengatasi berbagai keluhan kesehatan masyarakat pulau. Khusus untuk penanggulangan HIV/AIDS disediakan pula 2 Puskesmas Percontohan Metadon dari 24 keseluruhan yang ada di Indonesia dan siap memberikan pelayanan & rujukan bagi penderita HIV/AIDS & penyalahgunaan narkoba (NAPZA);

Dalam mengantisipasi terjadinya penyakit demam berdarah maka hingga Tahun 2010 telah terbentuk 1.854 Juru Pemantau Jentik (Jumantik) di seluruh pelosok Makassar untuk memantau, melaporkan & memberantas sarang nyamuk Demam Berdarah melalui gerakan menguras, menutup, & mengubur (3M) serta abatisasi, penyemprotan atau Fogging baik massal maupun khusus. Setiap Kecamatan disediakan 2 petugas Fogging untuk mengantisipasi munculnya wabah Demam Berdarah.

Untuk meningkatkan kualitas & standarisasi pelayanan Puskesmas, dimana **Puskesmas Sudiang Raya dan Puskesmas Kassi-Kassi telah berhasil meraih standar Mutu ISO 9001 versi 2008. untuk Tahun 2010.** Disamping itu pula, program kesehatan gratis yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar juga menyiapkan layanan gratis khusus secara berkala, seperti **pengobatan gratis, perbaikan gizi masyarakat khususnya kepada masyarakat miskin kurang gizi, sunatan massal, dan lain-lain.**

Untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan gratis di tengah-tengah masyarakat maka Pemerintah Kota Makassar memfasilitasi pembentukan kelompok kerja (Pokja) Kelurahan Sehat yang saat ini sudah mencapai 143 Pokja, yang bertujuan untuk mengaktifkan kader-kader posyandu untuk mendukung keluarga yang sehat melalui Kelurahan Siaga, Gerakan Sayang Ibu, Revitalisasi Posyandu, serta Pemberian Makanan Tambahan (PMT) & ASI eksklusif.

Beberapa penghargaan yang diterima sebagai bukti keberhasilan program pembangunan kesehatan oleh pemerintah Kota Makassar antara lain Juara Lomba Posyandu Tingkat Provinsi Sulawesi selatan, Juara II Lomba Puskesmas se Sulawesi Selatan serta penghargaan Citra Pelayanan Publik.

Guna mendukung kampanye pemberian ASI Eksklusif bagi Ibu menyusui di tempat umum dan pusat perbelanjaan, maka telah disediakan Bilik Air Susus Ibu di 3 (tiga) Tempat yaitu Mall MTC, Mall Panakkukang dan Mall GTC. Yang tak luput pula dari perhatian Pemerintah Kota Makassar adalah upaya peningkatan status Gizi Anak sekolah melalui program pemberian makanan tambahan (PMT) berupa susu telur dan madu, melalui program anak Makassar sehat dan Cerdas (AMSC). Kesehatan Gartis akan ditingkatkan kualitasnya melalui Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Makassar dengan target perluasan dari 160.103 ASKES PNS, 336.004 JAMKESMAS, 88.654 JAMSOSTEK, ASKES Komersial 24.332. & 644.760 tanggungan PEMDA. Realisasi Program pelayanan kesehatan Gratis dari APBD Provinsi Tahun anggaran 2010 sebesar Rp. 4.208.993.280,-. Dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.952.276.089,- atau 93,90 % yang diperuntukkan, sebanyak 37 Puskesmas. Dan untuk Rumah Sakit Umum Daya Kelas III dengan anggaran sebesar Rp.1.980.702.720,-.

Derajat kesehatan masyarakat Kota Makassar di Tahun 2010 ini cukup mengalami peningkatan tercermin dari Angka Harapan Hidup. Pada Tahun 2009 Angka Harapan Hidup sebesar 73,43 Tahun sedangkan pada Tahun 2010 Angka Harapan Hidup menjadi 73,58 Tahun. Angka kematian bayi pada tahun 2009 sebesar 11,34/1000 KH (Kelahiran Hidup) dan pada tahun 2010 menurun 10/1000 KH (Kelahiran Hidup).

melahirkan pada tahun 2009 sebesar 16/100.000 KH (Kelahiran Hidup) dan pada tahun 2010 menurun menjadi 11,8/100.000 KH (Kelahiran Hidup). Pada Tahun 2009 prevalensi gizi kurang anak balita sebesar 15,35% dan pada Tahun 2010 menurun menjadi 15,22% .

Pemerintah Kota Makassar telah melaksanakan berbagai upaya preventif dan promotif secara terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan masyarakat dan berbagai sektor terkait, termasuk dalam penanggulangan penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS serta penyalahgunaan NAPZA.

D. Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam Restra dan RPJMD Kota Makassar TA. 2009 melakukan program dan kegiatan yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan-kegiatan berdasarkan bidang-bidang tugasnya, pelaksanaan kegiatan dimaksud diantaranya :

1. Bidang Koperasi dan UKM

Bidang Koperasi dan UKM Kota Makassar dengan anggaran sebesar Rp. 68.534.000,00 (APBD Kota Makassar) dan Rp. 58.300.000.000 (APBN) yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Sulawesi Selatan melalui Program Dana Bergulir yang di Peruntukan untuk Kota Makassar.

- Jumlah Koperasi di Kota Makassar = 1.454 Koperasi (terdiri dari 991 Koperasi Aktif dan 463 Koperasi tidak Aktif)
- Jumlah Anggota Koperasi = 224.225 Anggota
- Modal Sendiri = Rp. 378.995.561.000,00
- Modal Luar = Rp. 100.868.056.000,00
- Volume Usaha = Rp. 639.661.603.000,00
- SHU = Rp. 30.397.595.000,00
- Dana Bantuan Perkuatan Kementrian Koperasi = Rp. 15.501.500.000,00

2. Bidang Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan

Dalam rangka pemantapan Program Bidang Kelautan Perikanan Kota Makassar Sesuai dengan Arah Visi dan Misi Kota Makassar baik dalam RPJMD dan RPJP, maka pada tahun anggaran 2011 ini Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan telah mendapatkan Alokasi dana yang bersumber dari dana APBN (Kementrian Kelautan dan Perikanan) sebesar Rp. 4.500.000.000,00 dengan Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan tangkap. Dalam hal ini, anggaran tersebut diperuntukan bagi Pembinaan dan Pengembangan Kapal perikanan, alat penangkap ikan dan pengawakan kapal perikanan. Dana tersebut terkhusus pada pembelian pada kapal Perikanan dengan >30 GT sebanyak 3 unit kapal.

Kegiatan – kegiatan Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan yang pendanaannya yang berasal dari APBD Kota Makassar berjumlah Rp.16.931.950.400,00 dengan belanja langsung Rp. 11.373.463.600,00 yang terdiri dari :

- Program peningkatan Kesejahteraan Tani.
- Program Peningkatan pemasaran hasil produksi/pertanian/perkebunan.
- Program Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan.
- Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan.3
- Program pencegahan penyakit ternak.
- Program peningkatan hasil peternakan.
- Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan.
- Program pelayanan administari perkantoran.
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
- Program peningkatan disiplin aparatur.
- Program peningkatan kapasitas Sumber daya aparatur.
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan.
- Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.
- Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan.
- Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan perkiraan iklim laut.
- Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat.
- Program pengembangan budidaya perikanan.
- Program pengembangan perikanan tangkap.
- Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan.
- Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan.
- Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar.

3. Bidang Perindustrian dan Perdagangan

Berdasarkan kepada dokumen pelaksana anggaran satuan kerja perangkat daerah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Makassar tahun anggaran 2011, Jumlah belanja Daerah sebesar Rp. 8.979.509.000,00, dengan memperoleh pendapatan (pendapatan asil daerah dan hasil retribusi daerah) sebesar Rp. 2. 970.344.000,00. Khusus belanja langsung Rp. 3.721.094.800,00 yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Adapun Program Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal pada tahun Anggaran 2011 sebagai berikut :

- Program Peningkatan iklim investasi dan Realisasi Investasi.
- Program penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah.

- Program pelayanan administrasi perkantoran.
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
- Program peningkatan disiplin aparatur.
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
- Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan.
- Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri.
- Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.
- Program penyediaan data potensi dan peluang investasi Kota Makassar.
- Program peningkatan Kapasitas Iptek sistem produksi.

E. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*)

Upaya pelaksanaan tata pemerintahan yang baik, Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu instrumen yang merefleksikan keinginan Pemerintah untuk melaksanakan tata pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dapat dilihat dari indikator upaya penegakan hukum, transparansi dan penciptaan partisipasi. Dalam hal penegakan hukum, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 telah mengatur secara tegas upaya hukum bagi para penyelenggara pemerintahan daerah yang diindikasikan melakukan penyimpangan.

United Nations merumuskan indikator “good governance” yang meliputi:

1. kemampuan, yaitu kemampuan yang cukup untuk melaksanakan kebijakan dan fungsi-fungsi pemerintah, termasuk sistem administrasi publik yang efektif dan responsif;
2. akuntabilitas dalam kegiatan pemerintah dan transparan dalam pengambilan keputusan;
3. partisipasi dalam proses demokrasi, dengan memanfaatkan sumber informasi dari publik dan dari swasta;
4. perhatian terhadap pemerataan dan kemiskinan; dan
5. komitmen terhadap kebijakan ekonomi yang berorientasi kepada pasar.

Pemerintah Kota Makassar dalam hal upaya penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) melakukan target awal yang dimana target tersebut merupakan pembenahan Birokrasi menuju tata Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) untuk merubah Pencitraan Negatif terhadap Kota Makassar.

Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

1. Kesepakatan bersama (MoU), antara Walikota Makassar dengan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berjangka waktu 2007-2011.

2. Penandatanganan MoU Pemerintah Kota Makassar dengan Transparency International Indonesia (TII) tentang Penerapan Pakta Integritas dalam Pengadaan Barang/Jasa.
3. Pemerintah Kota Makassar akan membentuk Lembaga Ombudsman, dengan Partnership melalui nota kesepahaman bersama Memorandum of Understanding (MoU) pada tanggal 8 Nopember 2007).
4. Pembentukan Ombudsmen Kota Makassar untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
5. Penerapan Lelang Elektronik (e-Procurement) dan Pembentukan LPI untuk peningkatan Pengadaan Barang dan Jasa. LUNCHING 19 Oktober 2009.
6. Sistem Pengaduan Pelayanan Publik dengan media Elektronik dan Cetak (*hotline*).

F. Kebijakan Inovatif Pemerintah Kota Makassar

a. Program Makassar Bebas

Program Makassar Bebas merupakan Pelaksanaan pembangunan Kota Makassar ditunjang oleh kebijakan khusus dalam rangka penanganan masalah kemiskinan dengan program Makassar Bebas yaitu :

1. Pendidikan Bersubsidi Penuh

merupakan Program Peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan, melalui Sekolah gratis atau bersubsidi penuh yang seluruh SD dan SMP dalam wilayah Kota Makassar melaksanakan program Pendidikan Gratis sejalan dengan program Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan.

Pendidikan Bersubsidi Penuh diterapkan Pemerintah Kota Makassar kepada SD, SMP dan SMA yang mempunyai siswa miskin di atas 70% meliputi :

SD	: 128 sekolah
SMP	: 7 sekolah
SMA	: 2 sekolah

Pembiayaan Dana Sekolah Bersubsidi Penuh :

1. Pembelian Alat Tulis Menulis Siswa
 - Buku Tulis
 - Alat Tulis
 - Tas
2. Buku Mata Pelajaran
3. Buku Lember Kerja Siswa

Table 18-Jumlah Sekolah Pelaksana Pendidikan Gratis Dan Sekolah Bersubsidi Penuh

No	Uraian	JUMLAH SEKOLAH	JUMLAH SISWA
A	PENDIDIKAN GRATIS		
1	Jenjang SD		
	SD	441	145,698
	MI	48	7,692
	PPs Ula	21	1,239
	SDLB	15	581
2	Jenjang SMP		
	SMP	172	225,397
	MTs	33	24,973
	PPs Wustha	18	3,238
	SMPLB	9	580
B	SEKOLAH BERSUBDIDI PENUH		
	SD	128	28,488
	SMP	7	1,886
	SMA	2	800.4
	SMK	2	160

2. Pelayanan Kesehatan Gratis

Pelayanan Kesehatan Gratis merupakan Program Peningkatan derajat kesehatan masyarakat, melalui Pelayanan Kesehatan dasar gratis, Pelayanan gratis seperti Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daya dan Jaringanannya.

Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas dan Jaringanannya terdiri atas :

1. Pemeriksaan Dokter, Pengobatan dan Konsultasi Kesehatan;
2. Pelayanan Laboratorium Dasar;
3. Tindakan Medik dasar a. l. : - Tindakakn Medik Umum; - Tindakan Medik Gigi Mulut;
4. Pelayanan dasar Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Keluarga Berencana (KB);
5. Surat Keterangan Lahir;
6. Surat Keterangan Sakit;
7. Pelayanan Tindak Medik Khusus;
8. Persalinan;
9. Rawat Inap Umum (Puskesmas Perawatan).

Pelayanan Kesehatan Lanjutan di RSUD Daya terdiri atas :

1. Pelayanan Lanjutan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Pelayanan lanjutan Keluarga Berencana (KB);
2. Pelayanan Surat Keterangan;
3. Pelayanan Pemeriksaan laboratorium tingkat lanjutan;
4. Pelayanan Rawat Inap Kelas III.

Table 19-Alokasi Dana Kesehatan Gratis Di Kota Makassar Tahun 2010

I. Rawat Jalan	= Rp. 10.025.032.000
Rawat Inap dan Persalinan	= Rp. 1.265.400.000,-
Rawat Inap Umum	= Rp. 643.350.000,-
Penunjang Opr	= Rp. 3.312.000.000,-
TOTAL	= Rp. 15.245.782.000,-
Obat	= Rp. 5.408.590.000,-

Table 20-Hasil Pelaksanaan Kunjungan Rawat Inap

NO	TAHUN	PASIEN RAWAT INAP	PASIEN RAWAT INAP PERSALINAN	PASIEN RAWAT JALAN	TOTAL
1	2009	1.459	1.090	1.731.448	1.734.816
2	2010	1.813	3.569	1.551.956	1.557.338
3	Triwulan I 2011	338	500	349.297	350.135

TABEL 4.5

Table 21-Hasil Pelaksanaan Kunjungan Rawat Jalan

No	KUNJUNGAN	2009	SEPT. 2010
1	RAWAT JALAN	1.731.488	1.144.978

3. Bebas Biaya Pemakaman dan Angkutan Jenazah

Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga. melalui pelayanan gratis untuk pengurusan jenazah sebelum dikebumikan kepada masyarakat yang kurang mampu.

Bebas Pelayanan Pemakaman dan Pengubuan Mayat :

- Telah dibentuk 143 Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang memberikan pelayanan pengurusan jenazah,
- Pengangkutan Jenazah Dalam Wilayah Kota;
- Pemakaman/Penguburan Mayat Dalam Wilayah Kota;

- Pengabuan /Pembakaran Mayat Dalam Wilayah Kota;
Realisasi pelaksanaan pemberian perlengkapan mayat
- Tahun 2009
 - Tersalurkan perlengkapan mayat sebanyak 864 set
- Tahun 2010
 - Tersalurkan 140 paket perlengkapan mayat dan 70 unit tempat pemandian mayat

Table 22-Data Pelayanan Angkutan Mobil Jenazah/Ambulance Gratis 2010

NO	BULAN	JUMLAH ORANG	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	JANUARI	371	300.000	111.300.000
2	PEBRUARI	395	300.000	118.500.000
3	MARET	422	300.000	126.600.000
4	APRIL	398	300.000	119.400.000
5	MEI	414	300.000	124.200.000
6	JUNI	440	300.000	132.000.000
7	JULI	473	300.000	141.900.000
8	AGUSTUS	432	300.000	129.600.000
9	SEPTEMBER	372	300.000	111.600.000
10	OKTOBER	424	300.000	127.200.000
11	NOVEMBER	354	300.000	106.200.000
12	DESEMBER	375	300.000	112.500.000
JUMLAH		4.870		1.461.000.000

TABEL 4.7

Table 23-Data Pelayanan Angkutan Mobil Jenazah / Ambulance Gratis 2011

NO	BULAN	JUMLAH ORANG	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	JANUARI	538	275.000	147.950.000
2	PEBRUARI	414	275.000	113.850.000
3	MARET	467	275.000	128.425.000
JUMLAH		1.419		390.225.000

4. Bebas Biaya KK, KTP, Akte Kelahiran dan Akte Kematian

Merupakan program Peningkatan Pelayanan Publik melalui pelayanan administrasi kependudukan dan akte catatan sipil gratis secara cermat dan akurat.

Pelayanan Administrasi Kependudukan Yang *Dibebaskan* :

- Penerbitan Akta Kelahiran
- Penerbitan dan Perubahan Kartu Keluarga
- Penerbitan dan Perpanjangan KTP
- Penerbitan dan Penggantian Akta Kematian
- Surat Keterangan Pindah dalam Kelurahan
- Surat Keterangan Pindah Antar Kelurahan dalam Satu Kecamatan
- Surat Keterangan Pindah antar Kecamatan
- Surat Keterangan Pindah antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi
- Surat Keterangan Pindah antar Provinsi
- Surat Keterangan Pindah antar Negara

Item Pengecualian Pembebasan Biaya Pada Pelayanan Adm Kependudukan:

- Penggantian Akta Kelahiran dan atau Akta Kelahiran yang pelaporannya melebihi tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran;
- Penggantian KK yang rusak atau hilang;
- Penggantian KTP yang rusak atau hilang;
- Penerbitan KTP bagi wajib KTP sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (2) yang terlambat pelaporannya 6 (enam) bulan;
- Penerbitan perpanjangan KTP bagi wajib KTP yang lalai dan terlambat pelaporannya 6 (enam) bulan.

**PROGRAM MAKASSAR BEBAS
LOUNCHING SEJAK TANGGAL 18 AGUSTUS 2009
REALISASI YANG TELAH DICAPAI**

1. TANGGAL 18 AGUSTUS S/D DESEMBER 2009

a. KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)	
123.707 Lbr X 14.500	—————> Rp. 1.793.751.500
b. KARTU KELUARGA (KK)	
32.798 Lbr X 4.000	—————> Rp. 131.192.000
c. SURAT PINDAH	
1.910 Lbr X 2.750	—————> Rp. 5.252.500
d. AKTA KELAHIRAN	
26.820 Lbr X 8.500	—————> Rp. 227.970.000
e. AKTA KEMATIAN	
74 Lbr X 8.500	—————> Rp. 629.000
	Rp. 2.158.795.000

2. BULAN JANUARI S/D SEPTEMBER 2010

a. KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)	86.927 Lbr X 14.500	—————>	Rp. 1.260.441.500
b. KARTU KELUARGA (KK)	69.929 Lbr X 4.000	—————>	Rp. 279.716.000
c. SURAT PINDAH	8.858 Lbr X 2.750	—————>	Rp. 24.359.500
d. AKTA KELAHIRAN	21.323 Lbr X 8.500	—————>	Rp. 181.245.500
e. AKTA KEMATIAN	309 Lbr X 8.500	—————>	Rp. 2.626.500

Rp. 1.748.389.000

TOTAL BANTUAN PEMERINTAH KOTA SEJAK LOUNCHING TGL 18 AGUSTUS 2009 S/D APRIL 2011 **RP. 4.590.037.250**

a. KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)	241.848 Lbr X 14.500	—————>	Rp. 3.506.796.000
b. KARTU KELUARGA (KK)	140.075 Lbr X 4.000	—————>	Rp. 560.300.000
c. SURAT PINDAH	17.935 Lbr X 2.750	—————>	Rp. 49.321.250
d. AKTA KELAHIRAN	55.115 Lbr X 8.500	—————>	Rp. 468.477.500
e. AKTA KEMATIAN	605 Lbr X 8.500	—————>	Rp. 5.142.500

TOTAL SUBSIDI RP. 4.590.037.250

INDIKATOR PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN YANG TELAH DILAKUKAN MELIPUTI :

1. Transparansi Pelayanan

- Pembuatan papan bicara tentang hak penduduk dan biaya dalam pengurusan dokumen kependudukan di 143 kelurahan dan 14 kecamatan di kota makassar
- Mendistribusi perda no.9 tahun 2009 tentang administrasi kependudukan dan akta catatan sipil kepada 143 lurah, 14 camat dan rw

2. Publikasi Dan Informasi

- Sosialisasi Melalui Media Masa, Surat Kabar, Elektronik, Baliho Dan Brosur Terhadap Implementasi Pelayanan Dokumen Kependudukan Di Kota Makassar

3. Kemudahan Pengurusan

- MENYEDERHANAKAN PERSYARATAN DALAM SETIAP PENGURUSAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN AKTA CAPIL

4. Standar Pelayanan

- BATAS WAKTU PENYELESAIAN OUTPUT DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

5. Pemangkasan Birokrasi

- Melakukan Pelayanan Secara Desentralisasi Disetiap Kecamatan Dalam Proses Hingga Penyelesaian Output (Menyangkut Pendekatan Pelayanan Kepada Masyarakat)

6. Sanksi Bagi Petugas Penyelenggara

- Dilakukan penarikan bagi staf dinas yang di tempatkan di kecamatan sebagai operator atau bendahara yang tidak disiplin dalam melaksanakan tugasnya dan bagi petugas dinas akan diusulkan untuk dipindahkan ke unit kerja lain.

7. Bebas Angkutan anak Sekolah

Merupakan Program Peningkatan manajemen transportasi perkotaan yang mudah diakses melalui pelayanan gratis angkutan anak sekolah.

Pelayanan Angkutan Anak Sekolah Gratis

Telah diluncurkan pada tanggal 19 Januari 2011 meskipun telah beroperasi sejak bulan september 2010 Sebanyak 4 unit bus dengan rute:

- a. Terminal Panakukang – Karebosi
- b. Terminal malengkeri – Karebosi
- c. Terminal Pasar Antang – Karebosi
- d. Terminal Daya – Karebosi

Pada tahun anggaran 2011 akan ditambah lagi sebanyak 5 unit dengan type khusus (pintu otomatis, AC dan TV).

8. Bebas Biaya Bantuan Hukum bagi Penduduk Miskin

Penegakan Hukum dan HAM melalui peningkatan kesadaran hukum dalam bentuk pemberian bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat kurang mampu.

Tujuan Pelayanan Bantuan Hukum adalah :

1. Lahirnya Kesadaran Hukum Masyarakat;
 2. Terpenuhinya Hak-Hak Masyarakat Dalam Memperoleh Bantuan Hukum Secara Optimal;
 3. Meningkatkan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Bidang Hukum .
- Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Meliputi Tindakan Hukum Untuk Kepentingan Pencari Keadilan Disetiap Proses Peradilan.

- Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Berlaku Juga Terhadap Pemberian Jasa Hukum Diluar Pengadilan.
- Yang Berhak Menerima Bantuan Hukum Adalah Penduduk Kota Yang Tidak Mampu Dalam Menghadapi Masalah Hukum Di Wilayah Kota Yang Tidak Mampu Dalam Menghadapi Masalah Hukum Di Wilayah Kota Dan Memiliki Dasar Hukum

Pelayanan Bantuan Hukum Pada Penduduk Tidak Mampu :

- Tahun 2009, telah menerima sebanyak 7 permohonan Bantuan Hukum, yang mendapatkan pelayanan sebanyak 6 kasus, 1 tidak memenuhi syarat.
- Tahun 2010, diterima 12 permohonan Bantuan Hukum yang mendapatkan pelayanan sebanyak 8 kasus, 4 permohonan tidak memenuhi syarat.
- Tahun 2011, telah diterima 5 permohonan, 3 permohonan memenuhi syarat dan 2 permohonan belum memenuhi syarat.

Peraturan Daerah Sebagai Pedoman Operasional Pelaksanaan Program Makassar Bebas sebagai Berikut :

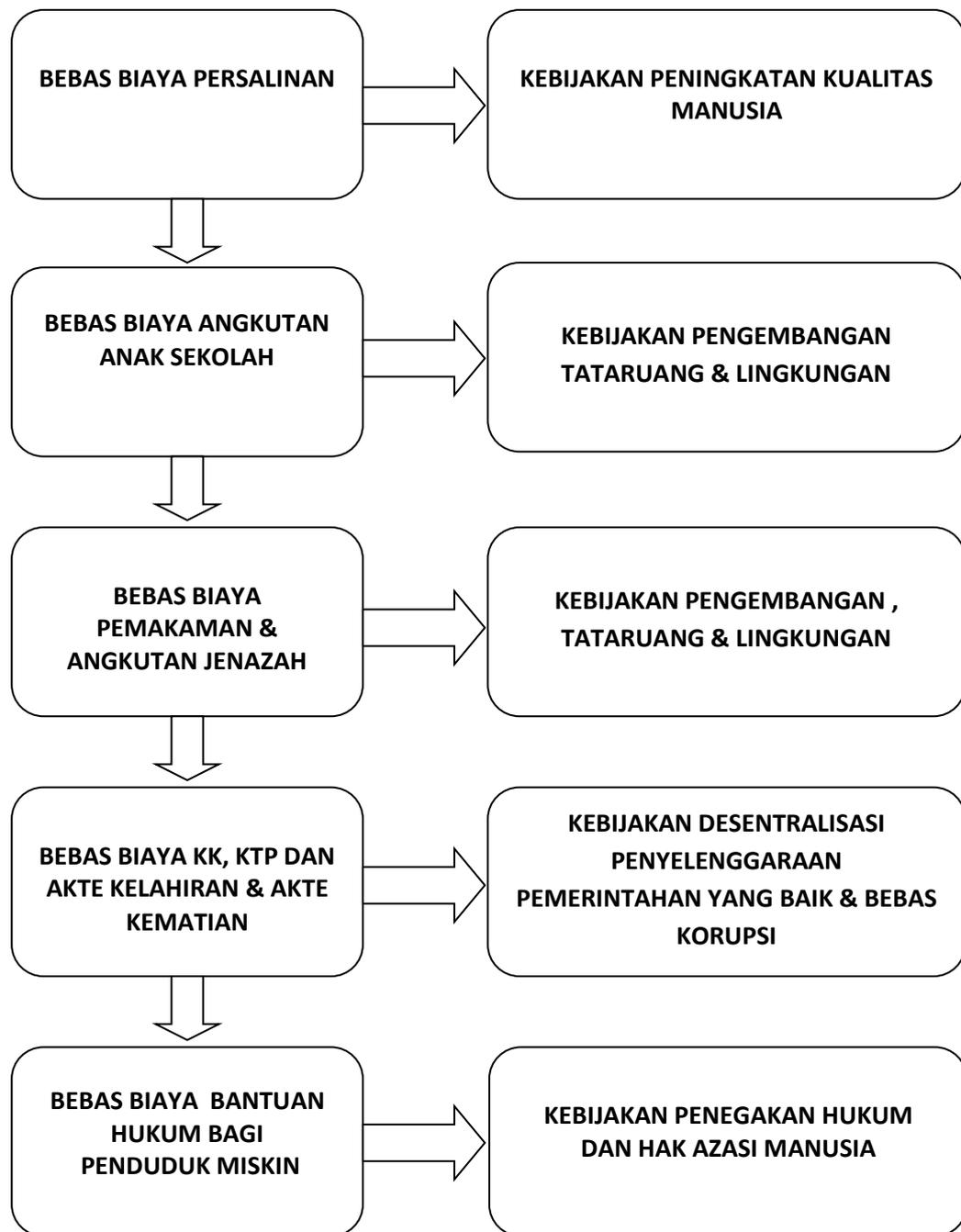
1. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Kesehatan Gratis Di Kota Makassar;
2. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat Di Kota Makassar;
3. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil Di Kota Makassar
4. Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Bantuan Hukum Gratis Kepada Masyarakat

TABEL 4.8**Table 24-Alokasi Anggaran Program Makassar Bebas**

NO	Uraian Kegiatan	2010	2011	Keterangan
1	Pelayanan Kesehatan Gratis - Dinas Kesehatan - RUS Daya	19.958.696.050 15.090.382.000 4.868.314.050	38.685.600.000	Dinas Kesehatan
2	Pelayan Pendidikan Gratis - Pendidikan Gratis - Subsidi Penuh	58.089.782.550 54.693.405.000 3.396.377.550	57.426.026.500 54.693.405.000 2.732.621.500	Dinas Pendidikan
3	Bebas Biaya Pemakaman dan Angkutan Jenazah	1.550.000.000	1.800.000.000	Dinas Kebersihan Dan Keindahan
4	Bebas Biaya KTP, KK, Akte Kelahiran dan Akte Kematian	4.709.370.500	3.223.603.000	Dinas Kepend. dan Capil
5	Perlengkapan Mayat	503.758.500	551.388.500	Dinas Sosial
6	Angkutan Gratis Anak Sekolah	280.000.000	4.125.000.000	Dinas Perhubungan
7	Bantuan Hukum Gratis	101.172.000	107.384.000	Bagian Hukum
	JUMLAH	85.192.779.600	105.919.002.000	

Gambar 2- Kebijakan Program Makassar Bebas Lahir Sampai Mati Dalam RPJMD 2009-2014

KEBIJAKAN PROGRAM MAKASSAR BEBAS LAHIR SAMPAI MATI DALAM RPJMD 2009-2014



b. Program Gerakan Makassar Gemar Membaca (GMGM)

Gerakan Makassar Gemar Membaca merupakan salah satu program Pemerintah Kota Makassar, yang dicanangkan pada tanggal 05 Juni 2006 oleh Walikota Makassar, Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, MM. didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Drs. H. Muhammad Asmin, S.Pd., dan Dewan Pembina Yayasan Pena Madani, DR.Hj. Marwah Daud Ibrahim. Dasar pertimbangan diprogramkannya Gerakan Makassar Gemar Membaca oleh Pemerintah Kota Makassar adalah bahwa :

Pemerintah Daerah merupakan ujung tombak pembangunan bangsa yang berhadapan langsung dengan masyarakatnya sebagai pelaku sekaligus konsumen dan pemasok dalam kaitannya dengan pengelolaan Sumber Daya Alam yang dimilikinya.

Kemampuan membaca merupakan kompetensi dasar manusia yang sangat penting untuk mendongkrak kompetensi lainnya, sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi lingkungan sekitarnya.

Untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan program kegiatan **“Gerakan Makassar Gemar Membaca” (GMGM)** maka pada Tahun 2010 di 14 kecamatan telah dialokasi anggaran untuk program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan dengan berbagai kegiatan seperti pengelolaan taman baca, lomba membaca dan menulis serta beberapa kegiatan yang dilaksanakan di kantor Arsip, Perpustakaan dan Pengolahan Data dengan kegiatan sebagai berikut : Lomba Karya Tulis Ilmiah, Story Telling, Bimbingan Teknis bagi Pengelola Taman Baca dan Perpustakaan, wajib kunjungan perpustakaan, Wisata Baca, Gelar Minat baca. Perpustakaan Minat Baca, Pengelolaan Perpustakaan Umum Kota Makassar, Pembinaan Taman Baca serta beberapa kegiatan yang bekerjasama dengan mitra kerja seperti Lomba kreativitas anak di setiap Taman Baca, pemberian Diskon kepada anggota perpustakaan Kota Makassar yang berbelanja Buku/majalah/koran di beberapa Toko Buku dan Penerbit.

Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Umum merupakan wahana yang paling efektif dan efisien untuk mempercepat proses pencerdasan masyarakat melalui penyediaan informasi dan bahan bacaan yang mutakhir, lebih banyak dan bervariasi.

c. Makassar Green and Clean

Makassar Green and Clean (MGC) adalah salah satu program lingkungan yang berhasil melanjutkan mimpi warga makassar untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Pembukaan program MGC sendiri telah dilaksanakan pada 28 Juni 2008 pada program tersebut dihadiri oleh pimpinan yayasan Unilever Indonesia Ibu Shinta Kanyawati dan perwakilan Pertamina. Makassar Green and Clean merupakan program kemitraan antara Unilever Indonesia, PT. Pertamina, Fajar Group, Pemerintah Kota Makassar dan Yayasan Peduli Negeri.

Setelah berdirinya program MGC, trend gerakan Makassar Green and Clean telah tumbuh pesat di Makassar, gerakan ini kembali melanjutkan

semangat posisi gerakan makassar bersih yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Makassar 2004 silam.

Hingga kini Makassar Green and Clean (MGC) tersebar di 143 kelurahan, 900 RW, 320 Fasilitator dan 15000 Kader Lingkungan di Kota Makassar. Dimana seluruh program yang dicanangkan di Makassar berusaha membangun kembali Kesan Positif Makassar tentang Makassar Green and Clean.

Partisipasi warga dalam gerakan Penghijaun memang sangat diperlukan kunci keberhasilan Makassar Green and Clean adalah adanya Partisipasi Aktif langsung dari Warga, berbagai pendekatan dilakukan salah satunya secara Agama dengan pendekatan tersebut partisipasi warga yang tersebar sampai tingkat Rukun Tetangga (RT) sangat tinggi.

Gambar 3-Pelaksanaan Makassar Green And Clean



d. Visit Makassar 2011 and Beyond 2014

Tepat pada tanggal 6 November 2010, Program Visit Makassar 2011 and beyond 2014 secara resmi diluncurkan oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Bapak Ir. Jero Wacik digedung Sapto Pesona Kementerian Pariwisata, Jakarta. Launching Visit Makassar 2011 and beyond 2014 nantinya menjadi media yang sangat strategis untuk menunjukkan potensi Kota Makassar sebagai daerah tujuan wisata.

Program Visit Makassar 2011 and Beyond 2014 merupakan sebuah program yang lahir sebagai wujud Apresiasi Pemerintah Kota Makassar untuk menopang Program Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata serta Program Visit Makassar 2011 and Beyond 2014 merupakan program yang terarah dan berkesinambungan untuk meningkatkan sektor pariwisata dari tahun 2011 hingga tahun 2014.

Posisi Strategis Makassar And Beyond Dalam Konstelasi Pariwisata Nasional Dan Internasional

1. Fungsi Strategis Makassar sebagai Hub di Wilayah Timur Indonesia serta memiliki hubungan regional dan Internasional (Bali, Jakarta, Singapore, Malaysia, Australia, Belanda dan Afrika Selatan)
2. Memiliki Dukungan Sarana dan Prasana yang memadai sebagai tumpuan berkembangnya Pariwisata dalam mengembangkan daerah dan wilayah

3. Makassar berfungsi sebagai Living Room dan hub dengan Daerah Tujuan Wisata KTI yang memiliki kekayaan alam dan budaya nan eksotik dan telah dikenal dunia, seperti: Toraja, Kep. Takabonerate, Wakatobi, Halamahera, Raja Ampat, Banda, Bunaken, Togean-Tomini, dll
4. Memiliki Keragaman Produk Pariwisata yang lengkap (Waterfront City, Trans Studio/Theme Park Kelas Dunia, Keunikan Kuliner Serta Seni Budaya)
5. Memiliki Jejaring Wisata lintas pulau dan negara serta dukungan sarana prasarana dan aksesibilitas laut serta telah menjadi “Port of Call” bagi Jalur Pelayaran Int’ Cruise Ship

Program Strategis

Akselerasi arah kebijakan pembangunan melalui “Visit Makassar 2011 and Beyond 2014”

1. Pengembangan destinasi
2. Pengembangan event- event strategis
3. Pengembangan aksesibilitas udara, darat dan laut
4. Strategi promosi dan pemasaran yang lebih fokus
5. Pemberdayaan masyarakat
6. Pengembangan sdm dan kelembagaan

Table 25-Jadwal Singgah Kapal Pesiar Di Makassar Oktober 2009 S/D Awal Tahun 2011

No.	Jadwal	Nama Kapal	Jumlah
1	19 Oktober 2009	Costa Allegra	820 pax
2	2 November	Costa Allegra	820 pax
3	16 November	Costa Allegra	820 pax
4	2 Desember	Costa Allegra	820 pax
5	16 Desember	Costa Allegra	820 pax
6	29 Desember	Costa Allegra	820 pax
7	2 Januari 2010	Spirit of Adventure	352 pax
8	13 Januari	Costa Allegra	820 pax
9	27 Januari	Costa Allegra	820 pax
10	10 Februari	Costa Allegra	820 pax
11	10 November	Costa Romantica	1.356 pax
12	24 November	Costa Romantica	1.356 pax
13	8 Desember	Costa Romantica	1.356 pax
14	26 Januari 2011	Seabourn Spirit	212 pax
			Total 12.012 pax

Table 26-Pengembangan Event- Event Strategis Visit Makassar 2011 And Beyond 2014

DATE	NAME OF EVENT	VENUE	SCALE
JANUARY	MAKASSAR MICE OUTLOOK - Seminar and Workshop - Tourism Award	Clarion Hotel	internasional
FEBRUARY	CAP GO MEH - Cultural Parade - Seminar and Workshop - Malam Pesta Kesenian Rakyat FESTIVAL BARONGSAI ASEAN Int' YOUTH MEETING	China town Karebosi Clarion	Local International International
MARCH 9-13	FESTIVAL PERKUSI NUSANTARA MEGA BAZAR COMPUTER	Rotterdam CCC	National Local
APRIL	MAKASSAR 10K FUN RACE DRAGON BOAT FEMME 2011 MAKASSAR INTERNATIONAL FESTIVAL	Anjungan P.Losari Anjungan P.Losari Sahid Hotel Makassar	National National National International
MAY	MAKASSAR BIKE FESTIVAL - Munas HDCl, - Ride to Highlander, Expo & Entertainment	- Clarion Hotel	National
- JUNE 8 - 12	- FESTIVAL COMPUTER INDONESIA - TOUR de MAKASSAR - INTERNATIONAL WATER FESTIVAL - Int' Fleet Parade (Kapal Perang, Phinisi, dan Sandeq), Diving - Festival (Underwater Photo Contest, Pengibaran banner - Visit South Sulawesi dan Makassar 2011), Selam Massal, - Losari Expo, Water Ski, Lomba Perahu Jolloro, - IOXC (Indonesia Open Xtremesport Championship)	- CCC - Makassar - Kawasan P.Losari & Sekitarnya Karebosi	- National - International - National International

Diharapkan nantinya Program Visit Makassar 2011 and Beyond 2014 nantinya dapat menarik kunjungan wisatawan dalam maupun luar negeri.

BAB V

PENCAPAIAN KINERJA

A. Berdasarkan Indikator Makro Pembangunan

Kinerja Pembangunan Kota Makassar dapat dilihat dari perkembangan indikator Makro Pembangunan yang terdiri dari beberapa indikator diantaranya :

1. Pertumbuhan Ekonomi

Evaluasi pencapaian kinerja indikator makro pembangunan daerah dilihat dari aspek ekonomi dan sosial. Pada aspek ekonomi, tahun 2010 perekonomian Kota Makassar tumbuh 2,2 %, pertumbuhan ini mengalami kenaikan disebabkan karena seiring menjadikan Kota Makassar sebagai Living Room yang dimenjadi Kota Makassar sebagai Pusat Pengembangan/Distribusi Barang dan jasa di Kawasan Timur Indonesia.

Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kota Makassar juga dipengaruhi oleh dunia perbankan dimana jumlah pinjaman pada Tahun 2009 jumlah pinjaman sebesar Rp.21,94 Trilyun lebih, terdiri dari pinjaman modal kerja Rp. 9,65 Trilyun lebih, pinjaman investasi sebesar Rp.4,93 Trilyun lebih dan pinjaman konsumsi sebesar Rp.7,35 Trilyun lebih. Sedangkan pada Tahun 2010 jumlah pinjaman meningkat menjadi Rp.24,93 Trilyun lebih, terdiri dari pinjaman modal kerja Rp. 10,59 Trilyun lebih, pinjaman investasi sebesar Rp.5,84 Trilyun lebih dan pinjaman konsumsi sebesar Rp 8,49 Trilyun lebih.

Investasi dan Instrumen moneter dengan tingkat bunga yang responsif terhadap iklim investasi. Pada Tahun 2009 menghasilkan persetujuan investasi PMDN Rp.195,45 Milyar lebih dan PMA \$ US 13,87 Juta dan pada Tahun 2010 menghasilkan 6 persetujuan PMDN dengan Investasi Rp 1.265.796.075.422 Trilyun lebih dan 5 persetujuan PMA dengan Investasi \$ US 1.029.330. Juta.

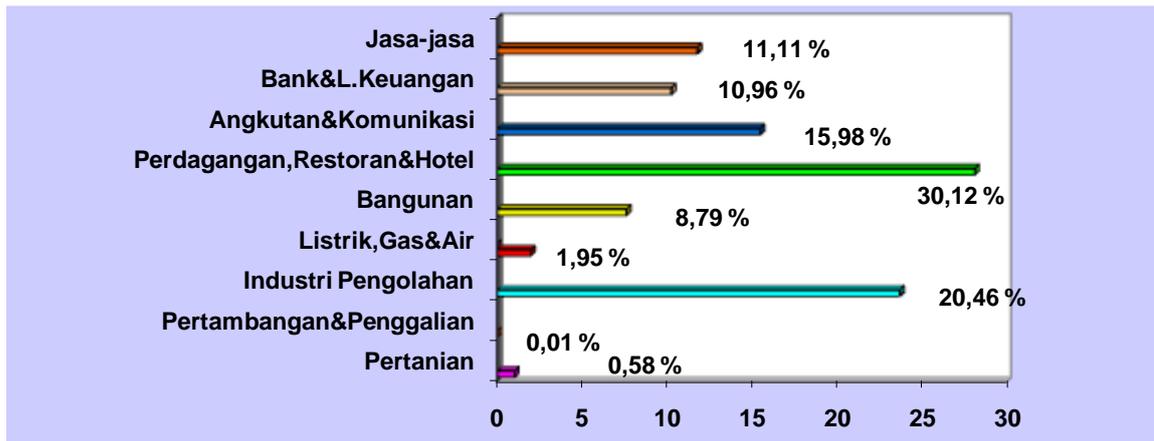
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sesuai harga berlaku pada Tahun 2009 sebesar Rp.31,26 Trilyun lebih dan pada Tahun 2010 naik menjadi Rp.36,73 Trilyun lebih. Pertumbuhan ekonomi yang baik ditandai dengan terkendalinya laju inflasi, dimana pada Tahun 2009 laju inflasi mencapai rata-rata sebesar 3,24 %, dan pada Tahun 2010 menjadi 6,82%, dan inflasi secara Nasional sebesar 11,64%, dengan kondisi tersebut, pertumbuhan ekonomi Kota Makassar pada Tahun 2009 sebesar 9,28% naik menjadi 9,31% pada Tahun 2010. Ini menunjukkan bahwa terjadi perbaikan atau peningkatan beberapa indikator-indikator makro ekonomi dan juga disebabkan oleh investasi Pemerintah Kota melalui APBD disamping peran swasta dalam sektor riil yang memacu peningkatan perekonomian.

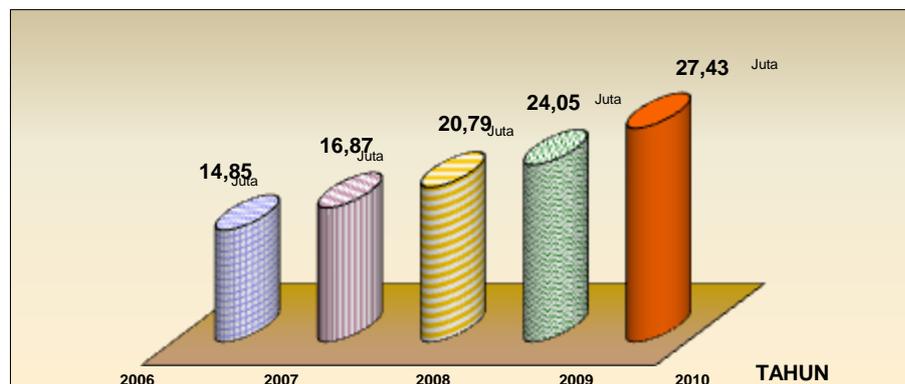
Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk Kota Makassar adalah angka perkapita bruto, pendapatan perkapita memperlihatkan perkembangan PDRB perkapita yang cukup berarti, yaitu pada Tahun 2009 sebesar **Rp.24,05** Juta lebih dan pada Tahun 2010 meningkat menjadi **Rp.27,43** juta lebih. Struktur Perekonomian Kota Makassar masih didominasi oleh sektor Perdagangan, Restoran dan Hotel.

Struktur ekonomi Tahun 2010 dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Gambar 4-Struktur Ekonomi Kota Makassar Tahun 2010



Gambar 5-PDRB Perkapita Kota Makassar Berdasarkan Harga Berlaku



3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara Spesifik Mengukur capaian pembangunan manusia secara keseluruhan dan bersifat agregatif yang berbasis pada sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM Kota Makassar dihitung berdasarkan data yang menggambarkan keempat komponen melalui komponen-komponen Indeks Pembangunan Manusia yaitu :

a. Indeks Harapan Hidup

Meningkatnya angka harapan hidup (AHH) memberikan indikasi membaiknya derajat kesehatan masyarakat. Untuk Kota Makassar, (AHH) terus mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2006 sekitar 72,20 Tahun, kemudian tahun 2007 meningkat menjadi 72,25 tahun dan tahun 2008 naik menjadi 72,89 tahun. Demikian juga dengan tahun 2009 meningkat menjadi 73,24 tahun.

b. Indeks Pendidikan

Terjadinya peningkatan kualitas dunia pendidikan sangat ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah fasilitas pendidikan yang lengkap, tersedianya tenaga pengajar yang berkualitas serta biaya pendidikan yang dapat dijangkau oleh

masyarakat, merupakan tiga hal yang memegang penting terhadap maju-mundurnya dunia pendidikan.

Dalam kurung waktu tahun 2005- 2009, rasio murid terhadap guru untuk Kota Makassar mengalami perbaikan, baik untuk tingkat SD, SLTP, dan SLTA.

Pada tahun 2005 Rasio murid terhadap guru SD sebanyak 33 murid setiap guru, ini berarti ada sekitar 3 murid yang harus ditangani oleh seorang Guru SD.

Pada tahun 2006 Rasio ini mengalami penurunan menjadi 24 murid setiap guru, tahun 2007 naik lagi menjadi 26 murid setiap guru, kemudian di tahun 2008 tetap pada 26 murid setiap guru dan pada tahun 2009 turun menjadi 22 murid setiap guru.

c. Indeks Paritas Daya Beli

Komponen PPP (Purchasing Power Parity) atau dikenal sebagai Komponen kemampuan daya beli atau standar hidup layak dalam laporan ini digunakan PDRB Riil perkapita. Penggunaan PDRB Riil perkapita ini karena data yang ideal (modus Komsumsi susenas)

B. Berdasarkan Capaian Bidang Kewenangan

Secara umum Pemerintah Kota Makassar telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Tingkat capaian kebijakan sebesar 94,65%. Rincian analisis capaian masing-masing program strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan

Pemerintah Kota Makassar telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. Capaian hasil atas pelaksanaan program strategis ini adalah 100%. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian program Peningkatan Kualitas Pendidikan adalah angka partisipasi kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), rata-rata hasil UASBN dan rata-rata hasil ujian nasional. Rincian atas masing-masing indikator kinerja terlihat pada tabel berikut.

Table 27-Indikator Kinerja Pada Peningkatan Kualitas Pendidikan

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
APK				
- SD	%	109	110	101%
- SMP	%	102	102	100%
APM				
- SD	%	98,65	99,08	100%
- SMP	%	94,15	94,79	101%
Rata-rata hasil UASBN SD/MT/SDLB		7,34	7,36	100%
Rata-rata hasil UN SMP/MTs/ SMPLB		7	6,98	100%
Rata-rata capaian kinerja				100%

Dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan Pemerintah Kota Makassar telah mencanangkan program pendidikan gratis hingga tingkat SLTP. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan program strategis ini diantaranya adalah:

- 1) Pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah;
- 2) Pengadaan buku dan alat tulis siswa;
- 3) Pengadaan buku pelajaran dan lembar kerja siswa;
- 4) Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS);
- 5) Penyediaan dana pengembangan sekolah yang mendukung tersedianya pendidikan gratis untuk 748 sekolah;
- 6) Pembinaan kelembagaan sekolah;
- 7) Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa;
- 8) Penyediaan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan (BOPP);
- 9) Pelaksanaan ujian nasional secara gratis;
- 10) Pendidikan lanjutan bagi pendidik dan tenaga kependidikan.

2. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

Dalam upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Pemerintah Kota Makassar telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dapat dilihat dari hasil yang dicapai yang tercermin pada rata-rata capaian kinerja program utama yang terkait yaitu sebesar 105% dengan rincian sebagai berikut.

Table 28-Pencapaian Kinerja Pada Program Utama

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase persalinan tertangani secara medis	%	85	92,82	109%
Persentase pelayanan kesehatan gakin	%	85	100	118%
Prevalensi gizi buruk	%	2,9	3,17	91%
Penurunan angka kesakitan DBD	per 100.000 penduduk	20	18	105%
Jumlah kelurahan sehat	kelurahan	109	114	105%
Jumlah puskesmas berstandar ISO	puskesmas	5	5	100%
Rata-rata capaian kinerja				105%

Dalam hal penanganan persalinan oleh tenaga medis, dari target 85% telah dicapai 92,82% atau dengan capaian 109%. Keberhasilan ini tentu akan membawa dampak pada penurunan angka kematian bayi dan ibu melahirkan. Upaya peningkatan kesehatan masyarakat juga terlihat dari capaian atas pelayanan kesehatan keluarga miskin, yaitu dari 85% gakin yang ditargetkan untuk dilayani telah tercapai sebesar 100% atau seluruh gakin mendapat pelayanan kesehatan. Hal ini tentu tidak terlepas dari peran pencaanangan program kesehatan gratis oleh Pemerintah Kota Makassar.

Dalam rangka menumbuhkan pola hidup sehat, Pemerintah Kota Makassar telah berhasil meningkatkan jumlah kelurahan sehat menjadi 114 kelurahan dari 143 jumlah seluruh kelurahan di Kota Makassar. Jumlah ini melebihi target yang telah ditetapkan atau telah dicapai sebesar 105%. Dalam hal jumlah puskesmas berstandar ISO Pemerintah Kota Makassar telah berhasil mencapai target 5 puskesmas pada tahun 2010. Pemerintah Kota Makassar juga telah berhasil menurunkan angka kesakitan DBD yaitu dari 20 per 100.000 penduduk yang menjadi target telah berhasil direalisasikan 18 per 100.000 penduduk atau dengan capaian 90%. Indikator yang belum mencapai target 100% adalah prevalensi gizi buruk, yaitu dari 2,9% yang ditargetkan baru dapat direalisasikan sebesar 3,17% atau dengan capaian 90%.

Keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai tersebut diantaranya didukung oleh pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagai berikut.

- 1) Pengadaan obat-obatan umum;
- 2) Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan program kesehatan gratis;
- 3) Peningkatan kesehatan masyarakat;
- 4) Revitalisasi posyandu;
- 5) Penyemprotan/fogging sarang nyamuk;
- 6) Pelayanan rujukan di rumah sakit;
- 7) Pengadaan alat medic;
- 8) Pembangunan/rehabilitasi puskesmas;
- 9) Pembangunan rumah sakit;
- 10) Pengadaan peralatan bank darah.

3. Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Budaya Dan Agama

Capaian atas program utama Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Budaya dan Agama adalah 100%. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program utama ini adalah Jumlah PMKS, Jumlah Keluarga Miskin, Jumlah Keluarga Berumah Tak Layak Huni, Jumlah Sarana Sosial.

Table 29-Jumlah Pmks, Keluarga Miskin Dan Keluarga Tak Layak Huni

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Jumlah PMKS	Orang	38.695	38.695	100%
	KK	88.145	88.145	100%
Jumlah Keluarga Miskin	KK	45.236	45.236	100%
Jumlah Keluarga Berumah Tak Layak Huni	KK	3.197	3.197	100%
Jumlah sarana sosial (panti asuhan/panti guna)	%	89	89	100%
Rata-rata capaian kinerja				100%

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Makassar untuk mendukung program utama ini diantaranya adalah:

- 1) Pembentukan dan pembinaan kelompok usaha bersama (KUBE) fakir miskin;
- 2) Pemberdayaan dan pembinaan usaha ekonomis produktif bagi fakir miskin;
- 3) Rehabilitasi rumah tak layak huni bagi keluarga miskin;
- 4) Latihan kerja pola kemitraan usaha produktif;
- 5) Penyuluhan sosial bagi PMKS;
- 6) Pembinaan rehabilitasi sosial anak jalanan/ gepeng dan pengamen;
- 7) Penegakan Perda no.2 tahun 2008;
- 8) Pengiriman pelatihan anak terlantar ke PSBR;
- 9) Sosialisasi pembentukan jaringan UKS/ WKSBM.

4. Pembinaan Pemuda Dan Olahraga

Capaian atas Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga adalah sebesar 50%. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program ini adalah peringkat yang dicapai dalam kompetisi baik dalam PORDA maupun Pemuda Pelopor tingkat Nasional. Dari target yang telah ditetapkan, Kota Makassar telah berhasil menempati peringkat pertama dalam PORDA. Dengan demikian, capaian atas indikator ini sebesar 100%. Namun demikian, dalam hal capaian atas target peringkat 3 menjadi pemuda pelopor tingkat nasional belum berhasil dicapai.

Table 30-Program Pembinaan Pemuda Dan Olahraga

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Peringkat prestasi dalam Porda	peringkat	1	1	100%
Peringkat pemuda pelopor tingkat nasional	peringkat	3	0	0%
Rata-rata Capaian				50%

Untuk mendukung program ini Pemerintah Kota Makassar telah melaksanakan kegiatan-kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut:

- ✚ Pelatihan keterampilan life skill;
- ✚ Lomba kreasi karya tulis ilmiah di kalangan pemuda;
- ✚ Pemilihan pemuda pelopor tingkat Kota Makassar;
- ✚ Kemah bakti pemuda/ kemah kesatuan;
- ✚ Penumbuhan dan pengembangan sentra pemberdayaan pemuda;
- ✚ Advokasi dan penyelamatan pemuda dari bahaya NAPZA dan HIV/AIDS;
- ✚ Permasalahan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat.

5. Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Dan Kesetaraan Gender

Capaian program peningkatan kesejahteraan keluarga dan kesetaraan gender Pemerintah Kota Makassar adalah sebesar 85,45%. Untuk mengukur keberhasilan program ini indikator yang digunakan adalah persentase perempuan yang menjadi pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Makassar, jumlah peserta KB dan jumlah peserta KB aktif menjadi KB Lestari. Dalam hal komposisi pejabat perempuan di lingkup Pemerintah Kota Makassar capaiannya adalah 100%. Penetapan target kinerja indikator ini dilakukan pada saat penyusunan LAKIP mengingat indikator kinerja utama baru dilakukan di akhir tahun.

Jika dilihat dari komposisi pejabat perempuan maka secara umum masih belum mencapai kesetaraan antara pejabat laki-laki dan perempuan. Hal ini terlihat dari 1809 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Makassar jumlah pejabat perempuan sebanyak 663 orang atau 36,65% dari jumlah seluruh pejabat.

Dalam hal kepesertaan KB, Pemerintah Kota Makassar telah berhasil mencapai target 100%. Dari 175.443 pasangan usia subur (PUS) yang ditargetkan menjadi peserta seluruhnya telah tercapai 100%. Untuk indikator peserta KB aktif menjadi KB lestari capaian indikator kinerja adalah sebesar 70,91%. Dari 112.192 peserta KB aktif yang diharapkan menjadi KB lestari baru 79.550 % yang meningkat menjadi KB lestari.

Table 31-Indikator Kesejahteraan Keluarga Dan Kesetaraan Gender

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase perempuan yang menjadi pejabat di lingkungan Pemkot Makassar	%	36,65	36,65	100%
Jumlah peserta KB	PUS	175.443	175.443	100%
Jumlah peserta KB aktif menjadi KB lestari	Peserta KB	112.192	79.550	70,91%
Rata-rata capaian kinerja				85,45%

Pemerintah Kota Makassar telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian hasil atas program utama di atas. Kegiatan-kegiatan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT;
- 2) Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan;
- 3) Pembinaan organisasi perempuan;
- 4) Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera;
- 5) Kegiatan pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan;
- 6) Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A);
- 7) Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin;
- 8) Pembinaan keluarga berencana;
- 9) Pengadaan alat kontrasepsi dan peralatan medis;
- 10) Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB.

6. Penataan Ruang

Keberhasilan program penataan ruang diukur dari penurunan kasus konflik pemanfaatan ruang dan kasus pelanggaran pemanfaatan ruang. Selama tahun 2010 Kota Makassar menetapkan penurunan kedua kasus ini sebesar 10% dibandingkan dengan jumlah kasus yang terjadi pada tahun sebelumnya. Rincian capaian atas indikator penataan ruang adalah sebagai berikut.

Table 32-Indikator Penataan Ruang

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase penurunan jumlah kasus konflik pemanfaatan ruang	%	10	0	0%
Persentase penurunan pelanggaran pemanfaatan ruang	%	10	0	0%
Jumlah kegiatan penyusunan rencana detail tata ruang kawasan olah raga terpadu Kota Makassar	Kegiatan	1	1	100%
Jumlah dokumen revisi RTRW Kota Makassar	Dokumen	1	1	100%
Jumlah kegiatan penyusunan standar mutu pelayanan ISO 9001:2000 untuk IMB	Kegiatan	2	1	50%
Rata-rata Capaian				75%

Kasus konflik pemanfaatan ruang tahun 2010 sebanyak 4 kasus. Jika dibandingkan dengan kasus yang sama pada tahun 2009 angka ini mengalami kenaikan dari 1 kasus. Dengan demikian, target penurunan kasus ini belum bisa dicapai. Sedangkan untuk jumlah kasus pelanggaran pemanfaatan ruang tahun 2010 sebanyak 699 kasus. Jika dibandingkan dengan jumlah kasus yang terjadi pada tahun sebelumnya 2009, angka ini mengalami kenaikan sebesar 50 kasus atau 7,70% dari 649 kasus pada tahun sebelumnya. Dengan kata lain, target penurunan jumlah kasus pelanggaran pemanfaatan ruang belum dapat dicapai secara optimal. Pemerintah Kota Makassar pada dasarnya telah berusaha untuk melaksanakan program penataan ruang dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan;
- 2) Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
- 3) Penyusunan Rencana Koefisien Dasar Bangunan dan Koefisien Lantai Bangunan (KDB/KLB) di Kecamatan Tamalanrea;
- 4) Penataan Arsip IMB dalam Bentuk Digital;
- 5) Sosialisasi Regulasi Tata Ruang dan Bangunan melalui Media;
- 6) Pembuatan Papan Informasi IMB dan Papan Informasi GSP/SB;
- 7) Pengawasan Pemanfaatan Ruang.

7. Peningkatan Infrastruktur Kota

Capaian atas program utama peningkatan infrastruktur kota yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Makassar adalah sebesar 95,90%. Indikator kinerja yang digunakan untuk menilai hasil dari pelaksanaan program utama Peningkatan Infrastruktur Kota menyangkut sarana jalan, jembatan dan drainase, pelayanan sanitasi air untuk masyarakat serta prasarana perhubungan dan keamanan kota terhadap musibah kebakaran. Rincian capaian masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

Table 33-Indikator Peningkatan Infrastruktur

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase jalan dalam kondisi baik	%	90	64,54	72%
Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	93,48	93,48	100%
Panjang drainase yang dibangun	m	4.448	4.448	100%
Peningkatan jumlah KK yang mendapatkan pelayanan sanitasi air	KK	269	269	100%
Jumlah peningkatan marka jalan yang terpasang	m	1.700	1.700	100%
Jumlah rambu lalu lintas dalam kondisi baik	unit	200	200	100%
Penurunan frekwensi kebakaran	%	15	14,94	99,60%
Rata-rata capaian kinerja				95,90%

Pemerintah Kota Makassar telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk meningkatkan infrastruktur kota untuk menuju tercapainya kota dunia yang berlandas kearifan lokal. Kegiatan-kegiatan tersebut diantaranya adalah:

- 1) Pembangunan jalan;
- 2) Pemasangan paving blok;
- 3) Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong;
- 4) Rehabilitasi/pemeliharaan jalan;
- 5) Rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong;
- 6) Pengukuran dan pematokan jalan;
- 7) Pemeliharaan jalan kota lainnya;
- 8) Pengadaan tanah jalan;
- 9) Rehabilitasi/ pemeliharaan alat-alat berat;
- 10) Pembangunan sarana dan prasarana air bersih (DAK);
- 11) Penyediaan sarana dan prasarana air minum bagi MBR;
- 12) Pengadaan Lampu Jalan;
- 13) Langganan penerangan lampu jalan;
- 14) Piket rutin petugas pemadam kebakaran.

8. Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pemerintah Kota Makassar telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk melaksanakan program strategis pengelolaan lingkungan hidup. Capaian kinerja program strategis program Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebesar 96,62%. Capaian masing-masing indikator kinerja adalah sebagai berikut:

Table 34-Indikator Pengelolaan Lingkungan Hidup

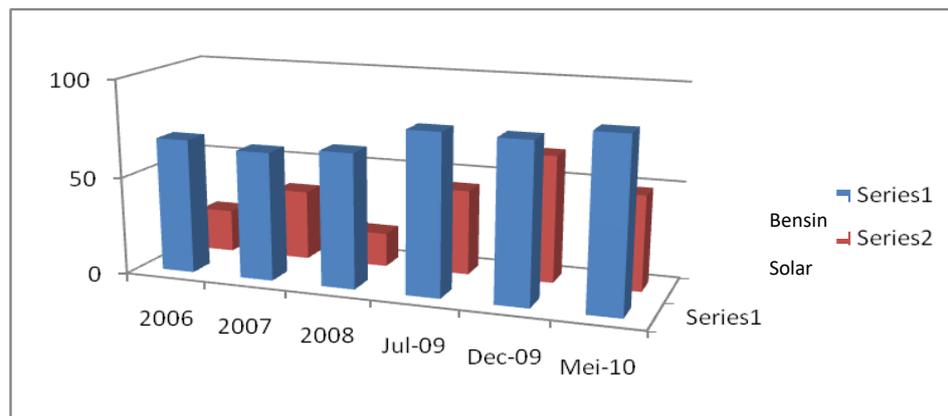
INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Tempat pembuangan sampah per satuan penduduk	%	25	21	84,00%
Penanganan sampah	%	90	89,19	99,10%
Persentase kendaraan berbahan bakar bensin dan solar yang lulus uji emisi gas buang	%	67,85	67,85	100%
Persentase kasus lingkungan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100%
Persentase perusahaan yang mempunyai dokumen lingkungan	%	16,40%	16,40%	100%
Rata-rata Capaian				96,62%

Dalam upaya penanganan kebersihan, penanganan sampah yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar telah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Dari 90% target penanganan sampah telah direalisasikan sebesar 89,21% atau 99,12% dari target. Volume sampah yang ditangani selama tahun 2010 adalah 3373,42 m³ atau 89,21% dari volume timbulan sampah.

Capaian indikator tempat pembuangan sampah per satuan penduduk adalah 84% atau telah direalisasikan 21% dari target sebesar 25%. Tempat pembuangan sampah persatuan penduduk merupakan rasio atas daya tampung TPS dibandingkan dengan jumlah penduduk.

Realisasi persentase kendaraan berbahan bakar bensin dan solar tahun 2010 sebesar 67,85%. Angka ini merupakan rata-rata gabungan antara hasil kendaraan berbahan bakar bensin yang lulus uji (87,05%) dan kendaraan berbahan bakar solar (48,65%). Dari hasil pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor yang dilaksanakan dari tahun 2006 hingga 2010 menunjukkan bahwa emisi gas buang kendaraan bermotor yang memenuhi baku mutu kecenderungannya mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena kesadaran dan kepedulian para pengguna kendaraan untuk memelihara dan mempertahankan kualitas kendaraannya semakin meningkat. Adapun perbandingan data grafik persentase kendaraan berbahan bakar bensin dan solar yang lulus pada uji emisi gas buang dari Tahun 2006 hingga Mei 2010 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 6-Perbandingan Grafik Persentase Kendaraan Berbahan Bakar Bensin Dan Solar Yang Lulus Pada Uji Emisi Gas Buang Dari Tahun 2006 Hingga Mei 2010



Tampak pada Tabel bahwa pada tahun 2006 rata-rata kendaraan berbahan bakar bensin yang memenuhi baku mutu kualitas emisi gas buang yaitu 68,94% dari 132 kendaraan, pada tahun 2007 menurun menjadi 65,56% dari 180 kendaraan kemudian pada tahun 2008 sampai pada tahun 2010 mengalami peningkatan secara signifikan berturut-turut 68,62% dari 239 kendaraan, 81,12% dari 143 kendaraan dan 87,05% dari 224 kendaraan yang memenuhi baku mutu kualitas emisi gas buang kendaraan bermotor. Sedangkan untuk kendaraan yang berbahan bakar solar mengalami fluktuatif dari tahun 2006 hingga tahun 2010. Jumlah kendaraan yang memenuhi baku mutu kualitas emisi gas buang kendaraan dari tahun 2006 sampai tahun 2010 berturut – turut 21,92% dari 73 kendaraan, 35,86% dari 145 kendaraan, 17,31% dari 52 kendaraan, 64,91% dari 57 kendaraan dan 48,65% dari 111 kendaraan.

Pada tahun 2010, tingkat kinerja untuk pembahasan dokumen lingkungan meliputi koordinasi dan penilaian dokumen AMDAL dan evaluasi dokumen UKL-UPL. Selama tahun 2010 terdapat pembahasan dan penilaian dokumen AMDAL sebanyak 6 (enam) dokumen dan evaluasi dokumen UKL-UPL/DPPL yaitu sebanyak 28 (dua puluh delapan) dokumen.

Jika dilihat dari persentase dari keseluruhan perusahaan yang wajib mempunyai dokumen lingkungan hidup maka persentase perusahaan yang mempunyai dokumen lingkungan hidup sebesar 16,40%. Artinya dari 378 perusahaan yang harus mempunyai dokumen lingkungan hidup hingga tahun 2010 baru 62 perusahaan yang telah memiliki dokumen lingkungan hidup yang berupa UKL-UPL/DPPL dan AMDAL. Dengan kata lain masih ada 316 perusahaan yang belum memiliki.

Selama tahun 2010 terdapat 14 (empat belas) kasus lingkungan yang dilaporkan oleh masyarakat. Tindaklanjut atas seluruh kasus tersebut adalah sebagai berikut: satu kasus diantaranya dalam proses hukum, satu kasus telah dibuatkan telaahan staf kepada Walikota Makassar untuk mendapatkan instruksi lebih lanjut dan 12 (dua belas) lainnya sudah ditindaklanjuti melalui pemantauan dan klarifikasi laporan, koordinasi instansi terkait serta melakukan pengelolaan lingkungan yang sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal lain yang menjadi indikator untuk menilai pengelolaan lingkungan hidup adalah hasil pengujian kualitas air. Pada tahun 2010 dilakukan pengujian kualitas air limbah kepada 3 (tiga) rumah sakit yaitu Rumah Sakit Pelamonia, Ibnu Sina dan Bhayangkara, 3 (tiga) restoran/rumah makan yaitu restoran/rumah makan Mie Titi Jl. Datuk Museng, Java Mie dan Makassar Suki, 3 (tiga) industri yaitu industri Makassar Te'ne, UD. Duta Motor dan PT.

Barawaja, 2 (dua) air sungai yaitu Sungai Tallo dan Jeneberang, 2 (dua) air laut dengan lokasi Pantai Losari dekat Makassar Golden Hotel dan Depan Benteng Rotterdam serta 1 (satu) air danau yaitu Danau Balang Tonjong. Hasil pengujian kualitas air telah dijumpai beberapa parameter kualitas air yang melampaui baku mutu berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pengelolaan, Pengendalian Pencemaran Air, Udara, Penetapan Baku Mutu Limbah Cair, Baku Mutu Udara Ambient dan Emisi serta Baku Tingkat Gangguan Kegiatan yang Beroperasi di Propinsi Sulawesi Selatan.

Pada pengujian air limbah rumah sakit yang dilakukan kepada 3 (tiga) rumah sakit menunjukkan bahwa dari tujuh parameter uji terdapat rata-rata 4 (empat) parameter melampaui baku mutu yaitu parameter BOD5, COD, Zat Padat Tersuspensi dan NH3-Bebas. Hal ini akan memberikan dampak yang signifikan terhadap lingkungan bilamana tidak dilakukan upaya-upaya pengelolaan lingkungan. Hal yang sama juga ditemukan beberapa parameter yang melampaui baku mutu pada pengujian kualitas air limbah restoran, air sungai, kanal maupun danau.

9. Pengembangan Komoditas Unggulan

Pemerintah Kota Makassar telah melaksanakan berbagai upaya pengembangan komoditas unggulan. Capaian hasil atas program utama ini adalah 83% yang diukur dari kinerja bidang perikanan, pertanian, peternakan, ketahanan pangan dan sektor pariwisata. Capaian rata-rata dari program utama ini adalah sebagai berikut.

Table 35-Indikator Pengembangan Komoditas Unggulan

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Produksi Perikanan Tangkap	Ton	18.538	18.538	100%
Produksi Padi	Ton	19.163	19.163	100%
Persentase penurunan kasus penyakit ternak	%	20	0	0%
Ketersediaan pangan	Ton	2.140.157	2.050.000	96%
Jumlah PAD sektor pariwisata	Rp	490.462.000	490.462.000	100%
Jumlah kunjungan wisata	wisatawan	2.101.237	2.101.237	100%
Rata-rata capaian kinerja				83%

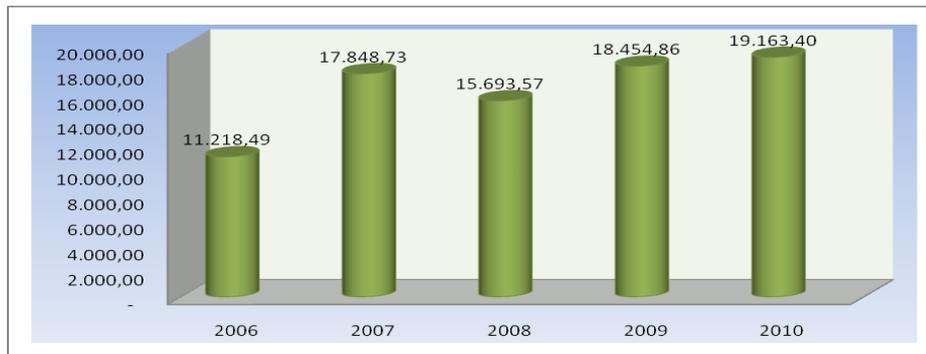
Dalam hal peningkatan produksi perikanan terlihat adanya kenaikan secara terus menerus selama rentang waktu lima tahun terakhir. Tahun 2010 produksi perikanan tangkap mencapai 18.536 ton atau meningkat 209 ton dibandingkan produksi tahun sebelumnya sebanyak 18.327 ton.

Gambar 7-Perbandingan Grafik Persentase Produksi Perikanan Tangkap

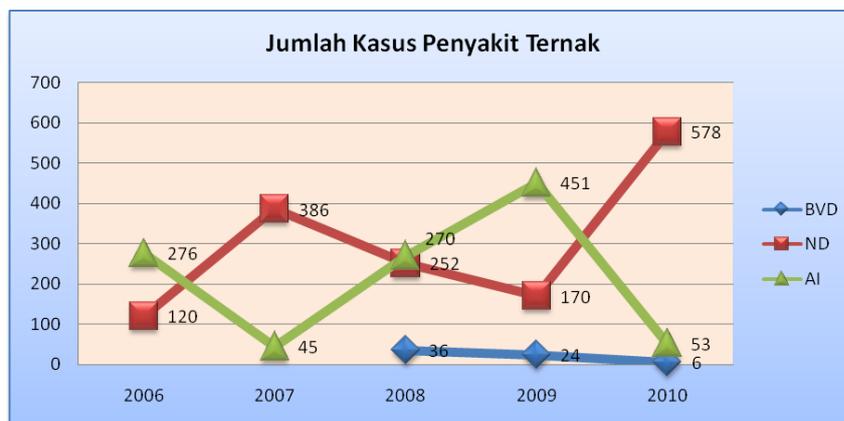


Peningkatan produksi juga dialami dalam bidang pertanian khususnya produksi padi yang mencapai 19.163,40 ton pada tahun 2010. Tren produksi padi juga menunjukkan kenaikan secara terus menerus dari tahun ke tahun. Peningkatan yang cukup tinggi dialami pada tahun 2009 yang meningkat hingga 14,96%. Peningkatan ini terus dialami hingga tahun 2010 meskipun tidak sebesar tahun sebelumnya.

Gambar 8-Diagram Produksi Padi (Gkg) Tahun 2006-2010 Di Kota Makassar



Gambar 9-Jumlah Kasus Penyakit Ternak



Dalam upaya pengendalian penyakit ternak, Pemerintah Kota Makassar telah melaksanakan vaksinasi baik ternak besar maupun ternak kecil. Hasil atas kegiatan vaksinasi ini terlihat dari adanya penurunan jumlah kasus penyakit ternak. Penyakit hewan menular yang mengalami penurunan signifikan pada tahun 2010 adalah penyakit rabies dan AI. Penyakit Rabies menurun dari 6 pada tahun 2009 menjadi 2 kasus pada tahun 2010. Sedangkan untuk penyakit AI atau flu burung mengalami penurunan dari 451 kasus pada tahun 2009 menjadi 53 kasus pada tahun 2010. Faktor yang mendukung penurunan ini diantaranya adalah adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencegahan penyakit melalui manajemen pemeliharaan unggas yang lebih baik. Sedangkan untuk kasus ND pada unggas mengalami peningkatan yang cukup signifikan, atau dari 170 kasus pada tahun 2009 menjadi 578 pada tahun 2010.

Indikator lain yang terkait dengan peningkatan komoditas unggulan terlihat dari capaian atas jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Makassar. Dari tahun ke tahun jumlah wisatawan yang berkunjung menunjukkan angka yang terus meningkat hingga mencapai 2.101.237 orang pada tahun 2010. Peningkatan ini hampir dua kali lipat jika dibandingkan dengan jumlah wisatawan pada tahun 2006.

Gambar 10-Kunjungan Wisatawan



Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun domestik membawa dampak pada peningkatan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata Kota Makassar yang juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Gambar 11-Jumlah Pad Sektor Pariwisata



Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar selama tahun 2010 dalam rangka peningkatan komoditas unggulan ini diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) DAK pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
- 2) Operasional pengadaan sarana dan prasarana PPI Paotere dan TPI Rajawali;
- 3) Pengembangan sarana dan prasarana PPI Paotere;
- 4) Pengadaan sarana pendukung penangkapan;
- 5) DAK pengadaan sarana dan prasarana pemasaran hasil perikanan;
- 6) Expo perikanan;
- 7) DAK pembangunan sarana dan prasarana BBI Parang Tambung;
- 8) Operasional pasar petani;
- 9) Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian (DAK);
- 10) Pengawasan perdagangan ternak antar daerah;
- 11) Surveylance penyakit hewan;
- 12) Pencegahan dan pengendalian penyakit AI dan ND (unggas);
- 13) Pencegahan dan pengendalian penyakit SE dan Anthraks;
- 14) Pencegahan dan pengendalian penyakit rabies;

10. Peningkatan Ketahanan Ekonomi

Capaian kinerja atas program utama Peningkatan Ketahanan Ekonomi Kota Makassar adalah sebesar 100%. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program utama ini adalah peningkatan jumlah rekomendasi SITU/SIUP dan pertumbuhan industri kecil dan menengah. Rincian dari masing-masing indikator kinerja adalah sebagai berikut.

Table 36-Indikator Ketahanan Ekonomi

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Peningkatan jumlah rekomendasi SITU/SIUP	%	24,40%	24,40%	100%
Pertumbuhan Industri Kecil	Unit	4.954	4.954	100%
Pertumbuhan Industri Menengah	Unit	416	416	100%
Rata-rata capaian kinerja				100%

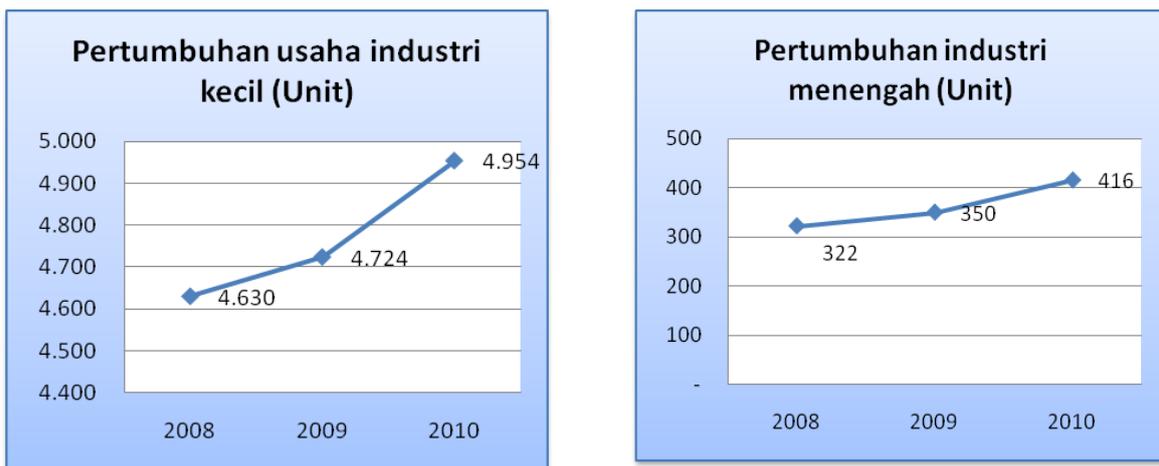
Dalam hal perkembangan izin usaha Kota Makassar terlihat bahwa telah terjadi peningkatan jumlah rekomendasi situ dari tahun ke tahun. Peningkatan rekomendasi situ tahun 2010 dibandingkan dengan tahun sebelumnya adalah 27,96% atau meningkat dari 4.910 unit pada tahun 2009 menjadi 6.283 unit pada tahun 2010. Sedangkan pertumbuhan izin SIUP adalah 20,84% atau meningkat dari 4.622 unit pada tahun 2009 menjadi 5.585 unit pada tahun 2010.

Gambar 12-Perkembangan Izin Usaha



Peningkatan jumlah rekomendasi usaha berkorelasi positif dengan pertumbuhan industri kecil dan menengah. Terlihat dalam grafik di bawah bahwa pertumbuhan usaha industri kecil dan menengah meningkat. Grafik berikut menunjukkan bahwa pertumbuhan usaha industri kecil meningkat dari 4.724 unit pada tahun 2009 menjadi 4.954 unit pada tahun 2010 atau meningkat sebesar 230 unit atau 4,87%. Pertumbuhan industri kecil turut meningkatkan jumlah tenaga kerja yang terserap. Tahun 2010 jumlah tenaga kerja yang terserap pada seluruh usaha industri kecil adalah 35.178 orang atau meningkat sebanyak 1.014 orang dibandingkan jumlah usaha industri ini pada tahun 2009.

Gambar 13-Pertumbuhan Usaha Industri Kecil Dan Industri Menengah (Unit)



Pertumbuhan industri menengah mengikuti pola yang sama dengan pertumbuhan industri kecil. Jumlah unit industri menengah meningkat hingga mencapai 416 atau meningkat sebanyak 66 unit jika dibandingkan jumlah yang ada pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini juga membawa dampak positif terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja yang terserap. Jumlah tenaga kerja yang terserap dalam industri ini adalah 15.753 tenaga kerja atau meningkat sebanyak 1.602 tenaga kerja atau 11,32% dibandingkan tahun lalu.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Makassar untuk melaksanakan program utama Peningkatan Ketahanan Ekonomi diantaranya adalah:

- 1) Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan;
- 2) Pengawasan penyidikan Wajib Daftar Perusahaan (WDP);
- 3) Rehabilitasi/ renovasi pasar (DAK);
- 4) Penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan;
- 5) Pelatihan peningkatan kemampuan pengelolaan usaha pedagang kecil dan menengah;
- 6) Sosialisai peraturan penanaman modal;
- 7) Sosialisasi kebijakan tentang usaha kecil menengah;
- 8) Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah;
- 9) Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah (UMKM);
- 10) Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha-usaha koperasi.

11. Pengembangan Investasi Dan Regulasi Usaha

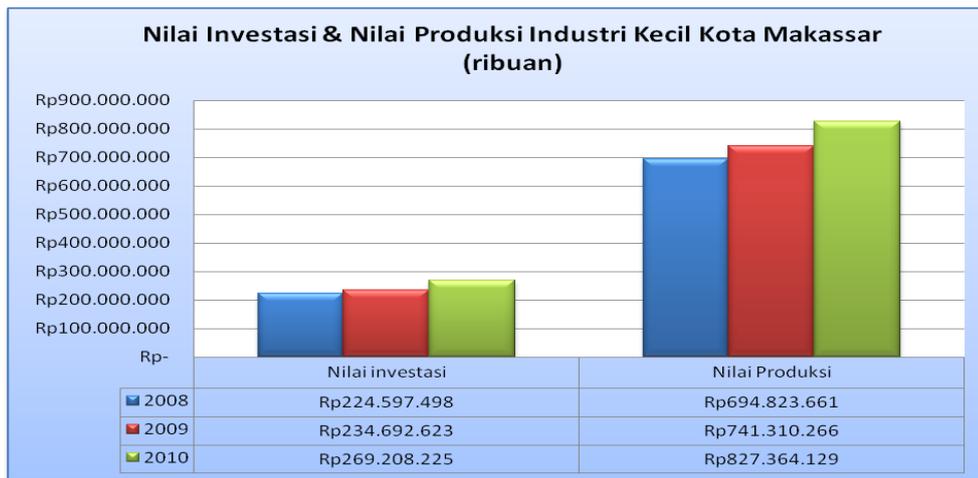
Pemerintah Kota Makassar telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk mengembangkan investasi dan regulasi usaha. Capaian atas program utama ini adalah sebesar 100%. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program utama pengembangan investasi dan regulasi usaha adalah nilai investasi industri kecil dan menengah, dan realisasi penanaman modal. Rincian masing-masing indikator kinerja adalah sebagai berikut:

Gambar 14-Indikator Pengembangan Investasi Dan Regulasi Usaha

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Nilai Investasi Industri Kecil (ribuan)	Rp	269.208.225	269.208.225	100%
Nilai Investasi Industri Menengah (ribuan)	Rp	3.018.976.772	3.018.976.772	100%
Realisasi PMA	US \$	1.029.330	1.029.330	100%
Realisasi PMDN	Rp	2.972.376.087.551	2.972.376.087.551	100%
Rata-rata capaian kinerja				100%

Nilai investasi industri kecil dan industri menengah terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hingga akhir tahun 2010 nilai investasi untuk industri kecil sebesar Rp.269.208.225 atau meningkat sebesar 13,23%. Peningkatan ini jauh lebih besar dibandingkan dengan peningkatan investasi tahun sebelumnya yang hanya meningkat sebesar 4,49%. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan nilai produksi industri kecil yang mencapai Rp.827.364.129 pada tahun 2010 atau meningkat sebesar 10,4%.

Gambar 15-Nilai Investasi Dan Produk Industri Kecil



Nilai investasi industri menengah hingga tahun 2010 mencapai Rp.1.251.272.891.000 atau meningkat sebesar 10,11% dibandingkan dengan nilai investasi industri yang sama pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini pun jauh lebih tinggi dibanding peningkatan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 3,16%. Peningkatan nilai produksi industri menengah jauh lebih besar dibandingkan dengan nilai investasinya. Tahun 2010 nilai produksi industri menengah mengalami peningkatan sebesar 17,20% dibandingkan tahun sebelumnya hingga mencapai Rp.3.018.976.772.000.

Gambar 16-Nilai Investasi Produksi Industri Menengah



Indikator kinerja lain yang mengukur keberhasilan program utama ini adalah realisasi investasi PMA dan PMDN. Pertumbuhan investasi untuk tahun 2010 cenderung negatif atau mengalami penurunan sebesar 92% hingga mencapai US\$1.029.330. Di sisi lain realisasi investasi PMDN mengalami peningkatan yang sangat signifikan sebesar 547,7% hingga mencapai Rp.1.265.796.075.422.

Table 37-Pertumbuhan Investasi (Pma) Kota Makassar

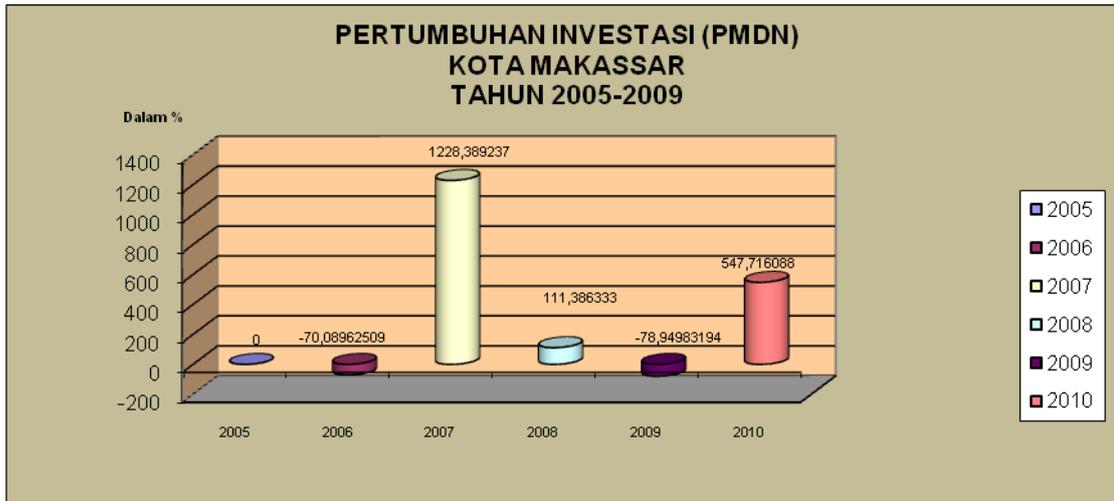
TAHUN	PROYEK	INVESTASI (US \$)	AREAL (Ha)	TENAGA KERJA		PERTUMBUHAN (%)
				IND	ASING	
2005	7	113,711,200	-	833	18	0
2006	2	33,215,700	7	385	10	-70.8
2007	29	227,902,951	2,595	1,307	30	586.1
2008	14	18,629,070	8	356	13	-91.8
2009	6	13,878,248	9	327	0	-25.5
2010	5	1,029,330	0			-92.6
TOTAL	63	408,366,499.00	2,618	3,208	71	

TAHUN	PROYEK	INVESTASI (Rp)	AREAL (Ha)	TENAGA KERJA		PERTUMBUHAN
				IND	ASING	
2005	7	110,534,890,000	2.4	742	-	0
2006	3	33,061,400,000	22.4	691	1	-70.1
2007	15	439,184,079,129	73,483	2,350	2	1,228.4
2008	11	928,375,120,000	0	54	0	111.4
2009	2	195,424,523,000	35	72	0	-78.9
2010	6	1,265,796,075,422	0	0	0	547.7
TOTAL	44	2,972,376,087,551	73,543	3,909	3	

Gambar 17-Pertumbuhan Investasi PMA



Gambar 18-Pertumbuhan Investasi (PMDN)



Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung keberhasilan pencapaian program utama ini antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan data potensi dan peluang investasi;
- 2) Sosialisai peraturan penanaman modal;
- 3) Pengembangan potensi keunggulan daerah;
- 4) Penyelenggaraan pameran investasi;
- 5) Bimbingan teknis dan pembinaan promosi penanaman modal;
- 6) Peningkatan pemantauan, pembinaan dan pelaksanaan penanaman modal.

12. Peningkatan Kesempatan Kerja Dan Berusaha

Pemerintah Kota Makassar telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk mendukung program utama peningkatan kesempatan kerja dan berusaha. Untuk mengukur hasil dari pelaksanaan program ini indikator yang digunakan adalah tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja, pencari kerja yang ditempatkan dan persentase kasus pengusaha dan tenaga kerja yang difasilitasi. Capaian kinerja atas program ini adalah sebesar 100% dengan rincian sebagai berikut:

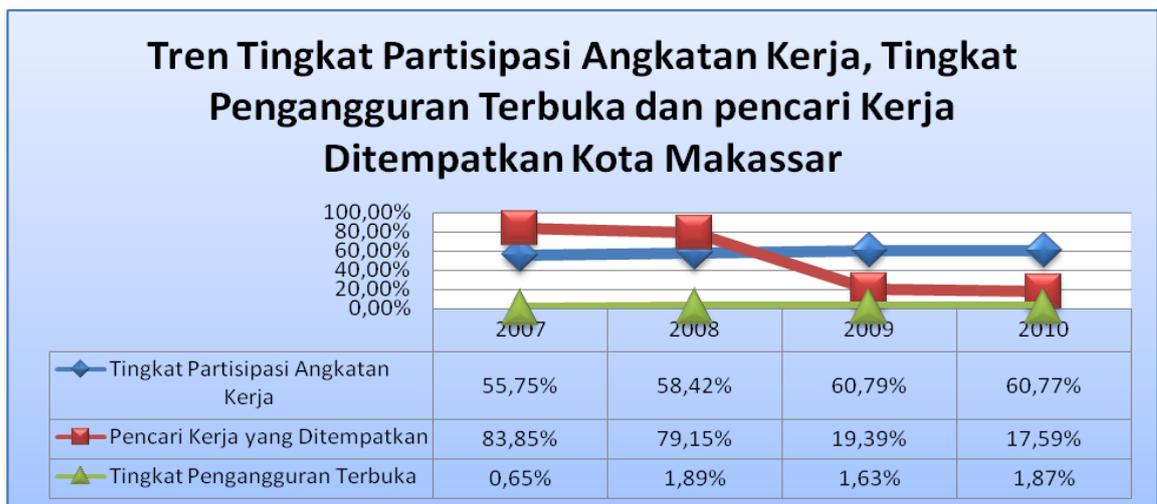
Table 38-Indikator Peningkatan Kerja Dan Berusaha

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,87	1,87	100%
Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	60,77	60,77	100%
Pencari Kerja yang Ditempatkan	%	17,59	17,59	100%
Persentase kasus sengketa pengusaha dan tenaga kerja yang difasilitasi	%	100	100	100%
Rata-rata capaian kinerja				100,00%

Tren tingkat pengangguran terbuka menunjukkan adanya fluktuasi. Tahun 2008 angka ini mengalami peningkatan hingga mencapai 1,89%. Kemudian mengalami penurunan menjadi 1,63% sebelum kembali meningkat menjadi 1,87% pada tahun 2010. Dari 622.312 angkatan kerja pada tahun 2010 jumlah pencari kerja 11.631 orang.

Peningkatan pengangguran terbuka ini seiring dengan penurunan jumlah pencari kerja yang ditempatkan. Angka ini terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Penurunan yang paling tajam dialami pada tahun 2009 hingga mencapai 19,39% sebelum akhirnya menjadi 17,59% pada tahun 2010. Angka ini menunjukkan bahwa dari 11.768 pencari kirja yang mendaftar hanya 2.070 pencari kerja yang ditempatkan. Penurunan pencari kerja yang ditempatkan ini disebabkan adanya jumlah peningkatan pencari kerja yang mendaftar yang meningkat cukup besar dari 4.038 tahun 2006 menjadi 11.768 tahun 2010. Lebih jauh lagi penurunan juga disebabkan adanya penurunan jumlah pencari kerja yang ditempatkan yang menurun dari 4.037 tahun 2006 menjadi 2.070 tahun 2010.

Gambar 19-Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka



Dalam hal penyelesaian kasus sengketa pengusaha Pemerintah Kota Makassar telah berhasil menyelesaikan seluruh kasus yang dilaporkan. Dari 126 kasus yang dilaporkan seluruhnya telah difasilitasi.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung terlaksananya program utama peningkatan kesempatan kerja dan berusaha diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja;
- 2) Pencarian lowongan dan penyuluhan pencari kerja;
- 3) Fasilitasi prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- 4) Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan;
- 5) Pembinaan serikat pekerja (SP) / serikat buruh (SB);
- 6) Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.

13. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Pemerintah Kota Makassar telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk mendukung terlaksananya program utama peningkatan kapasitas kelembagaan. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program ini adalah ketersediaan dokumen perencanaan dan jumlah kegiatan dialog/audiensi. Capaian indikator program utama ini adalah sebesar 100%.

Table 39-Indikator Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Ketersediaan dokumen perencanaan	%	100	100	100%
Jumlah kegiatan dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan masyarakat di kecamatan dan kelurahan	Kegiatan	25	25	100%
Rata-rata capaian kinerja				100%

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini diantaranya adalah:

- 1) Rapat koordinasi unsur MUSPIDA;
- 2) Rapat Koordinasi pejabat Pemerintah Daerah;
- 3) Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah lainnya;
- 4) Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan masyarakat di kecamatan dan kelurahan;
- 5) Makassar update (talk show up to date);
- 6) Dialog publik;
- 7) Fasilitas/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik;
- 8) Orientasi pemahaman RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Rencana Kerja 2010;
- 9) Penyelenggaraan musrembang RKPD;
- 10) Penyusunan rancangan RPJMD 2009 – 2014.

14. Peningkatan Profesionalisme Aparatur

Capaian program peningkatan profesionalisme aparatur Pemerintah Kota Makassar adalah sebesar 70,42%. Untuk mengukur keberhasilan program ini ditetapkan indikator persentase pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan dan persentase pejabat yang telah mengikuti diklat kepemimpinan. Dari 1809 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Makassar seluruhnya telah memenuhi syarat kepangkatan. Sehingga, capaian indikator persentase pejabat yang telah memenuhi syarat kepangkatan adalah 100%. Dalam hal pejabat yang telah mengikuti diklat kepemimpinan, capaian indikator kinerja program ini adalah sebesar 40,84%. Jumlah pejabat yang telah mengikuti diklat kepemimpinan hingga tahun 2010 sebanyak 665 pejabat atau 36,76% dari seluruh pejabat. Rendahnya jumlah pejabat yang mengikuti diklat ini disebabkan adanya pejabat-pejabat yang baru dilantik setelah adanya penerapan PP 41 tahun 2007.

Table 40-Indikator Peningkatan Profesionalisme Aparatur

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	%	100	100	100%
Persentase pejabat yang telah mengikuti diklat kepemimpinan	%	90	36,76	40,84%
Rata-rata capaian kinerja				70,42%

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung terlaksananya program utama ini diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Diklat Prajabatan Golongan III Eks Honorer;
- 2) Diklat tata pemerintahan;
- 3) Diklat prajabatan gol II dan I eks. Honorer;
- 4) Bimbingan teknis dan ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa;
- 5) Seleksi penerimaan calon PNS;
- 6) Pengangkatan tenaga honorer menjasi CPNSD;
- 7) Pemberian bantuan tugas belajar, izin belajar dan ikatan dinas;
- 8) Penyelenggaraan penerimaan ikatan dinas;
- 9) Pengelolaan kepegawaian.

15. Pengelolaan Keuangan Daerah

Pemerintah Kota Makassar telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk mendukung program utama pengelolaan keuangan daerah. Capaian indikator program pengelolaan daerah adalah 200%. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program ini adalah peningkatan target PAD dan peningkatan penerimaan pendapatan daerah. Rincian capaian indikator kinerja pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

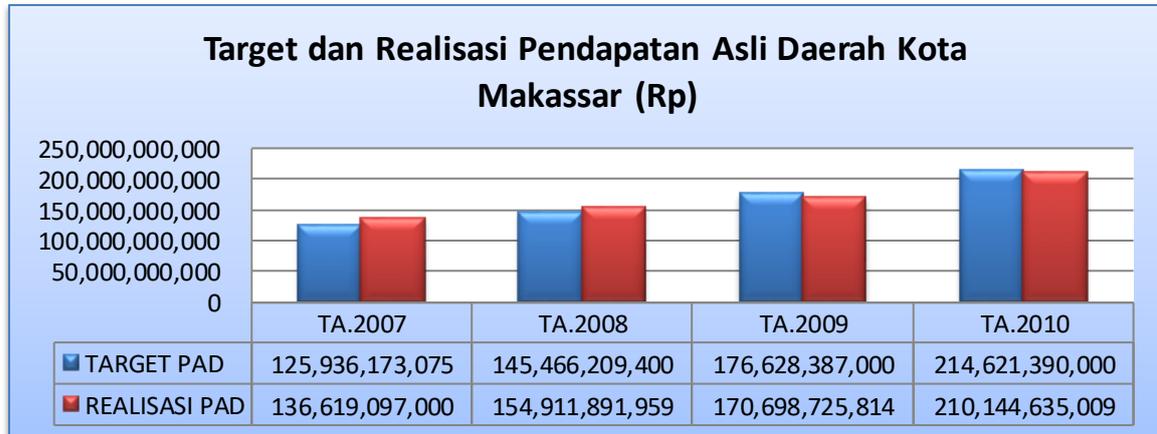
Table 41-Indikator Pengelolaan Lingkungan Hidup

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Peningkatan target Pendapatan Asli Daerah sebesar 3,3 % dari tahun anggaran 2009	%	3,3	21,51	200%
Peningkatan penerimaan pendapatan daerah secara keseluruhan sebesar 6,4 % dari Tahun 2009	%	6,4	21,11	200%
Rata-rata capaian kinerja				200%

Indikator peningkatan target pendapatan asli daerah (PAD) telah dicapai dengan memuaskan yaitu dari target peningkatan sebesar 3,3% telah direalisasikan sebesar 21,51%

atau dari Rp.176.628.387.000 tahun 2009 menjadi Rp.214.621.390.000 pada tahun 2010. Jika dibandingkan dengan realisasi maka capaiannya adalah sebesar 97,91%.

Gambar 20-Target Realisasi Pendapatan Asli Daerah



Capaian yang sama juga terjadi pada indikator peningkatan penerimaan pendapatan yang telah direalisasikan sebesar 21,11% atau dengan capaian 200%. Pendapatan Daerah Kota Makassar meningkat cukup besar dari Rp.1.197.748.163.800 menjadi Rp.1.450.578.381.000.

Gambar 21-Grafik Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah



Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran dimaksud maka Dinas Pendapatan Kota Makassar telah berupaya untuk melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan potensi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak parkir;
- 2) Penyusunan, penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota/ Keputusan Walikota tentang pajak/ retribusi daerah;

- 3) Penyuluhan/ Sosialisasi Peraturan-peraturan tentang pengelolaan Pajak/ Retribusi Daerah;
- 4) Pengelolah Pendapatan yang berprestasi;
- 5) Penyampaian SPPT PBB;
- 6) Sosialisasi Pekan Panutan PBB 14 Kecamatan dalam wilayah Kota Makassar;
- 7) Peningkatan kegiatan pengelolaan PBB;
- 8) Penyusunan Data Base pajak reklame;
- 9) Inventarisasi/ penataan obyek pajak reklame permanen di jalan;
- 10) Pemeriksaan Wajib Pajak dan Rekon Pendapatan;
- 11) Sosialisasi Keputusan wajib pajak daerah/ penyuluhan;
- 12) Penyusunan Data Base Pajak Hotel dan Restoran.

16. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Capaian atas keberhasilan pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Kota Makassar adalah sebesar 100%. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program ini adalah persentase pelayanan public yang dilaksanakan sesuai dengan SOP yang ditetapkan dan persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. Dalam hal pelayanan public khususnya pelayanan perizinan yang diberikan kepada masyarakat Pemerintah Kota Makassar telah menetapkan 11 jenis pelayanan yang dilaksanakan berdasarkan SOP atau sebesar 50% dari seluruh jenis perizinan yang dilayani. Dari 50% target indikator kinerja yang akan dicapai telah berhasil dicapai sebesar 100%. Sedangkan untuk pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti merupakan pengaduan atas kasus yang masuk pada Ombudsmen Kota Makassar sebanyak 3 pengaduan dan keseluruhannya telah ditindaklanjuti. Pengaduan masyarakat juga ditangani oleh Inspektorat Kota Makassar. Seluruh pengaduan yang mencakup pengaduan atas pelayanan public, permohonan izin bercerai dan kasus pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar seluruhnya telah ditindaklanjuti.

Table 42-Indikator Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase pelayanan publik yang sesuai dengan SOP	%	50	50	100%
Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100	100	100%
Rata-rata Capaian				100%

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian program utama ini diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Penyempurnaan Standar Norma dan Prosedur Perizinan;

- 2) Peningkatan sistem informasi perizinan;
- 3) Pelayanan langsung penerbitan akta kelahiran;
- 4) Penyediaan biaya pengelolaan penerbitan dokumen kependudukan;
- 5) Penyediaan biaya pengelolaan bagi petugas dok. Kependudukan.

17. Peningkatan Kualitas Materi Dan Penyebaran Informasi

Capaian hasil atas program utama Peningkatan Kualitas Materi dan Penyebaran Informasi adalah 60%. Dua indikator kinerja yang belum dapat dicapai adalah persentase SKPD terkoneksi jaringan local area network dan wide area network dan persentase sentra komunikasi yang terbangun melalui nirkabel dan fixed. Hal ini disebabkan belum adanya realisasi atas kegiatan yang mendukung kedua indikator di atas.

Table 43-Indikator Peningkatan Kualitas Materi Dan Penyebaran Informasi

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase SKPD terkoneksi jaringan lokal area network dan wide area network	%	100	0	0%
Jumlah kegiatan kerjasama penyebaran informasi dengan mass media	kegiatan	6	6	100%
Jumlah kegiatan peningkatan kualitas informasi	kegiatan	7	7	100%
Persentase sentra komunikasi yang terbangun melalui nirkabel dan fixed	%	50	0	0%
Jumlah kegiatan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat (KIM)	Kegiatan	4	4	100%
Rata-rata capaian kinerja				60,00%

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Makassar untuk mendukung terlaksananya program utama ini diantaranya adalah:

- 1) Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
- 2) Pengembangan jaringan internet;
- 3) Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi;
- 4) Penyebarluasan informasi pemyelenggaraan pemerintah daerah;
- 5) Pemyelenggaraan pameran;
- 6) Pembuatan dan sosialisasi profil digital Kota Makassar 2009;
- 7) Pengembangan jaringan media centre;
- 8) Alih media arsip konvensional ke media elektronik (cakram padat).

18. Pembinaan Kehidupan Politik Yang Demokratis

Capaian hasil atas program utama pembinaan kehidupan politik yang demokratis adalah 100% yang diukur dari jumlah kegiatan pembinaan LSM, Ormas, dan OKP dan Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah. Rincian capaian masing-masing indikator adalah sebagai berikut.

Table 44-Indikator Pembinaan Kehidupan Politik Yang Demokratis

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Jumlah kegiatan pembinaan LSM, Ormas dan OKP	Kegiatan	4	4	100%
Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah	Kegiatan	3	3	100%
Rata-rata capaian kinerja				100%

Untuk mendukung terlaksananya program pembinaan kehidupan politik yang demokratis Pemerintah Kota Makassar telah melaksanakan kegiatan-kegiatan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Tim penasehat/ keanggotaan forum komunikasi umat beragama;
- 2) Pemantauan dan verifikasi rencana pendirian rumah ibadah;
- 3) Orientasi pembauran bangsa bagi generasi muda dan pramuka;
- 4) Penyuluhan sistem ketatanegaraan bagi pelajar dan pramuka serta mahasiswa;
- 5) Forum dialog peningkatan bela negara bagi pengurus ORMAS dan LSM Tokoh Masyarakat;
- 6) Tim komunitas intelijen daerah (KOMINDA);
- 7) Penyuluhan pelaksanaan pemilu legislatif/presiden;
- 8) Pembinaan pengetahuan berpolitik bagi pemilih pemula dan pengurus OSIS SMU;
- 9) Forum dialog politik dan pengambilan keputusan bagu kaum perempuan.

19. Peningkatan Penegakan Hukum Dan Ham

Pemerintah Kota Makassar telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mendukung program strategis Peningkatan Penegakan Hukum dan HAM. Capaian kinerja program peningkatan penegakan hukum dan HAM adalah 112,93%. Untuk mengukur keberhasilan program ini indikator yang ditetapkan adalah prosentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan aparat pengawasan. Target yang ingin dicapai pada tahun 2010 adalah sebesar 60% dari seluruh temuan inspektorat yang ditindaklanjuti. Dari target yang telah ditetapkan telah terealisasi sebesar 67,76%. Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan aparat pengawasan merupakan alat ukur yang menilai tindak lanjut baik temuan administrative maupun temuan keuangan. Dari 414 temuan administrative yang ada telah ditindaklanjuti sebanyak 312. Sehingga capaian untuk tindaklanjut temuan administrative sebesar 75,36%. Untuk temuan keuangan, dari Rp.6.936.437.494. saldo temuan tahun 2010 telah ditindalanjuti sebesar Rp.4.172.388.622 atau sebesar 60,15%. Sehingga rata-rata temuan untuk temuan administrative dan temuan keuangan adalah 67,76%.

Table 45-Indikator Penegakan Hukum Dan Ham

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan aparat pengawasan	%	60	67,76	112,93%
Rata-rata Capaian				112,93%

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung terlaksananya program ini diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala;
- 2) Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah;
- 3) Rapat pemuktahiran data temuan tindak lanjut hasil pemeriksaan inspektorat kota;
- 4) Pemantauan tindak lanjut hasil temuan Aparat pengawasan;
- 5) Pemantauan dan pengawasan kegiatan unit-unit kerja lingkup Pemerintah Daerah;
- 6) Tindak lanjut hasil temuan pengawasan.

20. Legislasi Daerah

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program legislasi daerah adalah persentase ranperda yang ditetapkan menjadi perda dan legal drafting penyusunan pra ranperda. Dari 7 ranperda yang disusun oleh Kota Makassar 4 ranperda yang telah berhasil ditetapkan menjadi Perda. Dengan demikian, capaian atas indikator sasaran rancangan peraturan daerah yang ditetapkan menjadi perda adalah sebesar 54,7% atau 4 perda dari 7 ranperda yang diajukan kepada DPRD. Jika dibandingkan dengan penetapan produk hukum ini maka jumlah ranperda yang berhasil ditetapkan mengalami penurunan.

Table 46-Indikator Legilasi Daerah

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Prolegda yang menjadi perda	%	100	57,14	57%
Legal drafting penyusunan pra ranperda	Ranperda	10	10	100%
Rata-rata Capaian				78,57%

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung terlaksananya program legislasi daerah diantaranya adalah sebagai berikut.

- 1) Penyusunan rencana kerja rancangan-undangan;
- 2) Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan;
- 3) Penyebarluasan produk hukum daerah;
- 4) Sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (SJDI).

C. Analisis Atas Capaian Keuangan

Sesuai pokok-pokok kebijakan di bidang pendapatan yang meliputi; optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah dengan menjalankan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaannya, peningkatan kualitas koordinasi dan kerjasama dengan Unit Pengelola Pendapatan, pemberdayaan aparat secara tepat dan produktif, meningkatkan kualitas pelayanan, maka realisasi yang dapat dicapai selama Tahun Anggaran 2010, sebagai berikut:

Table 47-Realisasi Pendapatan Daerah

NO	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN TAHUN 2010	REALISASI TAHUN 2010	%
1	2	3	4	5
I.	PENDAPATAN			
	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
	Pajak Daerah	134.216.181.000,00	133.508.755.341,00	99,46
	Retribusi Daerah	62.971.506.000,00	59.727.754.725,43	94,84
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	6.124.203.000,00	6.017.813.865,99	98,25
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	13.617.000.000,00	10.826.361.704,22	79,50
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	216.928.890.000,00	210.080.685.636,64	96,83
II.	Dana Perimbangan			
	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Sumber Daya Alam	178.160.825.000,00	171.260.420.227,00	96,12
	Dana Alokasi Umum	644.266.427.000,00	644.266.427.000,00	100,00
	Dana Alokasi Khusus	45.753.700.000,00	45.753.700.000,00	100,00
	Jumlah Dana Perimbangan	868.180.952.000,00	861.280.547.227,00	99,20
III.	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH			
	Hibah	-	-	-
	Dana Darurat	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	148.066.788.000,00	155.704.122.541,21	105,15
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	191.744.564.000,00	190.426.514.332,00	99,31
	Pendapatan Lainnya	31.364.687.000,00	31.364.688.800,00	100,00
	Jumlah Pendapatan Lain-lain Yang Sah	371.276.039.000,00	377.595.325.673,21	101,70
	TOTAL PENDAPATAN	1.456.385.881.000,00	1.448.956.558.536,85	99,49

Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah pada Tahun 2010 sebagaimana yang diuraikan pada tabel di atas, telah ditargetkan sebesar Rp.1.456.385.881.000 dengan realisasi sebesar **Rp.1.448.956.558.536,85 atau 99,49%**.

I. Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Rencana penerimaan Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan tahun anggaran 2010 sebesar Rp.216.928.890.000. terealisasi sebesar **Rp.210.080.685.636,64 atau 96,83 %** .

Adapun rencana penerimaan Pendapatan Asli daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Table 48-Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

NO	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2010		%
		TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	7
1	Pajak Daerah	134,216,181,000.00	133,508,755,341.00	99.46
2	Retribusi Daerah	62,971,506,000.00	59,727,754,725.43	94.84
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6,124,203,000.00	6,017,813,865.99	98.25
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	13,617,000,000.00	10,826,361,704.22	79.50
	Jumlah	216,928,890,000.00	210,080,685,636.64	96.83

II. Dana Perimbangan.

Rencana dana perimbangan setelah perubahan Tahun Anggaran 2010 direncanakan sebesar Rp.868.180.952.000 telah terealisasi sebesar Rp.861.280.547.227 atau 99,20%. Adapun rincian Dana Perimbangan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Table 49-Dana Perimbangan

NO	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2010		%
		TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5
1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	178,160,825,000.00	171,260,420,227.00	96.12
2	Dana Alokasi Umum (DAU)	644,266,427,000.00	644,266,427,000.00	100.00
3	Dana Alokasi Khusus	45,753,700,000.00	45,753,700,000.00	100.00
	Jumlah	868,180,952,000.00	861,280,547,227.00	99.20

III. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Penerimaan yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan Tahun Anggaran 2010 direncanakan sebesar Rp.371.276.039.000 dan terealisasi sebesar **Rp.377.595.325.673,21** atau 101,70%.

Rincian realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Table 50-Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

NO	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2010		%
		TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5
1	Pendapatan Hibah	-	-	-
2	Dana Darurat	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari Pemerintah Daerah	148.066.788.000,00	155.704.122.541,21	105,15
4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	191.744.564.000,00	190.426.514.332,00	99,31
5	Pendapatan Lainnya	31.364.687.000,00	31.364.688.800,00	100,00
	JUMLAH	371.276.039.000,00	377.595.325.673,21	101,70

BAB VI

PRESTASI DAN KEBERHASILAN

A. Menyabet Sejumlah Prestasi

Penyelenggaraan pemerintahan di Kota Makassar tidak terlepas dari kebijakan desentralisasi dan pelaksanaan tugas pembantuan serta dukungan pihak legislatif dan seluruh komponen masyarakat. Pelaksanaan tugas pemerintah sangat luas yakni menyelenggarakan pemerintahan termasuk didalamnya regulasi dan pengawasan, melaksanakan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik. Hal ini menjadi komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk berupaya memberi motivasi dan mendorong kinerja aparat Pemerintah Kota Makassar untuk semakin baik dan semakin berkualitas.

Hal yang telah dicapai selama Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2010 merupakan hasil yang dilandasi semangat dan etos kerja aparat pemerintah Kota yang tinggi serta kerjasama dan koordinasi dengan seluruh *stakeholder*, diharapkan dapat dipertahankan bahkan semakin ditingkatkan dimasa mendatang.

Dilantik sebagai Walikota Makassar periode pertama pada 8 Mei 2004, Ilham Arief Sirajuddin, MM sampai memasuki periode ke – 2, telah membawa perubahan yang cukup signifikan. Makassar semakin mengalami perkembangan pesat dan telah menjelma menjadi kota metropolitan yang dapat di seajajarkan dengan beberapa kota-kota besar di Pulau Jawa.

Kemajuan yang telah dicapai, baik dalam pembangunan infrastruktur maupun aktivitas ekonomi, social, pendidikan, budaya dan pemerintahan tentu saja mendapatkan apresiasi positif dari berbagai pihak, baik dari Pemerintah Pusat , Daerah maupun dari pihak lain yang terkait. Berbagai prestasi dan penghargaan pun telah banyak ditorehkan.

Bentuk apresiasi positif tersebut diberikan dalam bentuk penghargaan (award), satya lancana, sertifikat, plakat dan piala. Penghargaan dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Presiden Republik Indonesia

Memberikan penghargaan kepada Kota Makassar “ **Piala Citra Abdi Negara “ dan Piala Citra Pelayanan Prima 2006** (Istana Negara 22 Desember 2006)

2. Presiden Republik Indonesia

Memberikan Piagam Tanda Kehormatan “**Satyalancana Wira Karya**” diberikan kepada Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, MM , Walikota Makassar sebagai penghargaan atas dharma bhaktinya yang besar terhadap Negara dan Bangsa Indonesia hingga dapat dijadikan teladan bagi orang lain. (19 Juni 2007).

3. Presiden Republik Indonesia

Memberikan Penghargaan kepada Kota Makassar yang telah mampu meningkatkan “ **Produksi Beras diatas 5 Persen “** (17 Desember 2008).

4. Presiden Republik Indonesia

Menganugerahkan tanda Kehormatann “**Satyalancana Kebaktian Sosial**” diberikan kepada Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, MM , Walikota Makassar Yang telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui program pemberdayaan usaha ekonomi produktif, kelompok usaha bersama, pelayanan kesehatan, pendidikan dan pemakaman gratis bagi yang tidak mampu serta pembinaan anak

jalanan melalui himbauan untuk tidak memberikan uang, dialog interaktif, penanganan social dalam system panti, program back to school kepada anak jalanan. (23 Maret 2010).

5. Presiden Republik Indonesia

Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia menganugerahkan **“Tanda Kehormatan Satya Lencana Pembangunan”** kepada H. Ilham arief Sirajuddin Jabatan Walikota Makassar, sebagai penghargaan atas jasanya terhadap Negara dan masyarakat dalam lapangan pembangunan Negara pada umumnya atau dalam lapangan pembangunan sesuatu bidang tertentu pada khususnya.

(Jakarta, 23 Juli 2010).

6. Jaksa Agung Republik Indonesia

Memberikan penghargaan disertai ucapan terima kasih kepada Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, MM , Walikota Makassar atas partisipasinya dalam menyukseskan **“Program Kantin Kejujuran Sekolah di Sulawesi Selatan”**.

(Jakarta, Mei 2010)

7. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Memberikan Penghargaan kepada Walikota Makassar Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, MM , sebagai Peserta Seminar Nasional Inisiatif BPK dalam **Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Negara dan daerah melalui Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pemerintah Pusat dan Daerah.**

(Jakarta, 22 Juli 2009).

8. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI

Memberikan Penghargaan kepada Walikota Makassar Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, MM , yang telah menyampaikan **“ Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2007 kepada Presiden Indonesia melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara secara tepat waktu sebagai pelaksanaan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 ”.** (20 April 2008).

9. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Memberikan penghargaan **“ Citra Bhakti Abdi Negara “** kepada Kota Makassar yang berhasil meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik” . (9 Desember 2009).

10. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Piagam CPP (Citra Pelayanan Publik) Kepada Kota kepada Kota Makassar yang berhasil meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik” . (Tahun 2010).

11. Kementrian Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Memberikan penghargaan **“ Anugerah Aksara “** kepada Pemerintah Kota Makassar atas keberhasilan mengurangi buta aksara.

12. Menteri Sosial Republik Indonesia

Memberikan Piagam Penghargaan kepada Pemerintah Kota Makassar atas upaya yang dilakukan dalam **Menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak**. (23 Juli 2009).

13. Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Menganugerahkan Tanda Penghargaan "**SWASTI SHABA PADAPA**" Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan atas penghargaan kota sehat untuk 2 tatanan kehidupan masyarakat yang sehat mandiri dengan kawasan pariwisata sehat (12 Nopember 2007).

14. Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Menganugerahkan Tanda Penghargaan "**SWASTI SHABA WIWERDA**" Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan atas jasa dalam Penyelenggaraan Kabupaten / Kota Sehat (Kep. Menkes RI Nomor : 984/MENKES/SK/XI/2009).

15. Menteri Keuangan Republik Indonesia

Memberikan Penghargaan kepada Kota Makassar sebagai "**Daerah Berprestasi**" berdasarkan Kinerja keuangan, Kinerja Ekonomi, dan Kesejahteraan " dan mendapatkan dana insentif Daerah sebesar Rp. 26 milyar lebih.

(30 Oktober 2009).

16. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia

Pemberian Penghargaan/ jasa "**Bakti Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah**" diberikan kepada Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, MM, jabatan Walikota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yang telah berperan aktif dengan kesungguhan sikap dan upaya dalam mensukseskan pembinaan dan pengembangan koperasi dan usaha kecil dan menengah di wilayah kerjanya.

(31 Mei 2010)

17. Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia

Piagam "**Langit Biru**" Penghargaan kepada Kota Makassar dalam meningkatkan kualitas udara " (11 Juli 2008).

18. Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia

Memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kota Makassar atas partisipasinya dalam "**Pekan Lingkungan Indonesia** ", **Corporate Social Responsibility Indonesia 2010, Renewable energy Indonesia** " yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center. (3 – 6 Juni 2010)

19. Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia

Piagam Adipura diberikan kepada Kota Makassar atas upaya terbaik dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup perkotaan (Juli 2010)

20. Kementrian Perhubungan Republik Indonesia

Memberikan Piagam Penghargaan kepada Pemerintah Kota Makassar sebagai peserta Kegiatan "**Wahana Tata Nugraha Tahun 2009**"

21. *Kementerian Perhubungan Republik Indonesia*

Memberikan Piagam Penghargaan kepada Pemerintah Kota Makassar “ **Plakat Wahana Tata Nugraha** “ dalam bidang Tarnsportasi untuk kategori Kota Metropolitan (29 September 2010)

22. *Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan*

Menyampaikan penghargaan kepada Pemerintah Kota Makassar atas peran sertanya dalam mewujudkan “ **Tertib Admnistrasi Kependudukan melalui Penerapan System Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)**” .

(30 Juli 2007).

23. *Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia*

Menganugerahkan penghargaan “ **Inovasi Manajemen Perkotaan** ” kepada Pemerintah Kota Makassar bersama Masyarakat, dalam bidang Sanitasi Perkotaan Sub Bidang Persampahan Peringkat Rangkings II (kedua) dengan predikat sangat baik (22 Februari 2011).

24. *Departemen Perhubungan , Direktorat Jenderal Perhubungan Darat*

Menyampaikan penghargaan “ **Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota Tahun 2005** ” Kepada Kota Makassar

25. *Departemen Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Republik Indonesia*

Menyampaikan penghargaan “ **Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota Tahun 2006** ” Kepada Kota Makassar.

26. *Departemen Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Republik Indonesia*

Menyampaikan penghargaan “ **Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota Tahun 2008** ” Kepada Kota Makassar

27. *Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia*

Menyampaikan penghargaan “ **Manggala Karya Kencana** “ kepada Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, MM selaku Walikota Makassar atas jasa-jasanya yang menonjol dalam KEPEMIMPINAN Program Keluarga Berencana Nasional (2 Juni 2005)

28. *Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia*

Menyampaikan penghargaan “ **Satya Lencana Wira Karya** “ kepada Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, MM selaku Walikota Makassar telah berjasa memberikan dharma baktinya yang besar kepada Bangsa dan Negara Indonesia khususnya dalam bidang Keluarga Berencana (Jakarta, 15 Juni 2007)

29. *Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia*

Memberikan penghargaan “ *Bhumibhakti adhiguna* ” dan mengucapkan terima kasih kepada Walikota Makassar Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, MM atas partisipasi dan dukungannya untuk menjadikan pertanahan sebagai sumber kemakmuran rakyat melalui sumbangan pemikiran, kontribusi dalam meningkatkan mutu pelayanan dan pengembangan infrastruktur pertanahan serta melalui mekanisme yang baik dengan jajaran Badan Pertanahan Nasional. (11 April 2006)

30. *Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Republik Indonesia*

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerapkan Kota Makassar sebagai Pemerintahan Kota yang **Terbaik Mererapkan Zona Integritas**.

31. *Perpustakaan Nasional Republik Indonesia*

Memberikan Piagam Penghargaan “ **Nugra Jasadarma Pustaloka** “ diberikan kepada Walikota Makassar Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, MM atas peran sertanya dalam memasyarakatkan perpustakaan dan minat baca di Indonesia. (30 Mei 2007).

32. *Perpustakaan Nasional Republik Indonesia*

Penghargaan kepada Kota Makassar sebagai “ **Juara Harapan I Perpustakaan Keliling Tingkat Nasional Tahun 2007** “ pada lomba perpustakaan keliling tingkat nasional tahun 2007 yang di selenggarakan oleh Perpustakaan Nasional RI. (Jakarta 2007).

33. *Dewan Kehormatan Nasional Angkatan – 45*

Piagam Penghargaan dan Medali Perjuangan Angkatan – 45 diberikan kepada Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, MM Ketua DHC 45 Kota Makassar, Dalam Rangka memperingati 59 Tahun Negara Kesatuan RI, sebagai penghargaan atas peran serta pengabdianya dalam upaya melestarikan Jiwa, Semangat dan Nilai – nilai 45.

(Jakarta, 17 Agustus 2004)

34. *Gubernur Sulawesi Selatan (H.M. Amin Syam)*

Memberikan penghargaan dan menyampaikan terima kasih kepada Ir. H. Ir. Ilham Arief Sirajuddin, MM, Walikota Makassar atas jasa dan kepeduliannya dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan di **Sulawesi Selatan** (2 Mei 2006).

35. *Gubernur Sulawesi Selatan (H.M. Amin Syam)*

Penetapan Kota Makassar sebagai “ **Unit Pelayanan Publik (Citra Pelayanan Prima)**, terbaik Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan (15 Agustus 2006).

36. *Gubernur Sulawesi Selatan (H.M. Amin Syam)*

“ **Pemenang Lomba 10 program pokok PKK untuk tingkat desa dan Kelurahan Tahun 2007** “ sebagai Juara I untuk kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate Kota Makassar. (27 Juli 2007).

37. *Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan*

Piagam penghargaan kepada Perpustakaan Umum Kota Makassar sebagai Juara Ketiga pada “ **Lomba Perpustakaan Umum Kabupaten/ Kota Tingkat Provinsi**

Sulawesi Selatan Tahun 2007, yang diselenggarakan oleh Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (22 Juni 2007).

38. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Penghargaan kepada Perpustakaan Umum Kota Makassar di bidang Perpustakaan “ **Juara I Perpustakaan Umum Kota Makassar Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008**” pada Lomba Perpustakaan Umum Kabupaten/ Kota se- Sulawesi Selatan Tahun 2008. (13 Agustus 2009)

39. Gubernur Sulawesi Selatan (DR. H. Syahrul Yasin Limpo, SH, M.Si, MH)

Memberikan penghargaan dan menyampaikan terima kasih kepada Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, MM Walikota Makassar atas **Prestasi dalam Pengelolaan Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagai Pembina hari Kesatuan Gerak PKK KB – Kes Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan** Untuk Kategori terbaik I dalam rangka Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) XVI Tahun 2009 (29 Juni 2009).

40. Gubernur Sulawesi Selatan (DR. H. Syahrul Yasin Limpo, SH, M.Si, MH)

Memberikan penghargaan dan menyampaikan terima kasih kepada Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, MM, Walikota Makassar atas **Partisipasinya pada Kegiatan Kerja Bakti dan Penanaman Pohon Serentak se - Provinsi Sulawesi Selatan** (22 Maret 2010)

41. Gubernur Sulawesi Selatan (DR. H. Syahrul Yasin Limpo, SH, M.Si, MH)

Memberikan penghargaan dan menyampaikan terima kasih kepada Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, MM, Walikota Makassar sebagai Peserta Seminar Nasional “ Ibukota Negara, Harapan dan tantangan (Makassar, 24 januari 2011).

42. TUV Rheinland Cert GmbH (ISO 9001:2008)

Sertifikat diberikan Kepada Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Makassar Ruang Lingkup Pengelolaan Perolehan Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan untuk Bangunan Rumah Tinggal. (3 Mei 2010)

43. Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

Menganugerahkan tanda penghargaan Gerakan Pramuka berupa “ **Lencana Darma Bakti** ” kepada Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, MM, Ketua Mabicab Kota Makassar atas jasanya yang cukup besar artinya bagi pembinaan dan perkembangan Gerakan Pramuka.

44. Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia (ASEPHI)

Sertifikat diberikan kepada Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, MM, sebagai Peserta Pada Diskusi panel APKASI Korwil Sulawesi Selatan dengan Tema Promosi Daerah sebagai salah satu usaha mengembangkan produk unggulan UKM dan Perajin.

(Makassar, 22 Februari 2005)

45. Pos Advokasi dan Kepedulian Terhadap Anak (PAKTA)

Menganugerahkan kepada Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin Walikota Makassar sebagai “ **Tokoh Peduli Anak melalui Gerakan Makassar Gemar Membaca (GMGM)**.” (09 Desember 2010)

46. Universitas Negeri Jakarta Program S3 Manajemen Pendidikan

Serifikat Penghargaan diberikan kepada Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, MM sebagai **Pembicara** pada Seminar Nasional “Peningkatan kualitas SDM berbasis keunggulan local dalam prespektif desentralisasi pendidikan “ yang dilaksanakan di Departemen Pendidikan Nasional RI. (Jakarta, 24 Maret 2009)

47. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Serifikat Penghargaan diberikan kepada Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, MM sebagai **Keynote Speaker** dalam Seminar Nasinal dengan tema “ Spritual Quotient dan Masa Depan Pendidikan di Indonesia. (Makassar, 30 Januari 2008).

48. The Indonesian Institute

Serifikat Penghargaan diberikan ksaapada Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, MM pada National Dialogue Conference Golkar Towards 2014 (28 agustus – 7 September 2009)

49. Yayasan Sangha Agung Indonesia

Memberikan penghargaan dan terima kasih kepada Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, MM atas peresmian dan pensakralan Pusat Pelatihan Meditasi Arama Maha Buddha Makassar

50. The Fajar Institute of Pro Otonomi

Piagam diberikan kepada Kota Makassar, Daerah yang menonjol dalam **Partisipasi Perempuan pada Program Inovasi Tahun 2010”**.

51. Fajar FM News, Talk & Entertainment

Piagam penghargaan diberikan kepada Dinas Tata Ruang Kota Makassar sebagai Iklan Layanan Masyarakat Favorit Fajar FM dalam resepsi HUT FAJAR FM dan Pemilihan Puteri Indonesia Sulawesi Selatan 2010 (6 Agustus 2010).

52. Forum Pemerhati Masalah Perempuan Sulawesi Selatan

Piagam penghargaan diberikan kepada Pemerintah Kota Makassar atas partisipasinya dalam mendukung “ Penggggalangan Dana untuk Pemberdayaan Perempuan “ di Sulawesi Selatan. (8 Maret 2011).

53. Sertifikat ISO 9001:2008

Empat penghargaan di Makassar berstandar Internasional terhadap 3 (tiga) Puskesmas dan Kantor Pelayanan Perizinan Administarsi dan Perizinan (KPAP) Kota Makassar adalah penilaian untuk Penilaian mutu terbaik.

B. REKOR DUNIA

1. Rekor Dunia Penyelenggara Pendukung **Minum Susu** dengan peserta terbanyak 61.000 orang (Oktober Tahun 2010) No. Sertifikat 4546/R.MURI/X/2010.

2. Rekor Dunia Penyelenggara **Makan Sosis** dengan peserta terbanyak 61.000 orang (Oktober Tahun 2010) No. Sertifikat 4546/R.MURI/X/2010.

C. Rekor MURI

1. Penyelenggara pendukung pertandingan **Sepak Bola Raga terpanjang 400 m x 6 meter** (yang digunakan untuk bermain bersamaan) bulan Agustus 2005. No. Sertifikat 1645/R.MURI/VIII/2005.
2. Penyelenggara pendukung **Makan Coto Makassar** dengan peserta terbanyak pada waktu dan tempat yang sama (April 2006) No. Sertifikat 1930/R.MURI/IV/2006.
3. Pemrakarsa **Membaca Serentak** dengan peserta terbanyak pada waktu dan tempat yang sama (Agustus 2006) No. Sertifikat 2070/R.MURI/VIII/2006.
4. Pemrakarsa dan penyelenggara **Cerdas Cermat secara serentak** dengan Peserta Terbanyak (April 2006) No. Sertifikat 2106/R.MURI/VIII/2006.
5. Pemrakarsa dan penyelenggara **Menabung Serentak 5.500 orang Pelajar** (17 Mei 2011)

REKOR INDONESIA



PIAGAM PENGHARGAAN
**MUSEUM REKOR DUNIA
INDONESIA**

No: 2106/R.MURI/VIII/2006

DIANUGERAHKAN KEPADA

Pemerintah Kota Makassar

ATAS PRESTASI

*Pemrakarsa dan Penyelenggara
Parade Kapal & Perahu Terbanyak
(Dalam Rangka Festival Internasional
Pemuda dan Olahraga Bahari 2006)*

Semarang, Agustus 2006

(JAWA SUPRANA)

REKOR INDONESIA



PIAGAM PENGHARGAAN
**MUSEUM REKOR DUNIA
INDONESIA**

No. 2070/K.NI/RI/VIII/2006

DIANUGERAHKAN KEPADA

Walikota Makassar
(*Dr. H. Ilham Ariel Sirajuddin, MA*)

ATAS PRESTASI

Pemrakarsa

*Membaca Serentak Dengan Peserta Terbanyak
Pada Waktu dan Tempat Yang Sama*

Semarang, Agustus 2006



(JAYA SUPRANA)

REKOR INDONESIA



PIAGAM PENGHARGAAN
**MUSEUM REKOR DUNIA
INDONESIA**

No. 2070/R.NI/RI/VIII/2006

DIANUGERAHKAN KEPADA

Walikota Makassar
(Dr. H. Ilham Ariel Sirajuddin, M.M)

ATAS PRESTASI

Pemrakarsa

*Membaca Serentak Dengan Peserta Terbanyak
Pada Waktu dan Tempat Yang Sama*

Semarang, Agustus 2006



(JAYA SUPRANA)



REKOR INDONESIA



PIAGAM PENGHARGAAN MUSEUM REKOR DUNIA INDONESIA

No. 1057/SLMUR/IV/2008

DIANUGERAIKAN KEPADA

Pemerintah Kota Makassar

ATAS REKOR

*Pemrakarsa dan Penyelenggara
Cerdas Cermat Secara Serentak,
Dengan Peserta Terbanyak*

Makassar, April 2008



(JAYA SUPRANA)









D. Keberhasilan

6.2.1. Narasumber internasional dan Dalam Negeri :

1. *Narasumber pada Pertemuan World Wide Views on Global Warming (WWViews), Kopenhagen, Denmark (7-10 Desember 2009)*

Walikota Makassar Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, MM, menjadi pembicara Pada pertemuan tersebut dan mempersentasikan konsep Mitigasi dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) masalah iklim global pada pertemuan *World Wide Views on Global Warming (WWViews)* yang dihadiri sekitar 164 negara di Kopenhagen, Denmark..



2. *Narasumber pada Konferensi Internasional Forum On Disaster Risk Reduction and Shanghai Expo, Shanghai, China (28-30 Juli 2010).*

Pemerintah Kota Makassar memenuhi undangan dari sejumlah lembaga di bawah PBB seperti DEVNET, UNISDR, UN-Habitat, dan ICLEI serta menjadi Pembicara pada Forum Internasional tersebut dengan mempersentasikan Kemitraan Pihak Mengatasi Bencana dan Kerentanan Sosial di Makassar.





3. Narasumber pada Pertemuan World City Summit 2010, Singapore (28 Juni – 1 Juli 2010).

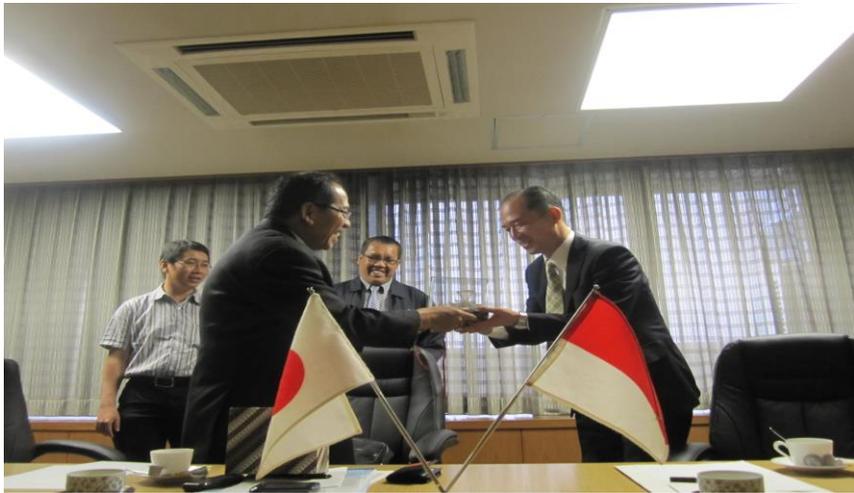
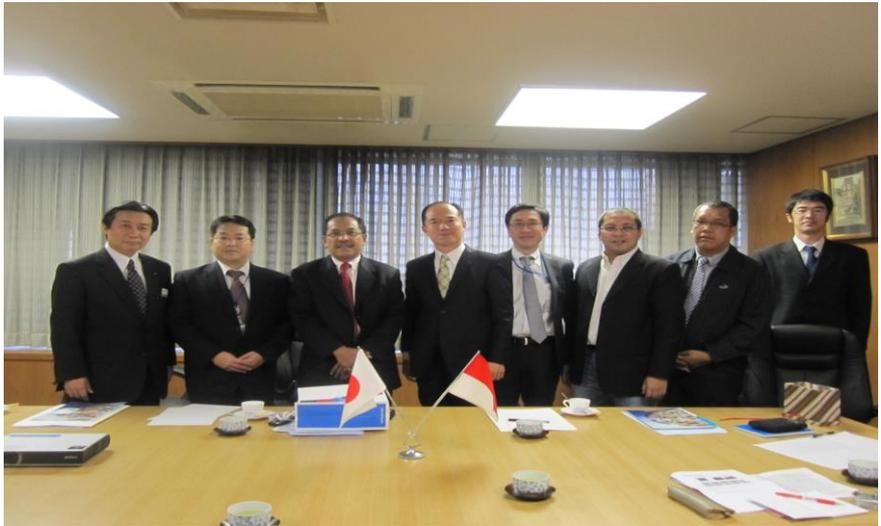
Walikota Makassar Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, MM, membicarakan pengaruh tekanan global yang mendesak pada tantangan kehidupan perkotaan sekarang dengan Tema “*Liveable and Sustainable Cities For The Future*” (Kota yang layak huni & berkelanjutan untuk masa depan).



4. *Narasumber pada Pertemuan Pertemuan Conference On Eco² Cities< Yokohama, Japan (21 -22 Oktober 2010).*

Walikota Makassar Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, MM, mendapatkan kehormatan untuk berbicara dalam forum The World Bank dan Japan International Cooperation Agency (JICA) dalam konferensi International pertama, bertajuk "Eco2 Yokohama Cities 2010". Dalam forum ini, Walikota *Makassar* Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, MM, memberikan gambaran bagaimana Pemkot Makassar melakukan revitalisasi pantai Losari dan pengembangan pesisir pantai Makassar dalam konteks Makassar sebagai *water front city* terkait mitigasi dan adaptasi lingkungan dalam mengantisipasi perubahan cuaca global.





5. *Narasumber/Pemateri pada Seminar Pemberantasan Korupsi*

dalam seminar pemberantasan korupsi dengan tema pencegahan tindak pidana korupsi dengan mewujudkan zona integritas di kota Makassar, di hotel singgasana Makassar



6.2.2. *Bidang Ekonomi*

Evaluasi pencapaian kinerja indikator makro pembangunan daerah dilihat dari aspek ekonomi dan sosial. Pada aspek ekonomi, tahun 2010 perekonomian Kota Makassar tumbuh **2,2 %**, pertumbuhan ini mengalami kenaikan disebabkan karena seiring menjadikan Kota Makassar sebagai Living Room yang dimenjadi Kota Makassar sebagai Pusat Pengembangan/Distribusi Barang dan jasa di Kawasan Timur Indonesia.

Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kota Makassar juga dipengaruhi oleh dunia perbankan dimana jumlah pinjaman pada Tahun 2009 jumlah pinjaman sebesar Rp.21,94 Trilyun lebih, terdiri dari pinjaman modal kerja Rp. 9,65 Trilyun lebih, pinjaman investasi sebesar Rp.4,93 Trilyun lebih dan pinjaman konsumsi sebesar Rp.7,35 Trilyun lebih. Sedangkan pada Tahun 2010 jumlah pinjaman meningkat menjadi Rp.24,93 Trilyun lebih, terdiri dari pinjaman modal kerja Rp. 10,59 Trilyun lebih, pinjaman investasi sebesar Rp.5,84 Trilyun lebih dan pinjaman konsumsi sebesar Rp 8,49 Trilyun lebih.

Investasi dan Instrumen moneter dengan tingkat bunga yang responsif terhadap iklim investasi. Pada Tahun 2009 menghasilkan **persetujuan investasi PMDN Rp.195,45 Milyar** lebih dan **PMA \$ US 13,87 Juta** dan pada Tahun 2010 menghasilkan 6 persetujuan PMDN dengan **Investasi Rp 1.265.796.075.422 Trilyun lebih** dan **5 persetujuan PMA dengan Investasi \$ US 1.029.330. Juta**.

4. **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sesuai harga berlaku pada Tahun 2009 sebesar **Rp.31,26 Trilyun** lebih dan pada Tahun 2010 naik menjadi **Rp.36,73 Trilyun lebih**. Pertumbuhan ekonomi yang baik ditandai dengan terkendalinya laju inflasi, dimana pada Tahun 2009 laju inflasi mencapai rata-rata sebesar **3,24 %**, dan pada Tahun 2010 menjadi

6,82%, dan inflasi secara Nasional sebesar 11,64%, dengan kondisi tersebut, pertumbuhan ekonomi Kota Makassar pada Tahun 2009 sebesar 9,28% naik menjadi 9,31% pada Tahun 2010.

Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk Kota Makassar adalah angka perkapita bruto, pendapatan perkapita memperlihatkan perkembangan PDRB perkapita yang cukup berarti, yaitu pada Tahun 2009 sebesar **Rp.24,05** Juta lebih dan pada Tahun 2010 meningkat menjadi **Rp.27,43** juta lebih.

6.2.3. Bidang Pendidikan

Kualitas sumberdaya manusia tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) dimana pada Tahun 2009 sebesar 78,20 % dan pada Tahun 2010 telah mencapai 78,59 % yang didorong dengan dengan semakin membaiknya pelaksanaan sistem pendidikan di Kota Makassar. Demikian pula Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Makassar pada Tahun 2009 penduduk usia SD (7-12 Tahun) sebesar 96,89 %, usia SLTP (13-15 Tahun) sebesar 85,62 % dan usia SLTA (16-18 Tahun) sebesar 55,64 %. Dan pada Tahun 2010 angka partisipasi sekolah meningkat dimana penduduk usia SD (7-12 Tahun) sebesar 97,47 %, usia SLTP (13-15 Tahun) sebesar 86,06 % dan usia SLTA (16-18 Tahun) sebesar 57,47 %.

Untuk melaksanakan komitmen terhadap kepedulian dibidang pendidikan maka Pemerintah Kota Makassar mulai pada Tahun 2008 telah mencanangkan Sekolah bersubsidi penuh sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan bagi kekluarga miskin di kawasan kumuh dan di kepulauan/pesisir dengan memenuhi seluruh kebutuhan biaya pendidikan bersubsidi penuh yang dialokasikan dalam APBD Kota Makassar untuk 46 Satuan Pendidikan, yaitu 41 SD dan 5 SMP. Sebanyak 11.470 siswa miskin yang terbantu dalam program ini untuk menikmati pendidikan dasar 9 Tahun dengan membebaskan dari segala pungutan atau biaya pendidikan. Program ini dilanjutkan di Tahun 2009 dengan fokus pada 100 Satuan Pendidikan, yaitu 89 SD dan 11 SMP dengan jumlah siswa miskin 21.153 siswa, dan pada tahun 2010 dilanjutkan 138 sekolah yaitu 128 SD, 7 SMP, 2 SMA, 1 SMK. Dan kedepan Pemerintah Kota mengupayakan seluruh SD dan SMP dari 367 SD Negeri dan 40 SMP Negeri menjadi target sekolah bersubsidi penuh.

Pada Tahun 2010 selain Program **sekolah bersubsidi penuh** juga dilaksanakan program pendidikan Gratis atas bantuan pembiayaan dari Pemerintah Kota Makassar dan Pemerintah Provinsi dengan sasaran 527 SD/MI/SDLB/PPs Ula dan 211 SMP/MTS/SMPLB/PPs Wusta dengan pembagian Porsi anggaran 40 % APBD Provinsi dan 60 % APBD Kota dengan Anggaran sebagai berikut :

- APBD Provinsi dengan Pagu sebesar Rp. 21.877.362.800,-.
- APBD Kota dengan Pagu sebesar Rp. 32.816.044.200,-.

Dengan Total Anggaran secara keseluruhan sebesar **Rp. 54.693.407.000,-**.

Selanjutnya dibidang pendidikan Non Formal dan Informal Pemerintah Kota Makassar juga memberikan perhatian yang cukup besar, mengingat besarnya minat dan animo masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan di jalur Non Formal di Tahun 2010 dimana terdapat 225 kelompok Pendidikan Anak Usia Dini (kelompok bermain/SPS/TPA/TPQ dan POS PAUD) dengan 6.828 warga belajar dan 53 PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) yang mengelolah pendidikan kesetaraan dengan rincian Paket

A setara SD 9 kelompok (180 Warga belajar), Paket B setara SMP 21 kelompok (525 warga belajar), paket C setara SMA 2 kelompok (60 warga Belajar), untuk lembaga kursus dan pelatihan terdapat 432 lembaga dengan 17.402 warga belajar dengan berbagai jenis keahlian seperti, Bahasa Asing, Komputer, Akuntansi, Teknisi AC, Montir dan jenis keterampilan lainnya.

Sebagai tindak lanjut dari program Pemerintah Kota Makassar dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan informasi demi mencerdaskan kehidupan masyarakat dan mendorong tumbuhnya minat baca masyarakat dengan **“Gerakan Makassar Gemar Membaca” (GMGM)** yang bertujuan bertujuan (1). Menjadikan membaca dapat membudaya di masyarakat; (2). Menjadikan buku sebagai pusat pengetahuan dan informasi; (3) Perpustakaan dan tempat baca lainnya mudah diakses. Melalui program tersebut Pemerintah Kota Makassar telah mencanangkan penggunaan dan menyediakan 36 taman baca binaan yang tersebar pada 14 Kecamatan termasuk 6 di Kepulauan (Pulau Barang Lompo, Barang Caddi, Kodingareng, Lae-Lae, Lumu-lumu dan Bone Tambung serta pelibatan swadaya masyarakat telah dibangun 95 Taman Baca Masyarakat ,terselenggaranya layanan perpustakaan umum Kota dan telah beroperasinya 2 (dua) unit Mobil Perpustakaan keliling, dan penyediaan 2 (dua) unit kendaraan motor pintar keberbagai sekolah dan tempat keramaian umum lainnya.

6.2.4. Bidang Kesehatan

Dalam rangka peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan, Pemerintah Kota Makassar sejak Tahun 2007 sampai dengan 2010 telah melakukan pelayanan kesehatan gratis pada Seluruh Puskesmas yang ada di Kota Makassar. Pelayanan yang diberikan secara gratis kepada seluruh warganya dengan tidak membedakan latar belakang ekonomi kaya atau miskin, semuanya memperoleh pengobatan dan pemeriksaan ke Puskesmas secara gratis. Hal ini mendorong kesadaran warga akan arti pentingnya kesehatan. terbukti dari angka kunjungan ke Puskesmas Tahun 2010 menjadi 2.032.409 orang yang terdiri dari kunjungan sakit 1.561.199 orang dan kunjungan sehat 471.210 orang.

Terkait dengan kesehatan gratis tersedia 1.034 sarana pelayanan kesehatan bagi warga kota Makassar yang terdiri dari 1 Unit Rumah Sakit Umum Daerah Daya , 8 Unit Puskesmas Rawat Inap, 29 Unit Puskesmas non Rawat Inap, 41 Unit Puskesmas Pembantu dan 953 Posyandu yang didukung oleh 1.193 Tenaga Medis dan Para Medis. serta 459 tenaga Non Medis. Sedangkan masyarakat pulau disediakan Puskesmas Keliling laut 2 buah yang siap memberikan pelayanan dan mengatasi berbagai keluhan kesehatan masyarakat pulau. Khusus untuk penanggulangan HIV/AIDS disediakan pula 2 Puskesmas Percontohan Metadon dari 24 keseluruhan yang ada di Indonesia dan siap memberikan pelayanan & rujukan bagi penderita HIV/AIDS & penyalahgunaan narkoba (NAPZA);

Dalam mengantisipasi terjadinya penyakit demam berdarah maka hinga Tahun 2010 telah terbentuk **1.854** Juru Pemantau Jentik (Jumantik) di seluruh pelosok Makassar untuk memantau, melaporkan & memberantas sarang nyamuk Demam Berdarah melalui gerakan menguras, menutup, & mengubur (3 M) serta abatisasi, penyemprotan atau Fogging baik massal maupun khusus. Setiap Kecamatan disediakan 2 petugas Fogging untuk mengantisipasi munculnya wabah Demam Berdarah.

Untuk meningkatkan kualitas & standarisasi pelayanan Puskesmas , dimana **Puskesmas Sudiang Raya dan Puskesmas Kassi-Kassi telah berhasil meraih standar Mutu ISO 9001 versi 2008. untuk Tahun 2010.** Disampng itu pula, program kesehatan

gratis yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar juga menyiapkan layanan gratis khusus secara berkala, seperti **pengobatan gratis, perbaikan gizi masyarakat khususnya kepada masyarakat miskin kurang gizi, sunatan massal, dan lain-lain.**

6.2.5. Kerjasama Prestasi

Pemerintah Kota Makassar berupaya berperan aktif dalam melakukan peninjauan kerjasama dalam berbagai bentuk dengan maksud untuk mengoptimalkan pemanfaatan berbagai potensi guna mencapai sinergitas pembangunan, baik kerjasama antar kota, antar daerah antar wilayah maupun kerjasama pemerintah kota dengan pihak ketiga yang berskala kawasan Regional bahkan Internasional.

Adapun kerjasama yang dimaksud sebagai berikut :

- a. **Kerjasama 5 (lima) kota di Kawasan Timur Indonesia** yang merupakan anggota Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Koordinator wilayah IV yang terdiri dari Makassar, Ternate, Tidore, Manado dan Gorontalo atau disingkat **GM2T2**. Penandatanganan MOU dengan 5 Kota tersebut dalam bidang perdagangan, perindustrian, kebudayaan, pariwisata dan pelayanan public.
- b. **Kerjasama Kota Kembar (Sister City) antara Kota Makassar dengan Constanta Rumania**. Kota Makassar merupakan satu-satunya kota di Indonesia yang melakukan kerjasama dengan Eropa Timur yang diarahkan untuk memperluas jaringan kerjasama ekonomi, pendidikan, perdagangan, perindustrian, investasi,kebudayaan dan pariwisata.
- c. **Momorerandun Of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kota Makassar dengan Pemerintah Kota Yogyakarta** yang melahirkan kesepakatan pengembangan dan pemasaran dalam rangka memajukan kebudayaan dan pariwisata Kota Makassar dan Kota Yogyakarta.
- d. Perluasan dan pengembangan kerjasama dalam bingkai **kerjasama kota kembar** dengan kota-kota kawasan Asia, Afrika, Amerika dan Australia seperti Cape Town, Afrika Selatan, Chunging dan Nanning, China, Seongnam, Korea Selatan, Dubai, Uni Emirat Arab.
- e. Kesepakatan Bersama antara Walikota Makassar dengan Departemen Perhubungan Republik Indonesia tentang **Perencanaan, Pembangunan dan Pengoperasian Angkutan Umum Massal Berbasis jalan di Kota Makassar**.
- f. Kesepakatan Bersama antara Walikota Makassar dengan Kemitraan bagi pembauran Pemerintahan di Indonesia tentang **Program Kerja Sama untuk membangun dan Mendukung Pembentukan Komisi Ambudsman Daerah untuk sector swasta di Kota Makassar**.
- g. Kesepakatan bersama antara Walikota Makassar dengan Direktur **PT. Gikoko Mechanism (CPM) pembakaran Landfill Gas (LFG) di TPA Tamangapa Kota Makassar**.
- h. Kesepakatan bersama antara Walikota dengn Deputi Bidang Akuntabilitas Aparatur Kementrian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara yang melahirkan kesepakatan tentang Program kerjasama dalam **Rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan**

yang baik sebagai upaya pencegahan korupsi di jajaran Pemerintah Kota Makassar.

- i. Kesepakatan Bersama antara Walikota Makassar dengan Transparency International Indonesia (TII) **Penerapan Pakta Integritas dalam Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar.**
- j. Penandatanganan MoU antara Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan Walikota Makassar dalam **Rangka e-procurement.**
- k. Momenandum of Understanding (MoU) antara Bank Indonesia Makassar dengan Pemerintah Kota Makassar tentang **Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kota Makassar.**



Penyerahan Penghargaan Rekor Muri Makan Sahur Terbanyak Kepada Kota Makassar Dari Mesium Rekos Indonesia



Sertifikat Indonesia Tourism Award Kepada Kota Makassar Dari Kementerian Kebudayaan Dan Pariwisata



**Penyematan Tanda Penghargaan Kepada Walikota Makassar Ir. Ilham Arief Sirajuddin,
MM dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Di Jatinangor Jawa Barat**

BAB VII

P E N U T U P

Pemerintah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan sebagai bagian integral dari Negara Republik Indonesia selain memiliki kewajiban untuk menyukseskan program-program Nasional juga dituntut untuk memenuhi kebutuhan nyata masyarakatnya. Dana Alokasi Umum (DAU) yang sebagian besar menjadi instrument pembiayaan utama dari penyelenggaraan Pemerintah Daerah sangat jauh dari cukup untuk mewujudkan cita-cita pemerintahan, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata dan berkeadilan. Penyelenggaraan pemerintahan dengan cara konvensional dengan cirri cenderung dilayani dan hanya bersifat pasif dan interaktif tidak akan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi terkait pencapaian tujuan pemerintahan, tetapi justru akan menjadi beban berkepanjangan yang justru menjadi beban bagi masyarakat.

Dalam kondisi ditengah persaingan global dengan ciri semakin hilangnya sekat antar bangsa menuntut organisasi pemerintahan lebih fleksibel dan responsive terhadap berbagai perubahan. Pemerintah yang kreatif akan mampu melihat peluang dari setiap kelemahan dan mampu memanfaatkan peluang untuk mengoptimalkan potensi. Dana yang kurang tidak akan menjadi kendala untuk mengoptimalkan pembangunan.

Dengan modal inilah Pemerintah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan mampu menata setiap gerak dan langkah sehingga setiap modal yang dimiliki mampu dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan pembangunan di Kota Makassar. Potensi lokal justru dapat menjadi modal utama dalam mengembangkan Kota Makassar dapat lebih maju dibanding Kota-kota lain yang sepadan.

Akhirnya dengan penuh kesadaran bahwa apa yang dicapai dari setiap proses pembangunan yang dilakukan adalah petunjuk, bimbingan dan hidayah dari Tuhan YME, sehingga setiap yang dilakukan senantiasa dalam ridhoNya. Karena hanya dengan petunjukNya semua yang direncanakan akan dapat terwujud sesuai dengan yang diharapkan.

Demikian Laporan komprehensif tentang hasil-hasil kemajuan Pembangunan Kota Makassar dari tahun 2004-sekarang untuk menjadi bahan evaluasi.

Makassar, 18 Mei 2011

An. WALIKOTA MAKASSAR
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

H.M.ANIS ZAKARIA KAMA, SH,M.Si,MH
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip. 19520202 197909 1 002

DAFTAR PUSTAKA

- Appleby, P. 1952. *Morality and Administration in Democratic Government*. Baton Rouge: Louisiana State University Press.
- Bintaro, Tjokroamidjojo. 1991. *Pengantar Administrasi*. Jakarta: LP3ES.
- Bird, Richard, M and Francois Vaillancourt. 1998. *Fiscal Decentralization in Developing Countries*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bungin, B. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo..
- Denhardt, J. V. and R. B. Denhardt. 2004. *The New Public Service: Serving, not Steering*. New York: M.E Sharpe.
- Dwivedi, O. P. dan Jabbara, J. G. 1989. *Public Service Responsibility and Accountability in J. G. Jabbara and O. P. Dwivedi (eds), Public Service Accountability: A Comparative Perspective*. Connecticut: Kumarian Press.
- Gaspersz, Vincent. 2004. *Perencanaan Strategik untuk Peningkatan Kinerja Sektor Publik: Suatu Petunjuk Praktek*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hardiman F. Budi, 2010. *Ruang Publik; Melacak Partisipasi Demokratis dari Polis sampai Cyberspace*, Jakarta: Kanisius.
- Haque, M.S. 1994. *The Emerging Challenges to Bureaucratic Accountability: A Critical Perspective*, in A. Farazmand (ed.), *Handbook of Bureaucracy*. New York: Marcel Dekker.
- McCallum, B. 1984. *The Public Service Manager: An Introduction to Personnel Management in Australia Public Service*. Australia: Longman, Cheshire.
- Mishra, Satis. 2003. *Desentralisasi di Indonesia: Beberapa Pemikiran Dasar*. Makalah yang disampaikan pada Seminar Nasional Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah. Jakarta, 20 Maret 2003.
- Moenir, H. A. S. 2006. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara. . _____.
- Partowidagdo, Widjajono. 2004. *Mengenal Pembangunan dan Analisis Kebijakan*. Bandung: Program Pascasarjana Studi Pembangunan, Institut Teknologi Bandung.
- _____. "Agraria and industria -towards a typology of comparative administration", dalam W. J. Siffin, Ed. *Toward the Comparative Study of Public Administration*, Bloomington, Indiana University Press, 1957.
- _____. , Penelitian Prakarsa, 2010. Inovasi sosial penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
- Goulet, Denis; *The Cruel Choice; A New Concept in The Theory of Development*; New York; Atheneum; 1977
- Prakarsa, 2010. *Inovasi Sosial Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik*.
- Prasojo dkk. 2006. *Kinerja Pelayanan Publik*. Jakarta Timur: YAPPIKA.
- Riggs, Fred W. 1964. *Administration in Developing Countries: The Theory of Prismatic Society*. Boston: Houghton Mifflin Company.
- Seers, Dudley; *The Meaning of Development, bagian dari The Meaning of Development*; Dalam *International development Review Vol.11, No.4*; 1969

Sirajuddin, Ilham Arief. 2005. *Reorganisasi Birokrasi Pelayanan Publik*. Makassar: Hasanuddin University Press.

———, 2006. *Pembangunan Berkarakter, Mengubah yang Semu Menjadi Nyata*. Makassar: Hasanuddin University Press.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Vasques dkk. 2001. *The World Bank, "Concept of fiscal Decentralization and Worldwide Overview*, 2000. World Bank.

World Bank. 2000. *Concept of Fiscal Decentralization and Worldwide Overview*.

RIWAYAT HIDUP EDITOR

IDENTITAS PRIBADI

Nama : **DR. H.M. Idris Patarai, M.Si.**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
NIP : 19571231 198803 1 052
Pangkat/Golongan : Pembina/IV.b
Tmpt/Tgl. Lhr : Sidrap, 31 Desember 1957
Agama : Islam
Pekerjaan : Kepala Bapeda Kota Makassar
Unit Kerja : Bapeda Kota Makassar
Alamat Kantor : Jl. Jend. Ahmad Yani, No.2, Balaikota Makassar
Alamat Rumah : Jl. Kintamani No 45 Bukit Baruga, Antang - Makassar

IDENTITAS KELUARGA

ISTRI (Nama) : Hj. Sarminaliah
Agama : Islam
Pekerjaan : Staf Diknas Prov. Sulsel

ANAK :

1. Nama/Pendidikan : Thathmainnul Qulub Mallageni/
Terakhir Kedokteran Unhas
2. Nama/Pendidikan : Muhammad Ishlah Manessa/SMA
Terakhir
3. Nama/Pendidikan : Tabayyun Pasinringi/SMP
Terakhir

BAPAK DAN IBU KANDUNG

Nama Bapak/ Tmpt Tnggl Lhr : Made K, 1925
Nama Ibu /Tmpt Tnggl Lhr : Berlian, 1930

BAPAK DAN IBU MERTUA

Nama Bapak/TTL : Jeppu Manessa/tahun 1930
Nama Ibu/TTL : Puang Sitti /tahun 1932

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

1. SD : Tahun 1969 Watampone
2. SMEP : Tahun 1974 Watampone
3. SMEA : Tahun 1977 Watampone
4. S1 : Fakultas Sospol UNHAS Makassar Thn 1986
5. S2 : Administrasi Pembangunan UNHAS, 2000
6. S3 : Jurusan Administrasi Publik Program Pascasarjana, UNM, 2005,

RIWAYAT KEPANGKATAN

1. Penata Muda (III/a) Tahun 1988
2. Penata Muda Tk.I (III/b) Tahun 1992
3. Penata (III/c) Tahun 1996
4. Penata Tk.I (III/d) Tahun 2000
5. Pembina (IV/a) Tahun 2004
6. Pembina Tk. I (IV/b) Tahun 2008

RIWAYAT PEKERJAAN

1. Staf Biro Bina Spiritual Setda Sul-Sel, 1988
2. Kasubag Pelayanan dan Bantuan Sosial, 1991 Biro Bina Sosial Setda Sul. Sel.
3. Anggota DPRD Kabupaten Bone 1992 - 1997

4. Staf Dinas Pendapatan Daerah 1997 - 2000 Tk. II Kabupaten Bone
5. Kasubag Pengaduan Masyarakat Bagian 2000 – 2004; Kehumasan Sekretariat DPRD Prov. Sul Sel
6. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Tahun 2005- 2008; Sekretariat Daerah Kota Makassar
7. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar Tahun 2008- 2009
8. Kepala Bapeda Kota Makassar Tahun 2009–Sekarang.

RIWAYAT ORGANISASI

1. DPD AMPI Tk. I Sul-Sel Tahun 1985 - 1990
2. DPD KNPI Tk. I Sul-Sel, Tahun 1980 - 1995
3. PD. XIX FKPPi Sul-Sel, Tahun 1991 - 1994
4. DPD Golkar Tk. II Bone, Tahun 1992 – 1997
5. DPD Golkar Tk I Sul Sel Tahun 1997 – 2002

RIWAYAT KURSUS DAN PELATIHAN

1. Latihan Pendidikan kependudukan Tahun 1991 di Ujung Pandang
2. Latihan Pendidikan Jurnalistik Tahun 1991 di Ujung Pandang
3. Penataran P-4 Pola Calon Penatar dan Tahun 1994 di Jakarta
4. Diklat Perencanaan Pendidikan Tahun 1989 di Ujung Pandang
5. Penataran Kewaspadaan Nasional Tahun 1991 di Jakarta
6. Penataran Hukum Tata Usaha Negara Tahun 1991 di Ujung Pandang
7. Diklat Administrasi Pemerintahan Tahun 1992 di Ujung Pandang
8. Orientasi Pelaksanaan Tugas DPRD Tahun 1992 di Makassar
9. Orientasi Pemerintahan di Daerah Tahun 1992 di Wajo
10. Diklat Manajemen Pelayanan Prima Tahun 2001 di Makassar
11. Diklat Pimpinan Tk. IV/ Tahun 2002 di Makassar ADUM/SEPADA/SEPALA
12. Diklat Pimpinan Tk. III SPAMA/SPADYATahun 2003 di Makassar
13. Diklat Penyusunan Renstra dan Laki Tahun 2003 di Makassar
14. Diklat Manajemen Sumber Daya Tahun 2004 di Makassar
15. Managing Changes Developing Tahun 2004 di Makassar.

TULISAN YANG PERNAH DIPUBLIKASIKAN:

Buku:

1. *Arung Palakka Pembebas Tanah Bone* (2003);
2. *Potensi Diri PNS: Tantangan dan Pengembangan* (2004);
3. *Reorganisasi Kebijakan Pelayanan Publik - Suatu Tinjauan Strategis Membangun Makassar dari Dalam* (2005);
4. *Posisi Koperasi Sekunder dalam Pembinaan Koperasi Primer -Suatu Tinjauan Pembinaan Puskud Hasanuddin terhadap Anggotanya* (2000);
5. *Pembangunan Berkarakter* (2006);
6. *Ilham Arief Sirajuddin di Mata Publik Makassar;*
7. *Prestasi Makassar* (2007).
8. *Ombudsman Kota Makassar, Pengalaman Membangun Ombudsman Daerah* (2008)
9. *Ilham Arief Sirajuddin, Dari 1 Ke 1* (2009).
10. *Restorasi Indonesia ; Membangun Demokrasi Etik dan Politik Solidaritas* (2010)

Artikel di Berbagai Media Massa:

1. *Golput dalam Era Multi Partai* (Pedoman Rakyat , Opini 2002).
2. *Presiden Langsung atau Langsung Presiden* (Pedoman Rakyat , Opini 2003).
3. *Pilkada Sebagai Wahana Pelaksanaan Demokrasi* (Mimbar Aspirasi 2003)).
4. *Ada yang Terlalu Takut pada Tentara* (Fajar Opin 2003).
5. *Suatu Malam dengan Jusuf Kalla* (Pedoman Rakyat, 2003).
6. *Manusia dan Masyarakat* (Mimbar Aspirasi, 2002).
7. *TNI dan Perang di DPR* (Fajar, 2003).
8. *Terperangkap dalam Rangkap Jabatan* (Pedomen Rakyat, 2002).
9. *Gubernur atau Kepala Daerah, Siapa yang Pilih?* (Pedoman Rakyat, 2002).
10. *Di Balik Pertanggungjawaban Presiden* (Mimbar Aspirasi , 2003).

11. *Too Laa Lit Hubungan Eksekutif – Legislatif* (Pedoman Rakyat, 2003).
12. *Politik Uang dan Partai Politik* (Pedoman Rakyat, 2003).
13. *Konstitusi atau Inkonstitusi dalam Pemerintah Indonesia* (Fajar, 2002).
14. *Diperlukan Nasionalisme Partai Politik Peserta Pemilu* (Fajar, 2003).

Selain menulis artikel, gemar menulis cerpen dan puisi (belum dipublikasi)

Pengalaman Kerja:

1. Direktur Umum Puskud Hasanuddin, 1997-2000
2. Pimpinan Redaksi Majalah Mimbar Aspirasi DPRD Propinsi Sulawesi Selatan, 2002-2004.

Perjaanan ke Luar Negeri dan Pengabdian Masyarakat

1. Mewakili pemuda Indonesia dalam Program Pertukaran Pemuda di Jepang, *The Friendship Programme Indonesia – Japan 21th Century*, Tahun 1986.
2. Safari Investor ke Thailand dan Taiwan, *The Mission Investment Taiwan and Thailand*, Tahun 1997.
3. Pertemuan *International Conference on Eco Cities and Workshop for Esat Asia Pilot Eco Cities*, October 21-23, 2010, in Yokohama, Japan.
4. Training of Leadership in Local Government: Decision, Action, Result (Dare) Conduct by: Lee Kuan Yuw School of Public Policy and World Bank Institute, 22 Mei-02 Juni 2011.
5. Training Program For Local Government Officials From Makassar, Indonesia by Northern Ilinouis University, 17 June – 1 July 2011, in Ilinouis, USA.
6. Word City Summit and Singapore International Water Week by: Lee Kuan Yuw Enterprise, 04July - 08July 2011, in Singapore.
7. Wastewater Treatment Management, 07 august – 12 august 2011 in Bangkok, Thailand

Pengabdian Masyarakat:

1. Mengasistensi Penyusunan Renstra DPRD Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Bone dan Kota Palopo (2002).
2. Senantiasa membawa materi pada Diklat Penjenjangan dan Diklat Prajabatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur dan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN).
3. Manggala BP-7 Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar (1984-1991)
4. Pemakalah dan moderator dalam berbagai seminar.
5. Mengajar pada berbagai perguruan tinggi swasta di Makassar.
6. Mendorong Teraksananya Delegasi Kewenangan Pemerintah Kota ke Camat.
7. Tim Perumus Kebijakan Perapan Pakta Integritas Pemerintah Kota
8. Mengadvokasi Pendirian Ombudsman Daerah Kota Makassar dan menjadi Sekretaris Tim Rekrutmen Komisioner Ombudsman Daerah Kota Makassar.
9. Tergabung dalam (Centere for Regionl Economic Research (CORNER) melakukan Penelitian Peningkatan Kapasitas Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah Kota Makassar.
10. Penasehat Spritual Kopel Sulawesi.



Yang bersangkutan memiliki komitmen dalam menjalankan pemerintahan yang baik dan bersih. Beberapa inisiasi dan inovasi penting yang telah dilakukan, antara lain pemberlakuan pakta integritas, pembentukan lembaga independen untuk pengawasan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, kerja sama dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam pencegahan tindak pidana korupsi di tubuh pemerintahan, pembentukan Ombudsman untuk pengawasan penyelenggaraan pelayanan public, program bantuan gratis bagi masyarakat (dokumen-dokumen kependudukan – KTP, KK, Akte Lahir dan Kematian, bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin), kerjasama pengintegrasian program NGO-SKPD dan Corporate untuk masyarakat miskin, menunjukkan yang bersangkutan layak untuk mendapatkan penghargaan.

Syamsuddin Alimsyah
Legislative Watch Committee

TENTANG EDITOR

Dr. H. Muh. Idris Patarai, M.Si., lahir di Sidrap 31 Des. 1957. Tamat SD Watampone, 1969; SMEP-Watampone (1974); SMEA Watampone (1977); Sospol Unhas (1986); S2 Unhas-Administrasi Pembangunan (2000); S3-IJNM; Administrasi Publik (2010) dengan Judul Sisertasi: "Efektifitas Kinerja Lembaga Ombudsman dan Akuntabilitas Publik Pemerintah Daerah Istimewa, Yogyakarta, yang kini diedit menjadi buku. Saat ini ia Kepala Bappeda Kota Makassar, .



Di sela kesibukannya sebagai pejabat publik (Kepala BAPPEDA) Kota Makassar,, ia masih sempat menulis sejumlah buku, di antaranya: Arung Palakka Pembebas Tanah Bone (2003); Potensi Diri PNS; Tantangan dan Pengembangan (2003); Reorganisasi Kebijakan Pelayanan Publik (2005); Ilham Arief Sirajuddin di Mata Publik Makassar (Unhas Pres, 2006); Prestasi Makassar (Unhas Press, 2007); Ombudsman Kota Makassar (2008), Reorganisasi Pelayanan Publik (Unhas Press, 2009), Ilham Arief Sirajuddin dari 1 Ke 1 (Yaspindo, 2009); Restorasi Indonesia: Membangun pasar Demokrasi Etik dan Politik Solidaritas (Pustaka Yaspindo 2010); Ombudsman dan Akuntabilitas Publik: Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta (Pustaka Yaspindo 2010); dan selengkapnya dapat dibaca di halaman terakhir buku ini.

Ilham Arief Sirajuddin dilantik sebagai Walikota Makassar periode pertama, 8 Mei 2004, hingga memasuki periode ke -2 kepemimpinannya telah membawa perubahan yang cukup signifikan. bagi pembangunan Kota Makassar, yang kini mengalami perkembangan pesat dan telah menjelma menjadi kota metropolis yang dapat di sejajarkan dengan kota-kota besar lainnya di Pulau Jawa.

Kemajuan yang telah dicapai, baik dalam pembangunan infrastruktur maupun aktivitas ekonomi, sosial, pendidikan, budaya dan pemerintahan tentu saja mendapatkan apresiasi positif dari berbagai pihak, baik dari Pemerintah Pusat, Daerah, Luar Negeri, maupun dari pihak lain yang terkait. Berbagai prestasi dan penghargaan pun telah banyak ditorehkan.

Apresiasi positif presiden maupun luar negeri kepada pemerintahan Walikota Ilham Arief Sirajuddin tersebut diberikan dalam bentuk penghargaan (award), satya lancana, sertifikat, plakat dan piala. terutama penghargaan **Bintang Jasa Utama dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 8 Agustus 2011. dan masih banyak lagi yang lainnya seperti dipaparkan dalam buku ini.**

ISBN: 978-602-99673-1-9



Penerbit :
cv. GADIL MEDIA PRIMA
Jl. Bajiminas II Dalam No. 7C, Makassar, 90126
Telp. (0411) 8112960, Mobile: 08164383822,
Email : gadilmedia@gmail.com